

**STUDI EVALUASI TENTANG KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA PADA TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA
(ANALISIS DATA SUSENAS TAHUN 1995 DAN 2006)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
MAGISTER
Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia**

**Rizqon Halal Syah Aji
NPM : 0606023910**



**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
KAJIAN KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DEPOK
JULI, 2009**

"Tuhanku,...

Tesima kasih Kau takdikan dirinya dalam hidupku"

Karya ini kusembahkan

Untuk Tisiku Tisik Enka

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rizqon Halal Syah Aji
NPM : 0606023910

Tanda Tangan :

Rizqon

Tanggal

: 17 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rizqon Halal SyahAji
NPM : 0606023910
Program Studi : Kajian Kependudukan & Ketenagakerjaan
Judul Tesis : Studi Evaluasi Tentang Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tingkat Provinsi di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 1995 dan 2006)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kependudukan & Ketenagakerjaan pada program studi Kajian Kependudukan & Ketenagakerjaan Program Pasca Sarjana Kajian Kependudukan & Ketenagakerjaan Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Sonny Harry B. Harmadi
Pembimbing I : Prof. Dr. I. Gusti Ngurah Agung
Pembimbing II : Drs. Chotib, M.Si
Penguji : Dr. Djainal Abidin Simandjuntak, SE, M.Si
Penguji : Dwini Handayani, SE, M.Si



Ditetapkan di : Universitas Indonesia Depok
Tanggal : 17 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Pantas kata, pantas perbuatan, seiring ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberkati penulis, sehingga halangan dan rintangan telah dibukakan-Nya untuk penulis, sampai pada tahap penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Studi Evaluasi Tentang Kualitas Sumber Daya Manusia pada Tingkat Provinsi di Indonesia. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia.

Tidak ada kata-kata yang bisa banyak penulis sampaikan, karena terselesainya tulisan ini tak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga, khususnya kepada :

- Bapak. Prof. I. Gusti Ngurah Agung, Ph.D, sebagai pembimbing pertama. Beliau tidak saja memberikan bimbingan mengenai materi penelitian, akan tetapi juga memotivasi memperdalam bahasan penelitian dalam penulisan tesis ini. Kesabaran dan disiplin mengarahkan penulis layaknya seorang bapak yang membimbing anaknya.
- Bapak. Chotib, M.Si, sebagai pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukannya dengan penuh kesabaran dan pengertiannya.
- Ibu. Prof. Sri Moertiningsih Setyo Adioctomo, Ph.D dan Ibu. Dwini Handayani, M.Si, sebagai ketua dan sekretaris program studi, beserta Ibu Nia dan Mas Hendro yang telah membantu penulis selama studi, tak lupa saya sampaikan terimakasih untuk Pak Tata yang telah membantu penulis mengolah data.
- Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji, Bapak. Dr. Sonny Harry B. Harmadi, Bapak Dr. Zaenal Abidin serta Ibu Dwini Handayani, M.Si.
- Kepada kedua orang tua penulis, yang memberi do'a, spirit dan kasih sayang sepanjang waktu, Bapak Tadjudin Noor dan Ibu Siti Toinah, beserta kakak-kakak yang selalu memotivasi penulis

- Para senior yang telah membantu moril maupun materiil, Mas Drs. Entjeng Shobirin, Bapak Prof. Dr. H. Achmad Mubarak, MA, Bapak Dr. H. Arief Mudzatsir Mandan, M.Si, Bapak Drs.H. Mujayin, M.Si, Bapak Makmuri Sukarno, Ph.D, Bapak Drs. H. Abdul Kholiq Arief, M.Si, Bapak Mochtar Mohammad, S.Sos, Bapak. Lilik Hariyoso, S.Sos, Bapak. TB. Hendy Irawan, SE.
- Teman-teman semasa studi angkatan XV (angkatan 2006), khususnya Mba' Fitranita dan Mba' Evi yang banyak membantu dan mengkritisi penulis dalam menulis tesis ini.
- Partner dan sahabat berbagi, TIM SRC (*SwaMedia Research and Communication*) dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi motivasi dan do'a.

Akhirnya kepada semua pihak yang membantu dalam tulisan ini, penulis menyampaikan permintaan maaf serta mengucapkan terima kasih, semoga semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan sungguh dapat memberikan hikmah dan ridho-Nya, kiranya Allah selalu memberikan rahmat untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini dan seoga hasil tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa depan.

Depok, 2009

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqon Halal Syah Aji
NPM : 0606023910
Program Studi : Kajian Kependudukan & Ketenagakerjaan
Fakultas : Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

STUDI EVALUASI TENTANG KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA
TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA (ANALISIS DATA SUSENAS TAHUN 1995
DAN 2006)

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2009
Yang menyatakan



(Rizqon Halal Syah Aji)

ABSTRAKSI

Nama : Rizqon Halal Syah Aji
Program studi : Kajian Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
Judul : Studi Evaluasi tentang Kualitas Sumber Daya Manusia
pada Tingkat Provinsi di Indonesia

Penelitian tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dengan menggunakan data Susenas 1995 dan 2006, bertujuan untuk menentukan kualitas SDM di masing-masing provinsi, sekaligus melihat perbedaan antarprovinsi dengan metode analisis faktor. Dari data tersebut dipilih variabel-variabel yang dapat mengukur konsep kualitas sumber daya manusia. Variabel-variabel yang terpilih ada 17, kemudian dikelompokkan menjadi lima kelompok variabel tunggal yaitu kelompok pendidikan, kelompok kesehatan, kelompok kualitas rumah tangga, kelompok aktivitas ekonomi dan kelompok kualitas lingkungan.

Dari lima indikator dibuat analisis faktor dua tahap. Analisis faktor tahap pertama dilakukan untuk pembentukan nilai faktor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis faktor tahap dua untuk membentuk nilai faktor total/gabungan yang kemudian disebut faktor kualitas hidup, dan ditransformasikan ke dalam indeks Agung untuk mendapatkan indeks komposit sumber daya manusia (IKSDM) dan sekaligus dibuat ranking dan klasifikasi provinsi.

Hasil yang diperoleh menunjukkan perbedaan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi di Jawa dan luar Jawa sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah.

Kata kunci: Analisis Faktor, Indeks Komposit dan indeks kualitas sumber daya manusia (IKSDM)

ABSTRACT

Name : Rizqon Halal Syah Aji
Major : Population and Human Resources Studies
Title : Evaluation Studies on Human Resources Quality towards
Province in Indonesia

This research on Human Resources (HR) quality in Indonesia which utilizing National Survey on Social and Economic's (Susenas) data year of 1995 and 2006 aims to define HR quality in each province in Indonesia, and also clarify each HR quality differences in each province. From those Susenas Data, we choose some variables which could be defined able to scale HR quality concept in each province in Indonesia. There are 17 chosen variables, which grouped into five groups of single indicator: education, health, household quality, economics activity and environment quality.

From those five indicators, we use factor analysis in two steps. In the first factor analysis conducted to form factor value. Furthermore, the analysis continued to second step to form total factor value / composite which then called as life quality factor and then transformed to grant index in order to get composite index of human resources quality (IKSDM) and also ranking list and province classification.

The gained result shows that there is a difference of human resources quality among province in Java Island and outside Java Island before local autonomy period and during autonomy period.

Keywords: Factor Analysis, Composite Index, and Human Resources Quality Index (IKSDM).

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Keterangan Orisinalitas	
Halaman Pengesahan	
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Tujuan	6
1.4.1. Tujuan Umum	6
1.4.2. Tujuan Khusus	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Paradigma Pembangunan Manusia	8
2.2. Pembangunan SDM di Era Otonomi Daerah	10
2.3. Kerangka Pikir Teoritis Kualitas SDM	14
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Sumber Data	20
3.2. Variabel Penelitian	20
3.3. Kerangka Pikir Analisis	23
3.4. Metode Analisis	25
3.5. Sistem Informasi Geografi (GIS)	29
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Kelompok Indikator Tunggal.....	31
4.1.1. Kualitas Pendidikan Tahun 1995 dan 2006.....	31
4.1.2. Kualitas Kesehatan Tahun 1995 dan 2006.....	37
4.1.3. Kualitas Rumah Tangga 1995 dan 2006.....	43
4.1.4. Kualitas Aktivitas Ekonomi 1995 dan 2006.....	48
4.1.5. Kualitas Lingkungan 1995 dan 2006.....	51
4.2. Hasil Analisis Faktor.	55
4.2.1. Analisis Faktor Tahap Pertama	57
4.2.1.1. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Pendidikan	57
4.2.1.2. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas kesehatan	62
4.2.1.3. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Rumah Tangga	68
4.2.1.4. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Ekonomi	74

4.2.1.5. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas lingkungan	74
4.2.2. Analisis Faktor Tahap Kedua (Analisis Faktor Gabungan)	79
4.2.3. Perbandingan Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia (IKSDM) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	90
DAFTAR REFERENSI	92
LAMPIRAN	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema otonomi daerah di Indonesia	11
Gambar 2.2 Skema kegiatan perencanaan pembangunan otonomi	12
Gambar 3.1 Skema alur pikir pembentukan indeks kualitas sumber daya Manusia	24
Gambar 4.1 Peta klasifikasi kualitas pendidikan Indonesia 1995	61
Gambar 4.2 Peta klasifikasi kualitas pendidikan Indonesia 2006.....	61
Gambar 4.3 Peta klasifikasi kualitas kesehatan Indonesia 1995	67
Gambar 4.4 Peta klasifikasi kualitas kesehatan Indonesia 2006	67
Gambar 4.5 Peta klasifikasi kualitas rumah tangga Indonesia 1995.....	73
Gambar 4.6 Peta klasifikasi kualitas rumah tangga Indonesia 2006.....	73
Gambar 4.7 Peta klasifikasi kualitas lingkungan Indonesia 1995.....	78
Gambar 4.8 Peta klasifikasi kualitas lingkungan Indonesia 2006.....	78
Gambar 4.9 Peta klasifikasi kualitas SDM Indonesia 1995.....	84
Gambar 4.10 Peta klasifikasi kualitas SDM Indonesia 2006.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1. Variabel-variabel yang dipilih untuk membentuk faktor.....	21
Tabel 4.1. Angka indikator kualitas pendidikan Indonesia.....	31
Tabel 4.2. Angka indikator kualitas kesehatan Indonesia.....	37
Tabel 4.3. Angka indikator kualitas rumah tangga Indonesia.....	43
Tabel 4.4. Angka indikator kualitas ekonomi Indonesia.....	48
Tabel 4.5. Angka indikator kualitas lingkungan Indonesia.....	51
Tabel 4.6. Persamaan Faktor Pendidikan.....	57
Tabel 4.7. Hasil analisis faktor indikator pendidikan Indonesia.....	58
Tabel 4.8. Nilai Z untuk masing-masing faktor pendidikan.....	59
Tabel 4.9. Persamaan faktor kesehatan.....	63
Tabel 4.10. Nilai Z masing-masing faktor kesehatan.....	63
Tabel 4.11. Hasil Analisis Faktor Indikator kesehatan Indonesia.....	64
Tabel 4.12. Hasil analisis faktor kualitas rumah tangga Indonesia.....	69
Tabel 4.13. Persamaan faktor kualitas rumah tangga.....	70
Tabel 4.14. Nilai Z masing-masing faktor kualitas rumah tangga.....	70
Tabel 4.15. Hasil analisis faktor kualitas lingkungan Indonesia.....	75
Tabel 4.16. Persamaan faktor kualitas lingkungan.....	76
Tabel 4.17. Nilai Z masing-masing faktor kualitas lingkungan.....	76
Tabel 4.18. Hasil analisis faktor gabungan.....	80
Tabel 4.19. Persamaan faktor gabungan.....	81
Tabel 4.20. Perbandingan IKSDM (1995) dengan IPM BPS (1999).....	85
Tabel 4.21. Hasil korelasi IKSDM (1995) dengan IPM BPS (1999).....	86
Tabel 4.22. Perbandingan IKSDM (2006) dengan IPM BPS (2005).....	87
Tabel 4.23. Hasil korelasi IKSDM (2006) dengan IPM BPS (2005).....	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	
1. Persentase variable dasar/indikator tunggal data susenas 1995.....	94
2. Persentase variable dasar/indikator tunggal data susenas 2006.....	97
3. Program pengolahan data.....	99
4. Hasil analisis faktor	104



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kata "pembangunan" awalnya diartikan sebagai pembangunan dari segi spiritual maupun material, namun seiring waktu dalam perkembangannya dan proses pembangunan, seakan hanya tereduksi menjadi pembangunan fisik saja. Penerapan konsep itu didasarkan pada realitas pembangunan yang terjadi pada berbagai negara, terlebih fakta pembangunan di negara berkembang. Pasca Perang Dunia II, strategi pembangunan yang diterapkan menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi dengan kondisi pemulihan pasca perang, penyediaan kebutuhan hajat hidup masyarakat seperti penyediaan kebutuhan pokok : sandang, pangan, dan papan. Tujuan pembangunan yang semula berupa kesejahteraan manusia berubah menjadi peningkatan angka pertumbuhan.

Pergeseran makna pembangunan ini, mengarahkan tujuan pembangunan menjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Maka keberhasilan suatu pembangunan juga diukur dari indikator ekonomi seperti GNP (*Gross National Product*) atau GDP (*Gross Development Product*), yang melihat manusia dengan input dan pertumbuhan. Berbeda dengan pendapat Dr. Yulia Rahardjo (1996). Dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengatakan bahwa banyak kasus terlihat pertumbuhan ekonomi tidak selalu beriringan dengan pertumbuhan kesejahteraan mayoritas penduduk. Fenomena yang sering muncul adalah timbulnya berbagai kesenjangan di masyarakat. Kesenjangan tersebut terjadi karena mekanisme distribusi (sumber daya) tidak berfungsi dengan baik.

Tahun 1970-an muncul konsep "pendekatan kebutuhan pokok" (*basic need approach*) sebagai usaha memperbaiki mekanisme dengan distribusi yang tidak berjalan dengan cara menekankan pada distribusi hasil pembangunan. Parameternya dalam penggunaan konsep ini ada tiga, yaitu: angka kematian bayi (*infant mortality rate*), angka harapan hidup pada waktu lahir, dan tingkat melek

huruf. Pengukuran ini dikenal dengan “indeks mutu hidup” (*Physical Quality Life Index, PQLI*).

Penduduk adalah kekayaan nyata suatu bangsa. Pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno pembangunan SDM dimulai dengan melakukan perencanaan wajib belajar enam tahun (tamat SD) yang pembiayaannya ditanggung oleh negara (Dharmaningtyas, 2004).

Pembangunan sumber daya manusia (SDM), merupakan agenda pembangunan dari masa ke masa. Ketika zaman orde baru, dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Di akhir pembangunan yang dimiliki oleh rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yakni GBHN tahun 1999 masih dengan tegas menyebutkan pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, Sehingga SDM ditempatkan bukan hanya sekedar modal pembangunan tetapi justru sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Di era otonomi daerah seperti yang sudah dijalankan republik ini semenjak era reformasi bergulir, pembangunan nasional juga minitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat artinya pembangunan menempatkan penduduk Indonesia sebagai pelaku dan sekaligus penikmat pembangunan. Jadi dalam hal ini, penduduk dapat dilihat sebagai sumber daya manusia pembangunan yang menentukan keberhasilan pembangunan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang kewenangan otonomi pemerintah daerah yang luas, terutama kewenangan utuh tentang penyelenggaraan pembangunan daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, muncul sebuah dilema, bahwa tidak semua daerah mampu mengetahui sudah sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan. Seiring dengan itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan aturan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini berimplikasi kepada program-program kependudukan

semisal Keluarga Berencana (KB) tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat. Hal ini dikukuhkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 103 Tahun 2001 yang mengatakan "kewenangan pengelolaan Keluarga Berencana dilimpahkan kepada pemerintah daerah mulai desember 2003". Namun banyak pemerintah daerah yang mengabaikan Kepres tersebut sehingga program KB menjadi "terlantar" (BKKBN, 2007). Sudut pandang itu juga merupakan salah satu hal utama yang perlu ditinjau kondisinya, karena setidaknya KB berpengaruh pada pembangunan sumber daya manusia yang pada dasarnya adalah modal dasar bagi pembangunan.

Dari sudut pandang globalisasi juga terjadi pergeseran nilai yang memaksa seluruh komponen yang ada untuk menyesuaikan diri agar tidak tertinggal oleh arus globalisasi yang begitu cepatnya. Kondisi ini memaksa perubahan pada tuntutan akan kualitas sumber daya manusia. *United Nation Development Program* (UNDP) tahun 1990 memperkenalkan "*Human Development Index, HDI*" (Indeks Pembangunan Manusia, IPM). Pemaparan William H. Draper (Administrator UNDP) dalam kata pengantar *Human Development Index*, bahwa munculnya HDI bukan berarti mengesampingkan peran GDP (1990). Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menerjemahkan GDP tersebut dalam pembangunan manusia. Proses penerjemahan itu kadang berhasil atau kadang mengalami kegagalan.

Perbedaan pembangunan manusia dengan pembangunan yang selama ini banyak dilakukan, yaitu: pembangunan manusia, menurut definisi UNDP adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people choices*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan akses ke sumberdaya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak. Pilihan lain yang dianggap mendukung tiga pilihan di atas adalah kebebasan politik, hak asasi manusia, dan penghormatan atas hak pribadi (*personal self-respect*).

Penjelasan di atas memberikan keterangan bahwa pembangunan manusia tidak sekedar pertumbuhan GNP, pendapatan/kekayaan, produksi komoditas serta akumulasi modal. Peningkatan pendapatan mungkin hanya satu dari sekian

banyak pilihan, tapi bukan berarti pendapatan merupakan satu-satunya pilihan manusia agar dapat hidup sejahtera.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun satu indeks komposit berdasarkan tiga indikator yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa, rata-rata lama sekolah (*means year of schooling*) dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka melek huruf penduduk dewasa mengukur “pendidikan”, dan indikator daya beli mengukur kemampuan mengakses ke sumber daya ekonomi.

Dari sudut pandang di atas, tentu ada kendala dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pembangunan di tingkat regional Kabupaten/kota maupun provinsi. Kendala-kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pendanaan. Untuk itu diperlukan penetapan skala prioritas yang jelas. Dalam menentukan prioritas tersebut, harus dipertimbangkan antara lain hal-hal seperti :

- a. Pengkajian tentang bidang-bidang yang dirasakan masih tertinggal,
- b. Penentuan pilihan pada bidang yang paling mendesak,
- c. Pembangunan dalam bidang yang diperhitungkan akan mempunyai dampak paling menentukan dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan,
- d. Bidang yang diperhitungkan akan memberikan manfaat yang terbesar untuk dinikmati oleh sebagian besar masyarakat,
- e. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada.

Dalam rangka penentuan prioritas tersebut, akan dilakukan pengklasifikasian kualitas sumber daya manusia dengan membuat indikator. Penyusunan indikator tersebut didasarkan atas perhitungan indeks komposit yang secara teoritis dapat menyajikan sebuah indikator sumber daya manusia untuk mempelajari perbedaan relatif antarwilayah (provinsi), di mana kebenarannya atau kecocokannya dijelaskan secara empiris melalui angka-angka (statistik). Hal ini didasarkan untuk dibentuk sebuah indeks tunggal.

Pembentukan Indeks komposit yang akan dilakukan dalam penelitian tesis ini, merupakan substitusi indeks komposit yang banyak dipakai yakni PQLI (*Physical*

Quality Life Index) dan HDI (*Human Development Index*) yang pembentukannya dipihak lain PQLI dan HDI didasarkan pada indikator-indikator yang tidak dapat diobservasi seperti kematian bayi dan angka harapan hidup. Kelemahan angka harapan hidup merupakan ukuran yang tidak dapat diobservasi, sehingga, baik PQLI maupun HDI tidaklah mungkin diterapkan pada tingkat wilayah seperti kabupaten, kecamatan dan desa (Agung, 1996). Indeks komposit perlu dibentuk berdasarkan variabel atau indikator sederhana yang dapat dikukur pada tingkat wilayah yang lebih kecil.

1.2. Permasalahan

Pembangunan pada setiap negara tidak bisa lepas dari ketergantungannya terhadap pengembangan sumber daya manusia dan konsolidasi negara terhadap masyarakat melalui pengorganisasian kegiatan dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun modal sumber daya alam dan bantuan luar negeri memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, namun tidak ada diantaranya yang lebih penting dan ditekankan daripada sumber daya manusia (Tjiptoherijanto, 1998).

Kemandirian lokal yang mulai difokuskan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bertumpu pada semua sumber daya manusia yang ada di suatu daerah itu sendiri, suatu daerah memiliki keunggulan alam yang berbeda-beda satu sama lain, maka keberhasilan pembangunan suatu daerah menghasilkan keunggulan khas dan tidak menutup kemungkinan adanya potensi lain yang belum didayagunakan sepenuhnya karena rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Perkembangan kualitas sumber daya manusia antardaerah perlu ditelaah dan diikuti perkembangannya agar dapat diketahui kebijakan apa saja yang seharusnya menjadi prioritas intervensi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Selama ini penelitian tentang kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih relatif kurang terlebih setelah era desentralisasi bergulir, banyak pemekaran dilakukan sehingga muncul kabupaten-kabupaten baru maupun provinsi-provinsi baru, sementara mereka tidak mengetahui jelas potensi daerahnya sehingga kebijakan-kebijakan prioritas pun belum bisa dirasakan oleh

penduduknya. Oleh karena itu penelitian ini, diharapkan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan tentang kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Apakah ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia antarprovinsi di Indonesia sebelum maupun sesudah otonomi daerah ?
2. Apakah ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia yang mencolok antarprovinsi yang berada di pulau Jawa dengan yang di luar pulau Jawa?

1.4. Tujuan

1.4.1. Tujuan Umum

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masing-masing provinsi.

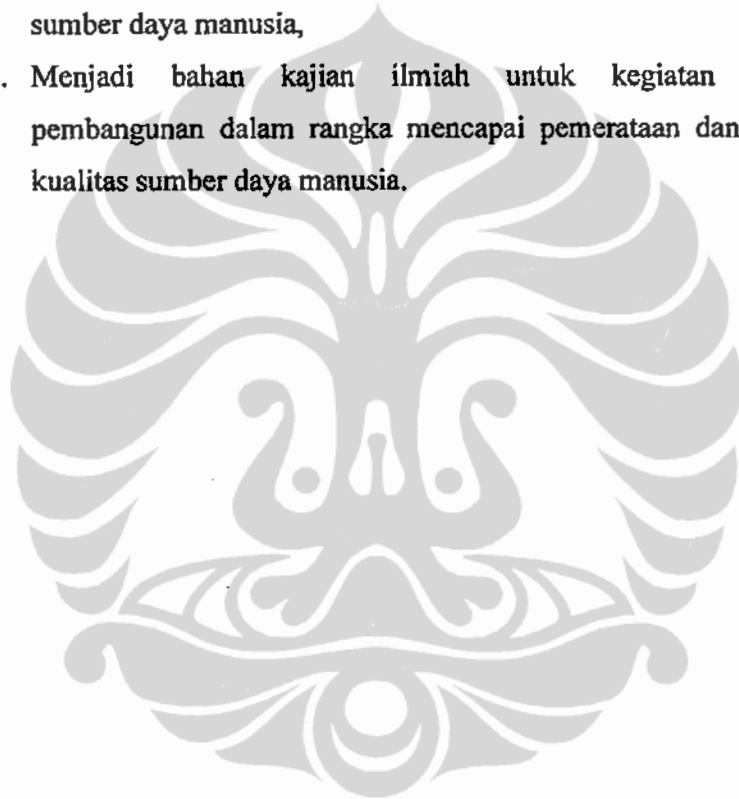
1.4.2. Tujuan Khusus

1. Membandingkan indeks kualitas sumber daya manusia pada tingkat provinsi di Indonesia antara sebelum dan sesudah otonomi daerah,
2. Memilih indikator tunggal sederhana yang dapat diobservasi, dan dapat mengukur konsep kualitas sumber daya manusia pada tingkat provinsi di Indonesia,
3. Menentukan indeks komposit kualitas sumber daya manusia pada tingkat provinsi di Indonesia,
4. Melihat perbedaan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi di Indonesia sebelum maupun sesudah era otonomi daerah.

1.5. Manfaat dan Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam;

1. Memperoleh gambaran (deskriptif) tentang perbedaan serta urutan *ranking* kualitas sumber daya manusia pada tingkat provinsi di Indonesia sebelum maupun sesudah otonomi daerah,
2. Memperoleh gambaran (deskriptif) tentang perbedaan kualitas sumber daya manusia antarprovinsi yang berada di pulau Jawa dengan yang di luar pulau Jawa
3. Melihat kemungkinan intervensi kebijakan pemerintah dalam upaya-upaya untuk pemeratakan pembangunan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia,
4. Menjadi bahan kajian ilmiah untuk kegiatan perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Paradigma Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan sumber daya manusia Indonesia berangkat dari dasar filosofikal konstitusi kita yakni pembukaan UUD 1945, yang mengatakan :

”... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia....”

Pembangunan nasional Indonesia adalah amanat konstitusi baik pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945 yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang cita-cita bangsa Indonesia. Negara Indonesia setidaknya memiliki ideologi pembangunan yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Strategi pembangunan Indonesia bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan kesejahteraan sosial (pemerataan pembangunan).

Pembangunan manusia di Indonesia, menurut ekonom Emil Salim, telah terjadi pergeseran pemikiran pembangunan, dari *production centered development*, ke *distribution-growth development*, kemudian ke *basic need development*, dan akhirnya menuju ke *human centered development*. Model pembangunan ini, menganggap martabat manusia merupakan faktor penentu dan penting (Sukamdi, 1996).

Dalam konteks pergeseran paradigma pembangunan, Simbolon dan Sindhunata (dalam Sukamdi, 1996) mencatat ada dua hal menarik. *Pertama*, pembangunan tidak lagi hanya sekedar berorientasi pada ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi hanya dijadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan yang lebih mendasar. Ini didasarkan pada pengalaman yang menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi, terutama ketika dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, tidak menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang bersifat non-

ekonomi. *Kedua*, terkait dengan pergeseran itu, sumber daya manusia telah menjadi paradigma pembangunan.

Bicara manusia sebagai pelaku atau tujuan dapat diartikan bahwa manusia merupakan pelaku maupun tujuan, menjadikan manusia sebagai konsep yang kompleks dan bersifat multidimensional. Berbicara tentang manusia dapat disentuh melalui berbagai pendekatan atau studi terhadap manusia selalu bersifat parsial, hanya melihat sisi atau dimensi tertentu dan mencerminkan sudut pandang yang dilatarbelakangi oleh adanya tujuan tertentu. Begitu juga jika membahas manusia pada perspektif "sumber daya manusia."

Menurut Tirtosudarmo (2007) setidaknya ada tiga hal yang dianggap penting dalam membicarakan mengenai sumber daya manusia di Indonesia. *Pertama*, secara garis besar konteks kesejarahan yang melatarbelakangi munculnya teori dan konsepsi yang kemudian dikenal sebagai perspektif sumber daya manusia. *Kedua*, masuknya perspektif sumber daya manusia ke Indonesia tidak mungkin terlepas dari konteks politik yang saat ini sedang berlangsung dan berkembang di Indonesia, terutama semenjak zaman orde baru-Suharto yang karena kontradiksi-kontradiksi internal yang dimilikinya selalu berada dalam situasi mencari legitimasi akademis baru untuk mempertahankan pendekatan maupun strategi pembangunannya, dengan mempertimbangkan berbagai perubahan baik pada tingkat nasional maupun global. *Ketiga*, yakni mengenai relevansi perspektif sumber daya manusia pasca Orde Baru yakni orde reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang. Perubahan orde ini menggeser paradigma pada aspek demokratisasi, transparansi, dan otonomi daerah merupakan beberapa aspek dari paradigma politik baru yang mengharuskan kita secara kritis menempatkan perspektif sumber daya manusia dalam konteks sejarah baru. Pada paradigma baru sumber daya manusia penduduk sebagai warga (*citizens*) dan bagian dari *civil society* (diterjemahkan sebagai masyarakat warga). Reformasi politik pasca Suharto sudah seharusnya juga diikuti oleh perubahan paradigma pembangunan dan perubahan perspektif terhadap penduduk. Sehingga penduduk ditempatkan sebagai warga negara, hal itu berarti mengandaikan adanya peran aktif dari penduduk dalam penyelenggaraan negara (*governance*) dan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan.

Melihat keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan sering dikaitkan dengan keberhasilan strategi pembangunan negara-negara ini dengan pemberian prioritas pada pengembangan aspek *human capital*. Keterbatasan sumber daya alam (*natural resources*) mendorong mereka melakukan investasi pada sumber daya manusia (*human resources*) melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja mereka. Karena itu, pembangunan adalah persoalan pilihan yang dimiliki oleh penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Pembangunan bukanlah semata-mata pertumbuhan ekonomi, yang semata-mata merupakan alat yang sangat penting, namun perlu adanya pilihan bagi penduduk untuk membangun dirinya. Sesuatu yang sangat fundamental adalah membangun kemampuan manusia (*human capabilities*).

2.2. Pembangunan SDM di Era Otonomi Daerah

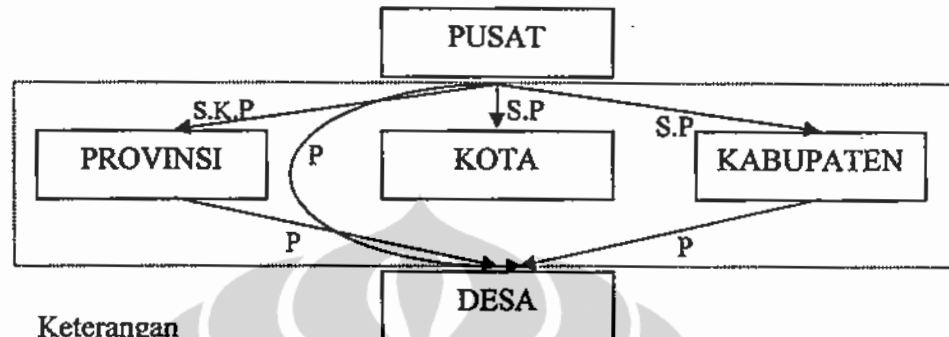
Peletakan dasar-dasar hubungan struktural antara pusat dan daerah pada kerangka kekuasaan politik dan administrasi semenjak zaman orde baru sudah ada, termaktub dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 (Kuncoro, 2004). Sejalan dengan tuntutan demokratisasi yang berjalan secara cepat di Indonesia, maka sebagai implementasi dari upaya pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pada era reformasi disahkan dan dilaksanakan undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999, untuk pelaksanaan otonomi daerah. Esensi berlakunya undang-undang adalah meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Dalam perjalanannya seiring dengan perubahan ranah demokratisasi guna menuju otonomi seluas-luasnya pemerintah bersama-sama DPR telah merevisi UU No 22 Tahun 1999 tersebut menjadi UU No 32 Tahun 2004.

Masalah mendasar yang mengalami perubahan dalam undang-undang hasil revisi adalah terletak pada hubungan pemerintah pusat dan provinsi dengan kabupaten kota secara empirik. Sehingga dengan adanya revisi undang-undang tersebut maka pengaturan mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah makin jelas. Berikut ini adalah skema perbedaan substansial antara tingkat

desentralisasi untuk daerah provinsi dengan tingkat desentralisasi untuk daerah kabupaten dan kota.

Gambar 2.1.

Skema Otonomi Daerah di Indonesia



Keterangan

S : Desentralisasi

K : Dekonsentrasi

P : Tugas pembantuan

Sumber : Kuncoro (2004)

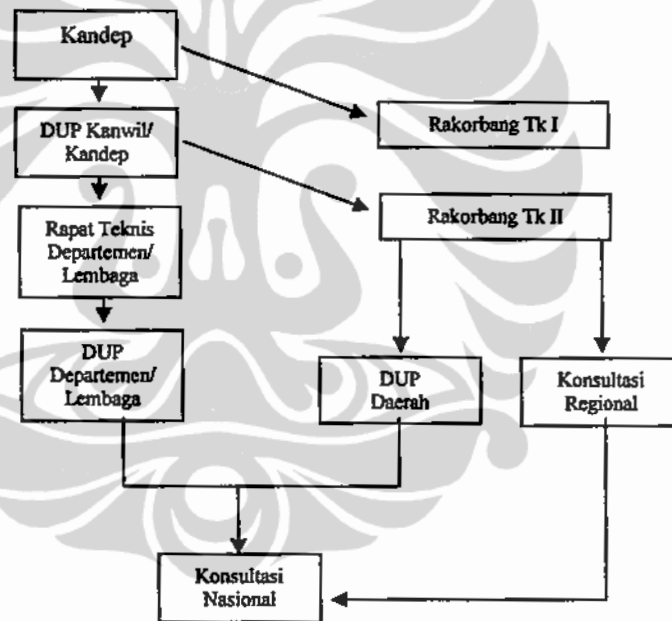
Gambar II.1. merupakan skema dari implementasi UU no.22/1999, guna memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pada pemerintah provinsi.

Dari sisi perencanaan, berlakunya kebijakan otonomi daerah telah mengalami perubahan. Sejalan dengan amanat GBHN 1999-2004, sebagai jalan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang semakin kompleks, perencanaan pembangunan nasional berjalan melalui proses dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan yang komprehensif, partisipatif, terpadu, dan berkesinambungan, dijiwai semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Secara vertikal, koordinasi perencanaan pembangunan dimulai dari forum Rakorbang (rapat koordinasi pembangunan) kabupaten/kota, rakorbang provinsi, konregbang wilayah, hingga forum konsultasi nasional nasional pembangunan (konnasbang) atau rakorbang nasional. Sementara itu, untuk mempersiapkan penyelenggaraan rakorbang nasional, diseluruh instansi sektoral tingkat pusat diperlukan suatu koordinasi perencanaan pembangunan secara horizontal untuk menyamakan

persepsi dan langkah-langkah kegiatan dalam mewujudkan tujuan nasional yang selama ini belum tercapai.

Hal yang sama sekali baru dalam era otonomi daerah adalah diselenggarakannya rapat koordinasi perencanaan pembangunan pusat (rakorbangpus) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan program-program pokok pembangunan nasional lintas sektoral sebagai upaya mewujudkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam rencana pembangunan tahunan. Hirarki dari perencanaan pembangunan dapat di lihat pada gambar ;

Gambar 2.2.
Skema Kegiatan Perencanaan Pembangunan Otonomi



Sumber : Nugroho & Dahuri (2004)

Otonomi daerah bisa dipahami dengan berbagai macam pendekatan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Namun persoalan yang lebih penting apakah sumber daya manusia di daerah sudah siap untuk memainkan peran penting dalam pembangunan daerah. Sudah siapkah sumber daya manusia terdidik (*well educated*) di daerah untuk menghadapi kompetisi di era globalisasi seperti sekarang ini.

Kata kunci untuk memahami peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan. Pendidikan bisa dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan manusia lebih beradab, terampil, cerdas, *problem solver*, *decision maker*, inovatif. Tanpa pendidikan yang memadai, mustahil pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar, sebab "*man behind the gun*" menjadi faktor utama. Pendidikan sendiri merupakan sebuah proses panjang yang menuntut persiapan sedini mungkin.

Manusia adalah *Homo Educandum*, makhluk yang dapat dididik untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sulit dibayangkan kemajuan suatu bangsa tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas intelektual. Kemajuan suatu bangsa bahkan sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir yang diasah dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terlebih di era teknologi informasi seperti sekarang ini, mereka yang paling cepat mengakses dan memanfaatkan informasi berada pada garda terdepan masyarakat unggul yang kompetitif. Teknologi sebagai *applied science* misalnya, memperlihatkan tingkat persaingan yang luar biasa antarabangsa, antardaerah, dan antarpersonal.

Pendidikan dini seharusnya ditanamkan sejak awal di dalam keluarga (pendidikan informal). Di sanalah rasa ingin tahu (*curiosity*), suasana dialogis, mental ingin maju, semangat bersaing, perlu ditanamkan. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam menciptakan suasana kondusif bagi upaya peningkatan kualitas diri mereka sendiri. Dalam lingkup daerah (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi), pemerintah daerah perlu menciptakan suasana kondusif untuk kemajuan warganya. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi antara lain:

Pertama, menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai untuk anak didik sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sebab kunci keberhasilan di perguruan tinggi ditentukan oleh modal awal di sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas.

Kedua, menyiapkan anggaran dana pendidikan yang cukup melalui APBD ataupun melibatkan perusahaan untuk ambil bagian dalam mendukung pendidikan.

Ketiga, memantau dan mengevaluasi pendidikan di sekolah-sekolah, sehingga apabila ada kendala dan kemerosotan mutu pendidikan dapat diantisipasi

secepatnya dan menemukan faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di daerah.

Keempat, mencari dan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang terkait dengan bidang pendidikan secara optimal.

Kelima, memberi kesempatan kepada para tenaga pendidik (guru-guru) untuk meningkatkan kualitasnya melalui studi lanjut. Pendidik yang profesional akan menghasilkan anak didik yang berkualitas.

Keenam, pemberian bea siswa kepada anak didik yang berprestasi dan mereka yang tidak mampu secara finansial.

Ketujuh, menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di luar daerah, sehingga putera-putera daerah bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih baik.

Kedelapan, memberi kesempatan kepada putera daerah yang lulus untuk kembali dan membangun daerah melalui penciptaan lapangan kerja.

Kesembilan, memberi kesempatan kepada para pegawai di daerah untuk studi lanjut atau peningkatan profesionalitas dan keterampilan melalui pelatihan. Langkah-langkah tersebut di atas perlu direncanakan secara matang, sehingga ada skala prioritas yang jelas dan terbagi ke dalam program jangka panjang, menengah, dan pendek.

2.3. Kerangka Pikir Teoritis Kualitas SDM

Manusia (penduduk) merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Kebijakan pembangunan diarahkan kepada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa.

Perencanaan pembangunan kependudukan bersifat kuantitatif, maka diperlukan data kuantitatif kependudukan yang dapat mendukung perencanaan tersebut. Cara yang lazim untuk mengenali data kuantitatif kependudukan antara lain adalah dengan menetapkan indikator yang diperlukan untuk mengukur keadaan (kondisi) dan perkembangan kehidupan penduduk.

Pada tahun 1961 Schultz menulis artikel di *American Economic Review* yang berjudul "*Investment in Human Capital*." Dalam artikel ini Schultz memperkenalkan teori tentang *human capital*. Schultz berpendapat bahwa

pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) adalah bentuk dari *capital* dan merupakan produk atau hasil dari investasi yang dilakukan (*deliberate investment*). Salah satu hal penting dari teori Schultz adalah persoalan menempatkan tanggung jawab pada individu untuk menjadikan dirinya *educated*, “memperoleh pekerjaan,” dan mengubah dirinya menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Berkenaan dengan teori Schultz, peraih nobel untuk ekonomi, Becker memperluas pemikirannya tentang alokasi waktu untuk keluarga, bahkan membahas tentang implikasi pendekatan ekonomi dalam menerangkan keputusan satu keluarga untuk memiliki anak dan mendidik mereka, di samping keputusan untuk menikah dan bercerai. Pembicaraan tentang *human capital* selalu diwarnai dengan pengaruh keluarga tentang pengetahuan, keahlian, nilai-nilai, dan kebiasaan dari anak-anak.

Teori *human capital* sesungguhnya sangat relevan untuk kondisi negara seperti Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya. Teori *human capital* hanya menekankan tanggung jawab pada individu dan mengabaikan faktor-faktor sosial politik yang justru sangat menentukan apakah seseorang individu memiliki kesempatan untuk memasuki lembaga pendidikan lebih baik. Artinya pendidikan diserahkan ke pasar sehingga berimplikasi bahwa mereka yang secara ekonomi tertinggal sudah dipastikan akan sulit memperoleh pendidikan yang bermutu.

Terbelenggunya masyarakat untuk melakukan investasi *human capital* melatarbelakangi munculnya konsep *human development* di awal tahun 1990-an. Munculnya kesadaran bahwa tanggung jawab peningkatan sumber daya manusia pada akhirnya tidak mungkin sepenuhnya dibebankan pada individu, tetapi pada masyarakat dan negara.

Mahbub ul haq dalam Tirtosudarmo (2007) mengemukakan ; “*Human development* adalah sebuah lingkungan tempat orang atau penduduk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara penuh, menjadikan hidup mereka produktif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya”. Kemampuan yang mendasar dari “pembangunan manusia” adalah panjang umur

dan sehat, sesuatu yang menjadikannya sumber-sumber yang dibutuhkan untuk hidup layak sehingga mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Penduduk sebagai objek dan subjek pembangunan dipandang sebagai petunjuk tentang perkembangan dalam proses pembangunan (Suparman, Arbi Sanit, Rozy Munir, 1988) dalam Djalal (1993). Pendekatan semacam ini pernah dilakukan antara lain oleh Hilhorst (1947) dan UNRISD (1985) dalam Djalal (1993). Disamping dengan menambah volume investasi di bidang kesehatan, gizi, kesegaran jasmani, pendidikan dan bidang lainnya.

Dalam banyak literatur antara lain ditentukan adanya dua kelompok peneliti yang mengembangkan pengukuran kualitas fisik melalui kualitas hidup (*quality of life*) menurut pendekatan yang berbeda. Kelompok pertama mengukur kualitas hidup secara objektif, yaitu dengan menggunakan pengukuran kuantitatif baik secara individu maupun kelompok (*agregat*). Hal ini didukung oleh Morris dengan konsep 'PQLI' (*Physical Quality of Life Indeks*) yang banyak digunakan pada banyak hal. Konsep ini mengajukan indikator angka kematian bayi (IMR), angka melek huruf dan angka harapan hidup sebagai indeks komposit.

Selain itu juga ada Drewnowski yang mengajukan konsep 'taraf hidup' (*level of living*) dan Ellis tentang 'tingkat kesejahteraan' (*state of welfare*). Drewnowski 1974 (dalam djalal, 1993), mengembangkan konsep pemikiran dan metode pengukuran "*quality of life*" yang dikemukakan dalam bukunya "*On Measuring and Planning the quality of life*", konsep ini mengajukan dua table hitungan indeks yaitu '*Level of Living Indeks*' dan '*State of Welfare Indeks*'.

Selain konsep di atas, Herbison dan Myers (1964) berpendapat bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti juga perlu adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan (*skill*) dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat. Hal itu juga diperkuat dengan pendapat Ananta dan Hatmadji (1985) yang juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang amat sering dihubungkan dengan investasi dalam modal manusia (*human capital*). Pendidikan dikatakan sebagai investasi karena pada hakekatnya adalah pengorbanan di masa kini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Pendidikan harus melibatkan suatu bagian waktu, yang tentu saja mengurangi kesempatan untuk menghasilkan

yang lain. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau pendidikan harus menjadi sasaran utama dalam pembangunan.

Selain pendapat mengenai pendidikan merupakan modal pembangunan SDM, Tjiptoherijanto (1993) mengungkapkan pengaruh derajat kesehatan terhadap pendidikan. Menurutnya derajat kesehatan yang baik memungkinkan orang menerima pendidikan yang baik pula. Dengan demikian dalam pengelolaan kesehatan, seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Semisal menyusui dan umur kawin pertama. Variabel ini digunakan karena menurut Berg (1986), Air Susu Ibu (ASI) memenuhi kebutuhan metabolisme bayi, berperan dalam pertumbuhan bayi dan melindungi bayi dari malaria dan infeksi yang disebabkan oleh kuman dan virus. Sehingga menyusui dianggap berperan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang sehat. Peran pengetahuan ibu dalam pentingnya menyusui merupakan modal dari pembangunan SDM, yang tentunya berasal dari pendidikan maupun pengetahuannya.

Seperti halnya yang telah diungkapkan Tjiptoherijanto (1993), Thabrany (1996) juga mengemukakan bahwa kesehatan mempunyai korelasi yang kuat dengan mutu sumber daya manusia, walaupun di Indonesia hubungan antara kesehatan, kualitas manusia, dan ekonomi mulai gencar mendapat perhatian pada akhir tahun 1980-an.

Lebih lanjut untuk mengupas indikator kualitas SDM, indikator lingkungan juga merupakan hal yang penting diperhatikan seiring perubahan ekosistem yang cukup mengalami perubahan di Indonesia, sehingga kesadaran mempunyai lingkungan yang lebih baik harus terus-menerus diupayakan agar bisa menjadi kebiasaan keseharian masyarakat Indonesia (Ananta dan Hatmadji, 1985). Selama ini perbaikan lingkungan sering dilakukan karena anjuran pemerintah, artinya masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa kesadaran menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu investasi menuju hidup yang lebih baik dan sehat di kemudian hari.

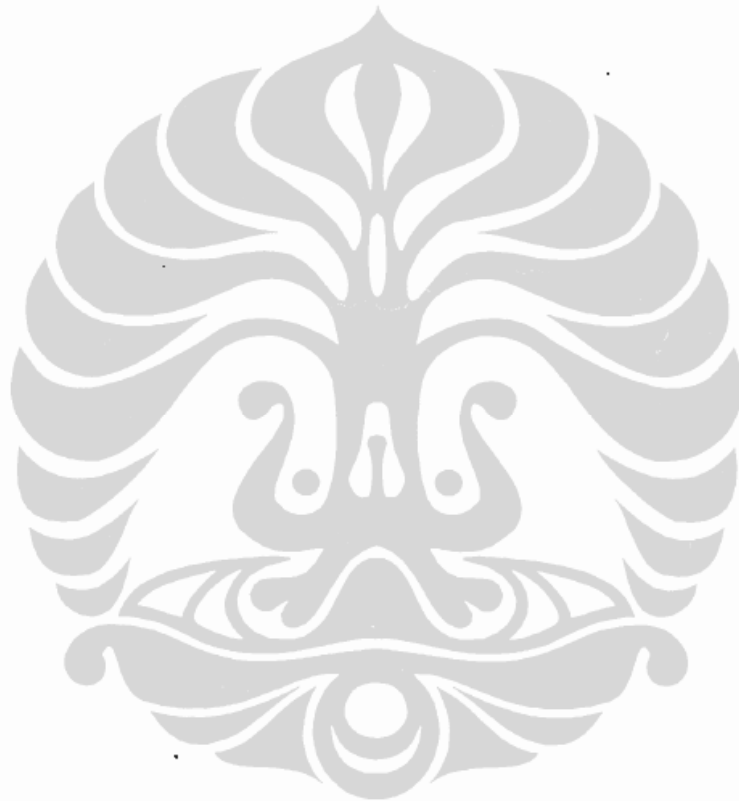
Kesadaran akan lingkungan secara keseluruhan berawal dari kondisi lingkungan rumah tangga. Di antara yang mempengaruhi kesadaran atas lingkungan adalah tingkat pendidikan. Jadi rendahnya kualitas lingkungan bisa

dianggap karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah lingkungan juga masalah yang cukup besar di Indonesia, sehingga kesadaran mempunyai lingkungan yang baik belum menjadi konsumsi (Ananta, 1985). Padahal kesadaran akan lingkungan yang sehat akan menjadi modal tersendiri di dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan ciri suatu penduduk yang beradab. Kesadaran akan lingkungan secara keseluruhan berawal dari kondisi lingkungan kecil yakni kondisi lingkungan rumah tangga. Banyak hal yang mempengaruhi belum munculnya kesadaran tersebut diantaranya tingkat pendidikan, kesadaran kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri yang belum mendukung.

Selain Indikator lingkungan juga tak kalah penting sebagai penopang kualitas SDM adalah program Keluarga Berencana (KB). Semenjak dikukuhkannya Keputusan Presiden (Kepres) No. 103 Tahun 2001 yang mengatakan "kewenangan pengelolaan Keluarga Berencana dilimpahkan kepada pemerintah daerah mulai desember 2003", pemerintah pusat tidak lagi banyak berperan untuk urusan Keluarga Berencana walaupun secara kelembagaan BKKBN masih ada. Sehingga berimplikasi pada kondisi dimana banyak pemerintah daerah yang mengabaikan Kepres tersebut sehingga program KB menjadi "terlantar" (Fathonah, 2007). Secara praktis kurang perhatian pemerintah daerah yang mengabaikan Kepres tersebut menyebabkan banyak penduduk tidak lagi tertangani maupun terlayani urusan be-KB-nya. Sudut pandang itu juga merupakan salah satu hal utama yang perlu ditinjau kondisinya, karena setidaknya KB berpengaruh pada aspek fertilitas, mortalitas dan pertumbuhan penduduk, semisal seputar umur kawin.

Menurut BKKBN (1994), umur kawin idealnya bagi wanita secara psikologis dan kesehatan reproduksi minimal 20 tahun. Jika usia di bawah 20 tahun akan cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan baik pada dirinya sendiri maupun keluarga karena ketidakstabilan emosi dan kurang baiknya kesehatan reproduksi sehingga akan menghambat pembentukan sumber daya manusia yang baik. Indikator Keluarga Berencana tersebut tentunya berperan mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia yang pada dasarnya adalah modal dasar bagi pembangunan.

Seiring dengan pembentukan indikator kualitas SDM yang telah diurai di atas, ada satu lagi yang juga merupakan salah satu penentu kualitas SDM, yaitu indikator aktivitas ekonomi. Menurut Kuncoro (2004), Basis Ekonomi dari setiap komunitas terdiri atas aktivitas-aktivitas yang menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja, basis itu menjadi tumpuan perekonomian. Indikator ini merupakan kriteria pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, hal ini merupakan salah satu aspek dari kualitas SDM.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data basis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1995 dan 2006. Data hasil kedua survei ini diperoleh dari observasi di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan metode sampling dua tahap. Ukuran sampel untuk Susenas 1995 adalah 206.240 rumah tangga, sedangkan ukuran sampel Susenas 2006 sebesar 278.352 rumah tangga (BPS, 1995 dan BPS, 2006).

3.2. Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan beberapa variabel yang dikemukakan para peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang indeks kualitas sumber daya manusia, walaupun pada penelitian untuk tesis kali ini variabel-variabel tersebut tidak semuanya digunakan. Tetapi paling tidak, ada sejumlah indikator kualitas sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau bahan perbandingan. Dalam penelitian kali ini indikator yang dipakai merupakan gabungan dari variabel-variabel yang telah dikemukakan oleh beberapa sumber seperti Fadjri (2001), Agung dkk (dalam Agung, 1998), Rusli dkk (1995), LIPI (1992), serta Ananta dan Hatmadji (1985). Berikut adalah variabel-variabel dan definisinya yang dipilih dalam penelitian ini tercantum dalam tabel 3.1. :

Tabel 3.1.
Variabel-variabel yang dipilih untuk membentuk faktor

No	Nama Variabel	Indikator	Indeks	
1	Partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun (dik1)	Pendidikan	Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Partisipasi sekolah anak usia 12-15 tahun (dik2)	Pendidikan		
3	Pendidikan minimal SLTP (dik3)	Pendidikan		
4	Kemampuan membaca dan menulis (dik4)	Pendidikan		
5	Tenaga medis penolong persalinan (kes1)	Kesehatan	Kualitas Kesehatan	
6	Imunisasi (kes2)	Kesehatan		
7	Jumlah anak yang masih hidup (kes3)	Kesehatan		
8	Pemberian ASI (kes4)	Kesehatan		
9	Usia kawin pertama (krt1)	Kualitas rumah tangga	Kualitas Rumah Tangga	
10	Jumlah anak (krt2)	Kualitas rumah tangga		
11	Wanita yang ber KB (krt3)	Kualitas rumah tangga		
12	Status bekerja atau sedang mencari pekerjaan (aek1)	Aktivitas Ekonomi	Kualitas Ekonomi	
13	Pengeluaran bukan makanan (aek2)	Aktivitas ekonomi		
14	Sumber air minum (Ling1)	Lingkungan	Kualitas Lingkungan	
15	Sumber penerangan listrik (Ling2)	Lingkungan		
16	Lantai rumah (Ling3)	Lingkungan		
17	Kepemilikan tangki air (Ling4)	Lingkungan		

2.1. Pembentuk Indikator Pendidikan

- a. Variabel (Dik1) adalah angka partisipasi sekolah, didefinisikan sebagai persentase anak berusia 7-12 tahun yang masih sekolah.
- b. Variabel (Dik2) adalah partisipasi sekolah, didefinisikan sebagai persentase penduduk berusia 12-15 tahun yang masih bersekolah.
- c. Variabel (Dik3) adalah persentase penduduk berusia 15-59 tahun yang mempunyai pendidikan minimal SLTP
- d. Variabel (Dik4) adalah persentase penduduk dewasa berusia minimal 40 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin

2.2. Pembentuk Indikator Kesehatan

- a. Variabel (Kes1) adalah persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan)
- b. Variabel (Kes2) adalah persentase bayi berusia kurang dari satu tahun yang mendapat imunisasi
- c. Variabel (Kes3) adalah persentase anak yang masih hidup
- d. Variabel (Kes4) adalah persentase banyaknya bayi/anak berusia di bawah 2 tahun yang memperoleh ASI minimal empat bulan

2.3. Pembentuk Indikator Kualitas Rumah Tangga

- a. Variabel (krt1) adalah persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang umur kawin pertamanya 20 tahun ke atas
- b. Variabel (krt2) adalah persentase rumah tangga yang jumlah anaknya di bawah tiga
- c. Variabel (krt3) adalah persentase wanita yang ber KB

2.4. Pembentuk Indikator Aktivitas Ekonomi

- a. Variabel Aek1 (Aktivitas Ekonomi 1) adalah persentase penduduk berusia 15-61 tahun yang berstatus bekerja atau sedang mencari pekerjaan
- b. Variabel Aek2 (Aktivitas Ekonomi 2) adalah persentase rata-rata pengeluaran bukan makanan selama satu bulan terhadap pengeluaran total.

2.5. Pembentuk Indikator Lingkungan

- a. Variabel Ling1 (Lingkungan 1) adalah persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang memenuhi syarat kesehatan
- b. Variabel Ling2 (Lingkungan 2) adalah persentase rumah tangga yang sumber penerangannya listrik
- c. Variabel Ling3 (Lingkungan 3) adalah persentase rumah tangga yang lantainya tidak dari tanah
- d. Variabel Ling4 (Lingkungan 4) adalah persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan air besar pada tangki dan milik sendiri

3.3. Kerangka Pikir Analisis

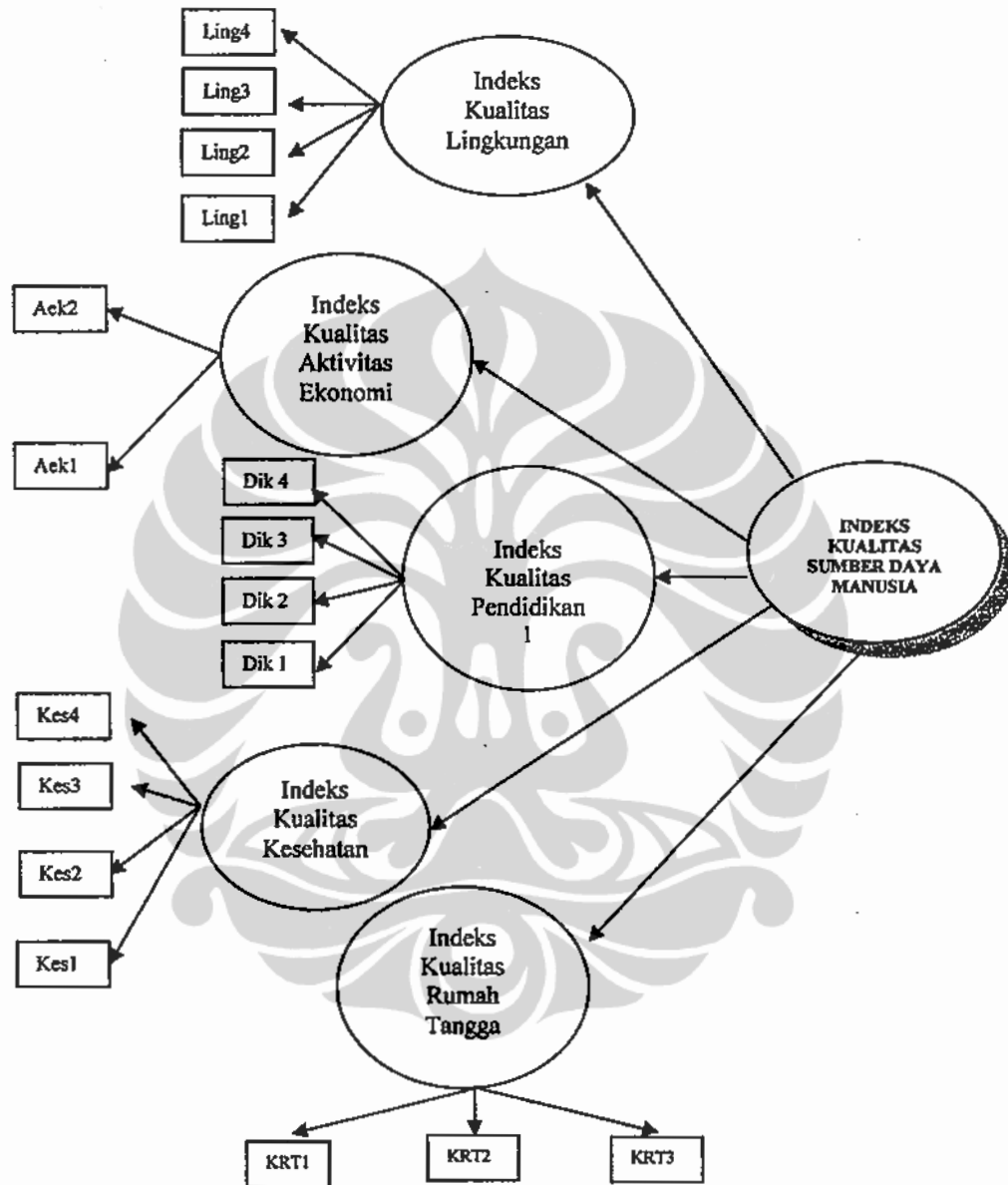
Penentuan indikator memerlukan *judgement* yang baik, dimana perlu diperhatikan mengenai validitas, ketersediaan data, sederhana, dan bisa diterima oleh semua orang. Agung dkk (Agung, 1998) mengemukakan kriteria dalam memilih indikator atau variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Sederhana (*simple*), mudah diperoleh dan mudah diinterpretasikan oleh orang awam,
- b. Dapat diamati (*observable*) sampai ke tingkat wilayah terkecil (kabupaten, kecamatan, desa atau kelompok masyarakat tertentu),
- c. Dapat diukur (*Measurable*) secara kuantitatif sampai ke tingkat wilayah terkecil.

Perkembangan pengukuran PQLI, HDI, maupun IPM dari waktu ke waktu selalu dirasakan memiliki kelemahan. Seperti : (a) Berkaitan dengan nilai harapan hidup dan kematian bayi yang datanya tidak dapat diobservasi secara langsung, (b) Perhitungannya menggunakan metode tidak langsung (c) Sulit diterapkan pada skala daerah yang lebih kecil dari provinsi seperti kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang memiliki ketersediaan data terbatas.

Pada penelitian ini, indikator ataupun variabel yang dipakai merupakan gabungan dari variabel-variabel yang telah dikemukakan oleh beberapa sumber seperti Fadri (2001), Agung dkk (dalam Agung, 1998), Rusli dkk (1995), LIPI (1992), serta ananta dan Hatmadji (1985), kemudian ditambah ukuran-ukuran di atas merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk skema berikut :

Gambar 3.1.
Skema Alur Pikir Pembentukan Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia



Ada lima kelompok indikator tunggal yang terbentuk yakni indikator pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, lingkungan dan aktivitas ekonomi. Indikator pendidikan dan kesehatan merupakan komponen yang paling penting dalam kualitas sumber daya manusia. Indikator ini selalu dipakai oleh para peneliti dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, hanya saja penjabaran variabel-variabelnya yang berbeda-beda. Menurut LIPI (1992), indikator pendidikan dan kesehatan termasuk dalam indikator inti selain juga indikator sektoral. Menurut Ananta dan Hatmadji (1985) indikator pendidikan merupakan investasi dalam *human capital*.

4. Metode Analisis

4.1. Analisis Faktor

Ada dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, pertama adalah analisis faktor dan kedua adalah indeks komposit. Analisis data dengan analisis faktor (*faktor analysis*) memanfaatkan program *SPSS for Windows Version 12*. Analisis faktor adalah salah satu metode statistika yang bertujuan untuk menyederhanakan atau memperkecil dimensi suatu variabel yang berdimensi banyak menjadi sebuah faktor atau lebih berdasarkan pembatasan tertentu (Agung, 1999), yaitu faktor-faktor yang paling dominan dari variabel-variabel yang diukur. Variabel asal yang diperhatikan dinyatakan sebagai faktor terukur. Sedangkan faktor yang diperoleh berdasarkan analisis dinyatakan sebagai variabel tak terukur.

Analisis faktor pada prinsipnya digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses untuk meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan menamakanya sebagai faktor.

Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang dapat menjelaskan keterkaitan variabel asli dan mampu menerangkan keragaman data secara maksimum, dimana antar faktor saling bebas dan setiap faktor dapat diartikan secara jelas (Afifi dan Clark, 1984). Untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor tersebut digunakan analisis komponen utama (AKU). Alasan penggunaan analisis komponen utama adalah karena prosedurnya lebih mudah dan lebih sering digunakan, serta tidak perlu dilakukan uji kenormalan variabel-variabel yang digunakan (Johnson

dan Wichern, 1988). Menurut Kaiser (1958), syarat untuk dapat melakukan analisis faktor adalah data dari variabel-variabel yang dianalisis harus memiliki nilai statistik **Kaiser Mayer Olkin (KMO)** minimal sebesar 0,5. Kriteria.

Dalam analisis faktor juga akan ditemukan prosedur matriks korelasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel asal. Tingginya korelasi antar variabel tercermin dalam determinan matriks korelasi. Untuk melihat apakah matriks korelasi dapat dikategorikan sebagai matriks identitas atau bukan maka digunakan uji Bartlett's dengan hipotesis:

$$H_0 : (1 \ 0 \ | \ 0 \ 1)$$

$$H_1 : \text{bukan } H_0$$

Jika nilai probabilitas statistic $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Maka matriks korelasi bukan matriks identitas sehingga analisis faktor dapat diteruskan.

Kemudian perlu ditentukan jumlah faktor yang sebaiknya dipakai. Hal ini ditentukan oleh besarnya persentase kumulatif dari variasi total yang dapat dijelaskan oleh himpunan faktor yang bersangkutan. Semakin banyak faktor yang dipakai akan sejalan dengan meningkatnya persentase kumulatifnya. Akan tetapi belum ada ketentuan tentang persentase kumulatif minimal yang dapat dinyatakan baik yang bisa dipakai.

Jika dipakai pembatasan nilai *eigen* minimal sama dengan satu, dan telah memberikan persentase kumulatif yang dipandang cukup, maka himpunan faktor tersebut dapat dipakai untuk melakukan analisis lanjutan.

Dalam analisis faktor ada langkah-langkah analisis yang dinamakan rotasi faktor. Rotasi faktor merupakan lanjutan dari ekstraksi faktor, struktur hasil ekstraksi faktor ini seringkali masih sulit didefinisikan karena faktor-faktor ini dapat memuat variabel-variabel yang sama untuk beberapa faktor, sehingga interpretasi terhadap variabel variabel tersebut belum dapat dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan rotasi faktor yang bertujuan untuk mendapatkan struktur faktor yang lebih sederhana sehingga mudah diinterpretasikan.

Interpretasi faktor dilakukan dengan melihat variabel-variabel yang mendominasi dari setiap faktor. Untuk dapat mengetahui variabel-variabel mana yang mendominasi pada setiap faktor ditentukan dengan melihat besarnya nilai *loading*. Nilai *loading* disini menunjukkan korelasi antara variabel awal dengan faktor. Suatu variabel akan mendominasi suatu faktor, jika variabel tersebut mempunyai nilai *loading* paling besar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya.

Dalam kasus-kasus penelitian, ada yang melakukannya dengan dua tahap. Tahap pertama yakni membentuk nilai faktor dari kelompok-kelompok variabel tunggal yang ditentukan. Sedangkan analisis faktor tahap kedua, membentuk nilai faktor baru dari hasil analisis faktor tahap pertama. Nilai faktor baru yang terbentuk ini disebut dengan nilai faktor total.

Berdasarkan faktor-faktor yang terbentuk dilakukan analisis lanjutan yang meliputi analisis *ranking* dan indeks dengan menerapkan pengembangan indeks komposit yang dikembangkan oleh Agung dkk dalam Agung (1998) dengan rumus :

$$IA_1 = RND(100+10*FA_1)$$

$$IA_2 = RND(100+10*FA_2)$$

$$IA_3 = RND(100+10*FA_3)$$

$$IA_4 = RND(100+10*FA_4)$$

$$IA_5 = RND(100+10*FA_5)$$

Dimana IA_1 adalah indeks Agung 1, IA_2 adalah indeks agung 2 dan seterusnya mengikuti jumlah faktor yang akan dibentuk. Sedangkan IKSDM adalah Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk menghitung indeks-indeks tersebut dipakai fungsi :

$$FA_1 = A1*ZV_1 + A2*ZV_2 + \dots + A_m ZV_k$$

$$FA_2 = B1*ZV_1 + A2*ZV_2 + \dots + B_m ZV_k$$

$$FA_3 = C1*ZV_1 + C2*ZV_2 + \dots + C_m ZV_k$$

$$FA_4 = D1*ZV_1 + D2*ZV_2 + \dots + D_m ZV_k$$

$$FKSDM = E1*ZV_1 + E2*ZV_2 + \dots + E_m ZV_k$$

FA₁, FA₂, FA₃ dan FKSDM merupakan kombinasi linier dari variable dasar ZV₁, ZV₂,.....,ZV_k. ZV_i menyatakan nilai Z dari variable tunggal V_i untuk i=1,2,....,k yang dihitung dengan rumus : $ZV_i = (V_i - \text{rata-rata } V_i) / \text{Standar deviasi}$. Besarnya koefisien A_i, B_i, C_i, D_i dan E_i dapat diperoleh langsung dari hasil analisis faktor. FKSDM merupakan komposit dari FA₁, FA₂, FA₃, dan FA₄.

4.2. Indeks Komposit

Setelah melakukan analisis faktor dilakukan pembentukan indeks komposit berdasarkan pada faktor kualitas sumber daya manusia (FKSDM) yang terbentuk, kemudian dilakukan pembentukan indeks komposit, dimana selanjutnya disebut sebagai indeks kualitas sumber daya manusia/*The quality of Human resources index* (IKSDM/QHRI), seperti dilakukan oleh agung (1996) dengan rumus:

$$QHRI = RND(K-10 * FHR)$$

K adalah kontanta bilangan bulat yang dipilih sehingga akan dapat memberikan indeks komposit kualitas sumber daya manusia, untuk tingkat provinsi mendapat skor 100. RND menyatakan fungsi bernilai numerik dengan pembulatan ke bilangan bulat terdekat.

Indeks kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan akan menunjukkan skor yang semakin besar seiring dengan yang dihasilkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian indeks kualitas sumber daya manusia dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbedaan kualitas sumber daya manusia antar provinsi, baik di jawa maupun di luar jawa pada era otonomi daerah maupun sebelum otonomi daerah.

Adapun setelah terbentuk indeks, kemudian dibuat skor/klasifikasi indikator (Klass) dibuat dengan ketentuan :

- a. Jika (nilai faktor ≥ 1.50), maka skor = "sangat baik"
- b. Jika ($0.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < 1.50), maka skor = "baik"
- c. Jika ($-0.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < 0.5), maka skor = "cukup"
- d. Jika ($-1.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < -0.50), maka skor = "kurang"

e. Jika (nilai faktor ≤ -1.50), maka skor = "sangat kurang"

5. Sistem Informasi Geografis (GIS)

Geographic Information System (GIS) atau Sistem Informasi Geografis (SIG), merupakan suatu sistem (berbasis komputer) yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis (Eddy Prahasta, 2007).

Sistem Informasi Geografis dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dimana lokasi geografisnya merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan demikian, Sistem Informasi Geografis merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis, yaitu (a) Masukan, (b) keluaran, (c), manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (d) analisis dan manipulasi data.

Penelitian untuk tesis ini digunakan alat bantu program aplikasi Sistem Informasi Geografis dengan perangkat lunak *SIG ArcView*. Perangkat *ArcView* merupakan salah satu perangkat lunak desktop Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan oleh *Environmental Systems Research Institute(ESRI)*. Dengan *ArcView*, pengguna dapat memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan visualisasi, meng-explore basis data spasial maupun non spasial serta menganalisis data secara geografis.

Menurut Eddy Prahasta (2007), *ArcView* dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pertukaran data: membaca dan menuliskan data dari dan ke dalam format perangkat lunak SIG lainnya,
- b. Melakukan analisis statistik dan operasi-operasi matematik,
- c. Menampilkan informasi (basis data) spasial maupun atribut,
- d. Menjawab *query* spasial maupun atribut,
- e. Melakukan fungsi-fungsi dasar SIG,
- f. Membuat peta tematik,
- g. Meng-customize aplikasi dengan menggunakan data skrip,

- h. Melakukan fungsi-fungsi SIG khusus lainnya (menggunakan extension yang ditujukan untuk mendukung penggunaan perangkat lunak SIG ArcView).



**BAB IV
PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Kelompok Indikator Tunggal

4.1.1. Kualitas Pendidikan Tahun 1995 dan 2006

Secara umum, kondisi kualitas pendidikan berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS 1995 dan 2006 di tiap-tiap provinsi dapat dilihat pada table 4.1.

Berikut ini :

**Tabel 4.1.
Angka Indikator Kualitas Pendidikan**

No	Provinsi	1995				2006			
		dik1	dik2	dik3	dik4	dik1	dik2	dik3	dik4
1	NAD	93.9	56.92	43.78	76.82	98.88	82.92	60.77	62.79
2	Sumut	95.97	72.02	46.3	86.09	98.19	77.82	65.8	84.67
3	Sumbar	95.39	69.82	44.41	83.44	97.71	76.89	60.61	72.6
4	Riau	95.41	61.49	40.76	83.25	97.68	77.12	58.22	76.22
5	Jambi	93.74	53.37	34.48	77.46	97.2	67.87	51.85	68.74
6	Sumsel	92.55	52.1	31.51	78.91	96.84	67.55	50.38	84.23
7	Bengkulu	93.88	63.89	41.34	78.67	98.1	71.67	55.58	82.75
8	Lampung	94.38	60.39	30.85	74.53	97.77	67.09	49.46	73.34
9	Babel	-	-	-	-	96.26	60.53	44.41	65.41
10	Kepri	-	-	-	-	97.78	76.76	64.83	60.89
11	DKI	97.89	78.5	66.35	90.59	98.46	73.7	77.86	76.63
12	Jabar	93.08	52.78	32.62	74.17	97.64	62.67	50.6	65.16
13	Jateng	96.5	60.29	30.33	60.48	98.47	67.86	48.94	62.5
14	Yogya	98.55	82.12	55.19	58.3	89.35	80.64	72.17	47.47
15	Jatim	95.64	60.94	32.22	55.28	98.22	71.68	51.21	60.4
16	Banten	-	-	-	-	97.36	64.2	54.04	66.25
17	Bali	96.61	67.4	43.55	56.29	98.27	74.97	61.53	50.41
18	NTB	90.22	48.34	27.32	42.37	96.75	70.33	44.76	47.97
19	NTT	86.79	50.09	24.18	56.09	94	62.5	36.06	73.9
20	Timtim	73.09	56.99	22.9	16.09	-	-	-	-
21	Kalbar	86.14	55.51	24.6	58.13	96.53	65.82	43.62	68.12
22	Kalteng	96.49	63.2	38.09	85.87	98.33	69.92	52.56	85.76
23	Kalsel	93.64	53.32	33.05	77.22	96.36	63.35	48.63	65.62
24	Kaltim	95.72	67.32	47.22	78.78	97.51	77.18	63.54	68.33
25	Sulut	92.92	55.19	45.71	94.07	97.37	71.96	65.84	95.83
26	Sulteng	93.04	49.79	36.91	77.52	97.12	64.87	49.88	69.75
27	Sulsel	88.64	53.43	38.62	58.88	95.08	64.93	52.49	59.08
28	Sultra	91.5	61.14	39.54	63.06	97.04	71.22	55.6	66.97
29	Gorontalo	-	-	-	-	93.39	63.3	36.43	65.93
30	Sulbar	-	-	-	-	94.02	58.87	38.13	62.18
31	Maluku	94.9	65.74	40.66	85.59	97.55	80.54	58.87	82.8
32	Malut	-	-	-	-	97.35	75.46	50.99	75.78
33	Irian Jaya	81.45	65.41	30.03	55.59	90.94	73.04	45.52	76.34
34	Papua	-	-	-	-	80.38	65.79	37.95	57.84
	Indonesia	93.94	59.88	36.36	67.54	97.39	69.05	53.46	66.28

Keterangan Tabel 4.1.:

dik1 = persentase anak pada usia 7-12 tahun yang masih sekolah

dik2 = Persentase penduduk usia 12-15 tahun yang masih sekolah

dik3 = Persentase penduduk usia 15-59 yang berpendidikan minimal SLTP

dik4 = persentase penduduk dewasa usia minimal 40 tahun yang melek huruf

4.1.1.1. Dik1 (Partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Awal pencanangan program ini adalah pada Repelita IV pemerintah orde baru dengan wajib belajar enam tahun. Pelaksanaan program wajib belajar tersebut berhasil meningkatkan partisipasi anak dalam dalam tercapainya pendidikan dasar. Kemudian pada perjalannya sampai Repelita VI, pemerintah orde baru memperluas jangkauan wajib belajar menjadi sembilan tahun.

Bergantinya pemerintah orde baru menjadi orde reformasi menciptakan kran demokratisasi yang kemudian berujung pada perubahan tatanan pemerintahan. Orde reformasi menciptakan tatanan pemerintahan yang bernama otonomi daerah, harapannya dengan otonomi daerah bisa merubah kualitas hidup masyarakat di masing-masing daerah. Menurut data yang teruat pada tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa di tahun 2006, untuk tingkat nasional jumlah anak berusia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam bersekolah adalah sebesar 97,39 persen atau meningkat dibanding kondisi tahun 1995 yang menunjukkan angka 93,94 persen. Sedangkan pada tingkat provinsi pada tahun 2006 maupun 1995 tingkat partisipasi dalam bersekolah masih konsisten diraih oleh provinsi daerah istimewa Yogyakarta yakni sebesar 99,35 persen di tahun 2006 dan 98,55 persen untuk tahun 1995.

Kondisi membangun partisipasi pendidikan di Timor Timur pada era sebelum otonomi daerah belum selesai, hal ini ditunjukkan kondisi partisipasi sekolah pada tahun 1995 masih yang tertinggal menurut angka Susenas yaitu sebesar 73,09 persen. Sedangkan setelah Timor Timur memutuskan untuk merdeka, era desentralisasi bergulir terjadi pemekaran wilayah, diantaranya

adalah berdirinya provinsi papua. Namun berdirinya provinsi ini masih belum siap terhadap upaya peningkatan partisipasi bersekolah sehingga kondisi di tahun 2006 menunjukkan prestasi terendah dari 32 provinsi yang ada lainnya. Provinsi ini mempunyai angka persentase sebesar 80,38 persen saja. Hal ini terlihat, bahwa masih banyak kesenjangan pendidikan yang terasa terutama untuk wilayah Indonesia Timur.

4.1.1.2. Dik2 (Partisipasi bersekolah penduduk usia 12-15 tahun)

Tolok ukur peningkatan kualitas pendidikan juga diantaranya partisipasi bersekolah pada usia 12-15 tahun. Upaya pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, merupakan parameter keberhasilan program meningkatkan partisipasi peserta didik di dalam keikutsertaannya pada upaya proses pelaksanaan pendidikan dasar sembilan tahun. Berawal dari kebijakan pemerintah orde baru memperluas jangkauan wajib belajar dari wajib belajar enam tahun menjadi sembilan tahun sekolah, yang kemudian kebijakan ini dilanjutkan secara efektif setelah lahir pemerintah reformasi. Tabel 4.1. menggambarkan agregat pada tingkat nasional tahun 2006 jumlah penduduk berusia 12-15 tahun yang berpendidikan minimal SLTP sebesar 69,05 persen dibanding angka nasional tahun 1995 sebesar 59,88 persen.

Tingkat partisipasi bersekolah pada usia 12-15, pada tingkat provinsi persentase tertinggi tahun 2006 berada di provinsi Nanggroh Aceh Darussalam dengan angka persentase sebesar 82,92 persen tidak jauh berbeda dengan angka persentase tertinggi pada tahun 1995 yang diraih provinsi daerah istimewa Yogyakarta sebesar 82,12 persen. Sedangkan persentase partisipasi terendah tahun 2006 berada di provinsi Sulawesi Barat 58,87 persen dan pada tahun 1995 persentase terendah pada provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 48,34 persen. Di Timur Indonesia, tingkat partisipasi sekolah kondisinya masih rendah.

4.1.1.3. Dik3 (Penduduk Usia 15-59 yang berpendidikan minimal SLTP)

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang ditamatkan. Dari tabel 4.1. diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006, persentase tingkat nasional penduduk usia 15-59 tahun yang berpendidikan minimal SLTP adalah 53 persen, angka ini meningkat lebih baik dibanding angka tahun 1995 yang hanya sebesar 36,36 persen. Pada tahun 2006, di tingkat provinsi persentase tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 77,66 persen dan persentase terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 36,06 persen.

Kondisi tahun 2006 cenderung membaik atau terjadi peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun 1995. Persentase pada tingkat provinsi tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 66,35 persen dan persentase terendah adalah provinsi Timor Timur sebesar 22,9 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak provinsi-provinsi baru hasil pemekaran wilayah administrasi pemerintahan mempunyai tingkat persentase rendah di bawah angka nasional. Survei ini menunjukkan masih banyak penduduk yang belum mengenyam pendidikan SLTP.

Kondisi tersebut merupakan tantangan terbesar pemeritahan orde baru waktu itu. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi pada sektor pendidikan diantaranya tidak meratanya fasilitas pendidikan antardaerah terutama daerah Indonesia bagian timur (luar jawa) dalam bahasa lain terjadi segregasi pembangunan antardaerah, kondisi ini berimplikasi pada masih belum efektif penyerapan peserta didik pada tingkat SLTP.

Strata pendidikan minimal SLTP merupakan harapan minimal dari keberlangsungan kualitas pendidikan Indonesia terlebih kondisi ini merupakan harapan dari implementasi kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan kearifan lokal dari pemanfaatan kekayaan lokal yang merupakan potensi lokal, kondisi ini mendorong masing-masing pemerintah daerah untuk mampu mengelola sumber daya manusia lokal agar kesejahteraan terus berkesinambungan. Peningkatan potensi masing-masing provinsi untuk

meningkatkan kualitas pendidikan penduduknya sampai tingkat pendidikan SLTP nampaknya tidak mudah. Masih banyak provinsi-provinsi baru yang masih belum optimal untuk meningkatkan jumlah tamatan SLTP dari persentase jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap provinsi tersebut. Inilah tantangan implementasi kebijakan politik otonomi daerah. Terlebih ketika fakta perbedaan kondisi geografis antara kondisi di pulau Jawa dengan di luar Jawa. Hal ini menuntut secara serius pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa agar terus menerus dengan giat menyiapkan sumber daya manusianya.

4.1.1.4. Dik4 (Kemampuan baca tulis untuk usia minimal 40 tahun)

Ukuran paling fundamental tingkat kualitas pendidikan dari suatu negara adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Tabel 4.1. menggambarkan kondisi Indonesia pada tingkat nasional pada tahun 2006, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia minimal 40 tahun yang melek huruf adalah sebesar 66,28 persen atau lebih kecil dibanding angka tahun 1995 yakni sebesar 67,54. Penurunan jumlah persentase penduduk melek huruf dari waktu adanya otonomi daerah dibanding waktu sebelum otonomi daerah, merupakan hal sangat serius untuk dicermati. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan melek huruf latin masih harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat maupun daerah saat ini.

Persentase angka provinsi pada tahun 2006 tertinggi untuk kemampuan baca tulis usia minimal 40 tahun berada provinsi Sulawesi Utara sebesar 95,83 persen sedangkan angka terendah pada provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 47,97 persen. Kondisi ini juga tidak berbeda dengan tahun 1995, persentase di tingkat provinsi tertinggi masih berada pada provinsi Sulawesi Utara sebesar 94,07 persen dan persentase terendah berada pada provinsi Timor Timur yakni sebesar 16,09 persen.

Fakta jumlah penduduk yang melek huruf, tertinggi berada di luar pulau Jawa. Hal ini patut menjadi bahan evaluasi bahwa kondisi di pulau Jawa juga masih banyak penduduk yang tidak berkemampuan melek huruf. Situasi semacam ini tidak lepas dari peran awal pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan di tingkat dasar yakni proses penyadaran akan pentingnya membaca dan menulis

huruf latin. Kenyataan sampai dengan bergantinya sebuah era yang dinamakan era otonomi daerah, pemerintah daerah di pulau Jawa pun tidak berkegas secara efektif menanggulangi secara masif kondisi tidak berkemampuannya melek huruf penduduk. Sehingga harapan bergulirnya otonomi daerah belum dapat dirasakan secara positif oleh penduduk.



4.1.2. Kualitas Kesehatan Tahun 1995 dan Tahun 2006

Secara umum kondisi kualitas kesehatan di Indonesia dan di masing-masing provinsi berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS 1995 dan 2006 dapat di lihat pada tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.2.
Angka Indikator Kualitas Kesehatan

No	Provinsi	1995				2006			
		kes1	kes2	kes3	kes4	kes1	kes2	kes3	kes4
1	Aceh	49.1	45.2	95.35	85.67	69.79	74.46	96.97	85.63
2	Sumut	75.92	47.54	94.65	84.23	82.7	77.09	96.57	85.68
3	Sumbar	70.57	57.46	90.93	81.92	84.95	85.25	94.57	86.9
4	Riau	58.52	60.72	95.88	85.44	72.11	87.42	97.62	83.77
5	Jambi	43.6	67.11	93.89	84.18	54.32	79.82	96.06	86.61
6	Sumsel	46.5	64.44	93.52	82.16	70.7	86.42	97.36	85.45
7	Bengkulu	50.83	72.41	93.68	85.06	67.51	86.22	96.25	89.71
8	Lampung	40.67	66.5	94.44	82.66	58.38	86.18	95.69	85.14
9	Babel	-	-	-	-	74.08	83.72	96.83	86.31
10	Kepri	-	-	-	-	84.29	88	97.83	87.36
11	DKI	91.6	81.92	97	83.31	96.6	96.17	98	83.12
12	Jabar	37.63	62.29	93.05	82.28	58	86.06	91.3	82.21
13	Jateng	39.91	73.63	93.9	82.43	72.29	91.37	95.9	84.27
14	Yogya	60.28	87.9	95.35	83.54	92.42	98.4	96.77	84.26
15	Jatim	44.16	68.18	92.9	84.28	77.81	89.1	96.02	83.24
16	Banten	-	-	-	-	59.41	84.78	96.31	84.42
17	Bali	84.45	84.7	94.74	83.54	94.16	93.96	96.72	83.33
18	NTB	17.7	71.24	88.7	83.28	46.86	92.34	92.27	80.4
19	NTT	22.86	63.79	92.24	84.69	37.66	81.17	94.77	86.4
20	Timtim	24.16	51.67	91.91	87.2	-	-	-	-
21	Kalbar	32.7	50.95	93.73	84.71	52.49	79.36	96.78	86.02
22	Kalteng	36.56	58.5	96.17	82.57	59.49	84.74	98.1	87.86
23	Kalsel	43.63	55.81	91.62	82.02	60.81	77.99	94.89	84.13
24	Kaltim	58.41	78.53	95.05	83.15	76.99	89.24	94.85	81.9
25	Sulut	58.55	79.68	95.72	85.68	75	93.07	97.9	85.76
26	Sulteng	35.85	67.22	91.2	81.6	47.35	81.51	95.4	86.65
27	Sulsel	43.19	54.8	92.62	83.36	54.08	80.1	95.03	86.79
28	Sultra	24.16	60.07	92.88	82.51	33.36	79.73	95.28	86.62
29	Gorontalo	-	-	-	-	35.87	83.62	95.97	85.99
30	Sulbar	-	-	-	-	21.2	68	94.72	88.05
31	Maluku	31.83	46.89	94.04	84.12	44.36	72.27	97	86.53
32	Malut	-	-	-	-	26.64	75.21	96.18	89.9
33	Irian Jaya	34.88	62.61	95.49	83.54	50.59	82.34	97.99	84.31
34	Papua	-	-	-	-	48.58	76.56	97.5	86.45
	Indonesia	46.1	65.2	93.6	83.3	66.7	86.2	95.2	84.6

Keterangan Tabel 4.2. :

kes1 = persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter/bidan)

kes2 = persentase bayi yang berusia kurang dari satu tahun yang mendapatkan imunisasi

%kes3 = persentase anak yang masih hidup

%kes4 = persentase banyaknya bayi/anak berusia di bawah 2 tahun yang memperoleh ASI minimal 4 bulan

4.1.2.1. Kes1 (Tenaga medis penolong persalinan)

Pilihan tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran merupakan pilihan atas dasar kesadaran maupun nalar positif masyarakat. Upaya penduduk melihat pentingnya mengutamakan kesehatan bagi keberlangsungan peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya dimulai dari dini yakni sejak manusia dilahirkan. Bilamana penanganan kelahiran bayi tidak sehat atau kurang memperhatikan kebersihan dan keselamatan bayi maupun ibunya, maka akan mengakibatkan bayi mudah terserang/terinfeksi penyakit atau bahkan dapat menimbulkan cacat dan berdampak fatal bagi bahkan bisa meninggal, lebih dari itu akan mencelakakan Ibu yang melahirkan.

Tabel 4.2. di atas memberikan bukti bahwa persentase tingkat nasional di tahun 2006, proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis adalah sebesar 61,48 persen, atau lebih dari separo penduduk Indonesia proses persalinannya dibantu oleh tenaga medis. Kondisi tahun 2006 menunjukkan peningkatan pemahaman penduduk Indonesia akan pentingnya peran tenaga medis dalam proses persalinan. Kondisi ini memberbedakan dengan kondisi penduduk Indonesia pada tahun 1995, dimana persentase pada tingkat nasional menunjukkan proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis adalah sebesar 46,13 persen.

Perkembangan kondisi ini sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan kelahiran semakin diperhatikan. Kondisi tahun 2006 ini, juga diikuti pada tingkat provinsi. Persentase tertinggi untuk penanganan kelahiran dengan tenaga medis berada di provinsi DKI Jakarta dengan besaran persentase 96,58 persen atau hampir seluruh persalinan di provinsi ini ditangani

oleh tenaga medis. Kondisi ini juga mirip dengan kondisi tahun 1995, dimana DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan besaran 91,59 persen.

Hal ini menunjukkan semakin baik perhatian masyarakat terhadap masalah penolong persalinan. Pilihan tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran semakin menjadi pilihan, kesadaran akan pentingnya mengutamakan keselamatan persalinan merupakan ikhwal bagi perkembangan kesehatan, sebagai manifes peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Upaya penyelamatan kelahiran bayi kian diperhatikan, terutama aspek kebersihan dan keselamatan bayi maupun ibunya. Upaya menjaga keselamatan kelahiran bayi agar tidak mudah terserang/terinfeksi penyakit atau cacat bahkan bisa meninggal sesegera mungkin ditangani serius oleh masyarakat.

Persentase tahun 1995 untuk angka provinsi terendah berada di provinsi NTB yakni sebesar 17,74 persen, akan tetapi pada tahun 2006 persentase terendah pada kondisi ini berada di provinsi Sulawesi Barat yakni sebesar 21,24 persen.

Fakta ini juga perlu mendapat fokus perhatian dari semua kalangan pengambil kebijakan, bahwa segregasi tentang penanganan kelahiran diluar tenaga medis masih tinggi di luar pulau Jawa. Situasi ini tidak sepenuhnya merupakan kesungkaman masyarakat akan pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga medis, akan tetapi perlu ditinjau tingkat kesedian tenaga medis penolong kelahiran yang terdistribusi di luar pulau Jawa.

4.1.2.2. Kes2 (Bayi berusia kurang dari satu tahun mendapat Imunisasi)

Pandangan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi terlihat dari tahun ke tahun semakin membaik. Semakin banyak penduduk yang memahami pentingnya imunisasi bagi kesehatan bayi. Sosialisasi terhadap pentingnya imunisasi semakin dapat dipahami dan dimengerti para penduduk. Hal ini terlihat dari tabel 4.2, menunjukkan angka persentase nasional tahun 2006 mengenai bayi-bayi yang telah lahir mendapat layanan imunisasi sebesar 86,2 persen meningkat jauh dibanding tahun 1995 yang hanya sebesar 65,2 persen saja.

Situasi ini merupakan implikasi dari semakin baiknya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi bagi anak-anak mereka. Fakta menunjukkan angka

persentase bayi yang memperoleh imunisasi tertinggi pada 2006 adalah bayi-bayi yang berada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta sebesar 98,38 persen, sedangkan persentase terendah berada di provinsi Sulawesi Barat sebesar 68 persen. Fakta ini juga sama ditunjukkan bahwa pada tahun 1995, angka persentase Yogyakarta menepati posisi teratas yakni sebesar 87,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebelum otonomi daerah, pemahaman penduduk provinsi Yogyakarta mengenai imunisasi sudah cukup baik. Kondisi ini berbeda dengan penduduk provinsi Aceh yang baru mempunyai angka persentase untuk bayi yang mendapat imunisasi sebesar 45,2 persen.

Perbedaan kondisi ini setidaknya bisa dipahami ketika penduduk Aceh mengalami kondisi Daerah Operasi Militer (DOM). Setidaknya tingkat ketersediaan obat-obat imunisasi juga menjadi pertanyaan, mungkin di provinsi yang bergejolak konflik distribusi logistik imunisasi bisa berjalan dengan lancar?

4.1.2.3 Kes3 (Anak yang masih hidup)

Pada kondisi kehamilan tidak semuanya ibu mengalami persalinan dengan kondisi anak dilahirkan hidup. Begitu juga kondisi anak setelah dilahirkan, apakah masih bisa bertahan hidup dan berlangsung hidup pada kurun waktu yang panjang. Hal ini banyak faktor yang menyebabkan, khususnya pada masalah kesehatan. Keberlangsungan anak hidup dipengaruhi oleh kesehatan fisiknya baik dalam diri individu anak maupun dari kesehatan lingkungan mereka hidup. Pada dasarnya kualitas sumber daya manusia juga didasari oleh bagaimana kondisi anak setelah anak itu lahir dari kandungan ibunya dan sehat bertahan hidup setelah berhadapan dengan kondisi lingkungan sosialnya.

Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya tergolong cepat. Hal ini nampak dari angka anak yang masih hidup. Di tingkat nasional pada tahun 2006 menunjukkan besaran persentase 95,2 persen, sedangkan pada tahun 1995 sebesar 93,6 persen. Terlihat dari kedua kondisi persentase angka tersebut yang cenderung konsisten dari tahun 2006 dan 1995.

Kondisi tersebut pun konsisten dicerminkannya derivasinya di masing-masing provinsi. Pada tahun 2006, Kalimantan tengah merupakan provinsi yang mempunyai angka tertinggi hal jumlah anak yang masih hidup yakni sebesar 98,1 persen, sedangkan angka terendah berada di provinsi Jawa Barat sebesar 91,3 persen. Adapun untuk tahun 1995 posisi tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar 97 persen dan terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 88,7 persen.

Keberlangsungan hidup anak rendah tercermin dari provinsi Jawa Barat. Hal ini membantahkan bahwa tidak semua kondisi di provinsi yang terletak di pulau Jawa mempunyai kualitas baik.

4.1.2.4. Kes4 (Banyaknya bayi/anak usia di bawah dua tahun yang memperoleh ASI minimal empat bulan)

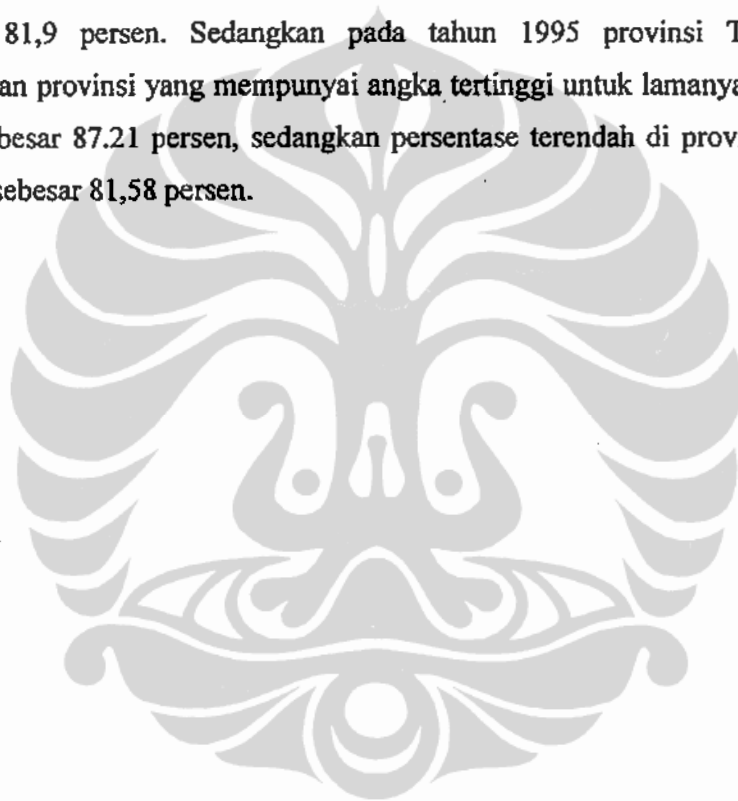
Menyusui dengan air susu ibu mempunyai peranan penting dalam pemenuhan gizi bayi. Keadaan gizi balita selain menggambarkan keadaan balita itu sendiri, juga mencerminkan keadaan gizi penduduk. Peningkatan kesehatan dan status gizi merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena itu menyusui dapat dikatakan merupakan hal yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Lama menyusui yang ideal adalah dua tahun, dimana empat bulan pertama disarankan pemberian ASI secara eksklusif, yakni tanpa disertai makanan pendamping yang lain dan kemudian diteruskan hingga dua tahun. Tabel 4.3 pada tahun 2006, menunjukkan bahwa pada tingkat nasional jumlah anak berumur di bawah lima tahun yang disusui minimal selama empat bulan adalah 84,6 persen, sedangkan pada tahun 1995 sebesar 83,3 persen.

Menurut lembaga anak dunia (UNICEF) yang dilansir Media Indonesia (2006) menyatakan bahwa bahwa pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif disebagian besar daerah Indonesia hanya mencapai 10 persen - 15 persen saja. Pemberian ASI secara eksklusif sangat penting bagi proses tumbuh kembang anak. Pemberian ASI secara eksklusif dapat menurunkan resiko kematian bayi hingga 50 persen, atau lebih besar pengaruhnya dibanding dengan pemberian vaksin atau

vitamin pada bayi. Diungkapkan pula oleh UNICEF di Indonesia hanya 20 persen bayi mulai diberi ASI pada 24 jam pertama setelah melahirkan, sebagian besar bayi hanya diberi ASI secara parsial (tidak eksklusif, dicampur dengan susu formula). Ketidakberhasilan pemberian ASI di Indonesia disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk memberi penyuluhan.

Pada tahun 2006 Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang mempunyai persentase tertinggi untuk lamanya bayi disusui yakni sebesar 90,4 persen. Provinsi yang mempunyai angka terendah adalah Kalimantan Timur yakni sebesar 81,9 persen. Sedangkan pada tahun 1995 provinsi Timor Timur merupakan provinsi yang mempunyai angka tertinggi untuk lamanya bayi disusui yakni sebesar 87,21 persen, sedangkan persentase terendah di provinsi Sulawesi Tengah sebesar 81,58 persen.



4.1.3. Kualitas Rumah Tangga 1995 dan 2006

Secara umum kondisi kualitas rumah tangga di Indonesia dan di masing-masing provinsi berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS 1995 dan 2006 dapat di lihat pada tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.3.

Angka Indikator Kualitas Rumah Tangga

No	Provinsi	1995			2006		
		krt1	kb2	Krt3	krt1	krt2	krt3
1	NAD	23.5	53.81	38.35	35.42	52.1	43.02
2	Sumut	36.65	55.3	44.96	48.81	51.41	45.06
3	Sumbar	27.6	49.38	41.69	41.24	47.28	49.07
4	Riau	32.85	51.82	43.84	37.49	48.9	53.71
5	Jambi	15.75	50.92	58.09	26.2	45.7	61.61
6	Sumsel	23.04	52.47	52.71	31.68	47.34	62.42
7	Bengkulu	24.44	50.79	64.57	28.14	46.46	70.1
8	Lampung	17.5	50.45	60.33	27	45.9	64.47
9	Babel	-	-	-	36.67	46.4	63.44
10	Kepri	-	-	-	53.33	42.11	55.35
11	DKI	37.52	48.62	55.83	50.36	43.7	55.24
12	Jabar	13.1	47.33	57.9	21.7	44.71	62.82
13	Jateng	17.75	45.61	60	28.47	42.05	62.1
14	Yogya	37.84	40.21	65.37	45.45	35.2	61.13
15	Jatim	15.19	39.7	57.63	27.18	37.81	59.51
16	Banten	-	-	-	27.16	48.32	60.33
17	Bali	45.27	41.07	70.7	51.52	38.15	67.43
18	NTB	27.16	48.77	48.33	30.59	45.06	54.82
19	NTT	50.6	47.17	38.99	54.4	47.63	32.61
20	Timtim	39.51	49.83	23.4	-	-	-
21	Kalbar	27.56	50.89	52.9	32.96	47.77	59.49
22	Kalteng	28.15	49.8	65.77	27.88	46.49	66.63
23	Kalsel	15.87	46.67	57.76	25.35	43.26	66.71
24	Kaltim	26.36	46.81	58.19	36.5	44.22	54.67
25	Sulut	42.84	47.08	67.93	49.47	40.67	69.76
26	Sulteng	26.01	46.95	53.05	34.48	44.48	54.69
27	Sulsel	27.18	47.63	39.1	38.25	44.76	42.58
28	Sultra	22.23	51.32	43.76	30.84	49.3	46.8
29	Gorontalo	-	-	-	39.82	44.91	61.24
30	Sulbar	-	-	-	28.49	48.71	39.82
31	Maluku	45.23	50.12	40.04	46.06	48.58	30.12
32	Malukut	-	-	-	34.85	47.63	39.61
33	Irja	33.03	48.95	41.54	45.98	48.79	31.73
34	Papua	-	-	-	31.17	47.56	31.2
	Indonesia	21.9	46.9	55.2	31.6	44.1	57.9

Keterangan Tabel 4.3. :

krt1 = persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang umur kawin pertamanya minimal 20 tahun

krt2 = persentase rumah tangga yang jumlah anak di bawah tiga

krt3 = persentase wanita yang ber KB

4.1.3.1. Krt1 (Umur kawin pertama)

Perkawinan wanita pada usia muda (di bawah usia 20 tahun) akan beresiko menghambat pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama yang menyangkut masalah pendidikan karena mau tidak mau setelah menikah seorang wanita terpaksa harus mengurus suami, anak dan rumah tangga. Selain itu juga dari segi kesehatan reproduksi kurang dianjurkan karena menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi.

Perkawinan wanita pada usia muda (di bawah usia 20 tahun) akan beresiko menghambat pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama yang menyangkut masalah pendidikan karena mau tidak mau setelah menikah seorang wanita terpaksa harus mengurus suami, anak dan rumah tangga. Selain itu juga dari segi kesehatan reproduksi kurang dianjurkan karena menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi.

Fakta lain mengatakan tingginya angka kawin muda di kalangan remaja DKI Jakarta menjadi salah satu penyebab terganggunya kesehatan reproduksi, hal ini di ungkapkan oleh Media Indonesia (2006), yang memuat sebuah penelitian yang dilakukan oleh Setyonaluri pada september 2005 yang mengatakan bahwa sebesar 30,4 persen remaja usia 11-14 tahun telah menikah. Penelitian ini dilakukan melingkupi 44 kecamatan di seluruh DKI Jakarta dengan melibatkan 2.271 responden. Sekitar 27,5 persen remaja putri yang hamil mengalami perlambatan waktu persalianan, sekitar dua sampai tiga jam. Sehingga dari fakta yang tercantum dalam tabel 4.3. di atas menunjukkan kualitas SDM tak lepas dari bagaimana cara pandang masyarakat terhadap usia perkawinan pertama.

Tabel 4.3. Pada tahun 2006 menunjukkan bahwa pada tingkat nasional berstatus kawin yang umur kawin pertamanya di atas 20 tahun adalah sebesar 31,6

persen. Hal ini menunjukkan perbedaan, dengan kondisi tahun 1995 yang hanya mempunyai angka 21,9 persen. Pada tingkat provinsi di tahun 2006, persentase tertinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 54,4 persen dan persentase terendah di provinsi Jawa Barat sebesar 21,7 persen, sedangkan untuk 1995 pada tingkat provinsi persentase tertinggi berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 50,63 persen dan persentase terendah di provinsi Jawa Barat sebesar 13,14 persen.

4.1.3.2. Krt2 (Jumlah anak)

Banyak anak banyak rejeki, semboyan ini sangat mengakar di kalangan masyarakat. Namun ketika realitas yang ada membuktikan semakin banyak anak maka beban ekonomi keluarga semakin bertambah. Setidaknya norma keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia terukur dari keluarga yang memiliki anak relatif sedikit.

Jumlah anak tidak lepas dari kondisi kualitas keluarga. Lonjakan penduduk yang tinggi dan kondisi perekonomian yang tidak menentu maka program KB mau tidak mau harus menjadi prioritas. Pada era sebelum otonomi daerah jargon "Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera" Dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun pada *International Conference on Co-operation and Development* di Cairo, Mesir tahun 1994 keluar pernyataan bahwa hak reproduksi adalah hak azasi, sehingga tidak lazim menyebutkan anak satu atau dua. Hal itu berdampak pada slogan BKKBN mengantinya dengan "Keluarga Berkualitas". Hal ini yang menyebabkan terjadi bias makna yang berakibat pada fokus dari KB adalah perencanaan kelahiran atau pengurangan jumlah penduduk.

Tabel 4.3. di atas, tahun 2006 terlihat bahwa pada tingkat nasional, keluarga yang memiliki jumlah anak maksimal tiga orang adalah sebesar 44,1 persen, angka ini menurun jika dibandingkan dengan angka tahun 1995 sebesar 46,9 persen. Di tingkat provinsi pada tahun 2006 keluarga yang memiliki jumlah anak maksimal tiga orang adalah persentase tertinggi berada di provinsi NAD sebesar 52,1 persen dan persentase terendah di provinsi Yogya 35,23 persen, sedangkan

pada tahun 1995 persentase tertinggi berada di provinsi Sumatra Utara sebesar 55,29 persen dan persentase terendah 39,68 persen.

4.1.3.3. Krt3 (Wanita yang ber KB)

Kampanye tentang keluarga berencana (KB) di Indonesia yang mulai ramai sejak tahun 1970 an, belum secara masif dapat dilaksanakan oleh masyarakat di seluruh provinsi. Pendekatan kampanye tentang keluarga berencana (KB) di Indonesia mungkin sekarang lebih "*soft*" artinya tidak lagi dengan pendekatan memaksa perempuan untuk ikut serta dalam KB.

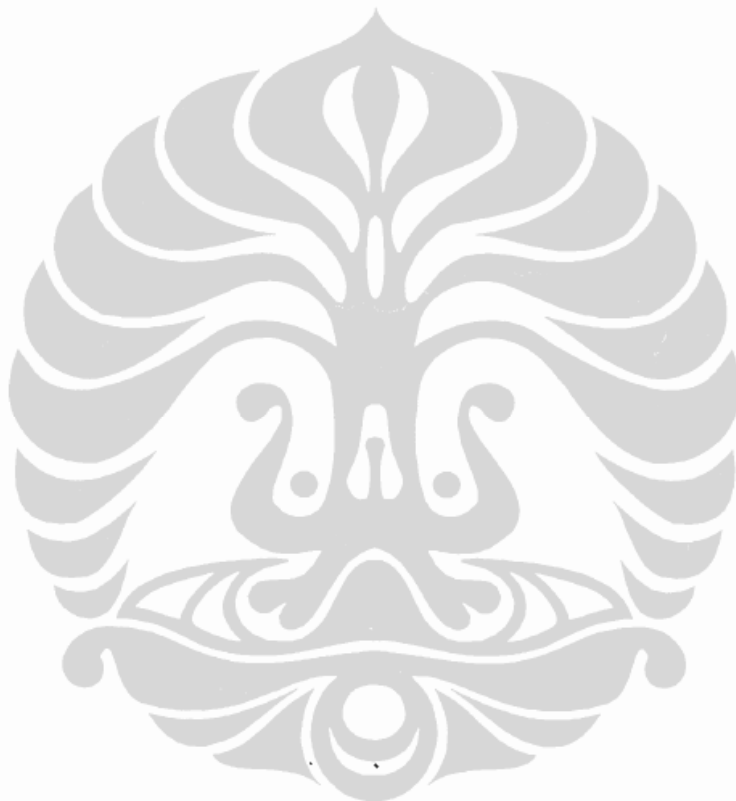
Cara-cara memaksa yang mengikutsertakan aparat negara yang sifatnya represif tidak lagi dilakukan. Namun pendekatannya lebih pada tingkatan partisipatif warga masyarakat melalui peran serta masyarakat di lingkungan, misalnya dengan melibatkan peran PKK maupun pengurus RT/RW. Satu hal penting yang disosialisasikan program KB adalah pemberian informasi mengenai pengetahuan dasar fungsi organ reproduksi perempuan maupun laki-laki. Pola ini terlihat semakin mendewasakan para apseptor keluarga berencana tersebut.

Dapat dilihat di tabel 4.3. di atas, pada tahun 2006 untuk nasional memperlihatkan angka peningkatan keikutsertaan KB Indonesia. Angka persentase tersebut menunjukkan angka 57,9 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi Indonesia tahun 1995 yang baru menunjukkan angka 55,15 persen saja masyarakat yang melakukan KB.

Fakta pada tabel 4.3. di atas juga menunjukkan bahwa di tahun 1995, baru provinsi Bali yang mampu mencapai angka 70,67 persen, sedangkan provinsi yang terendah adalah Timor Timur 23,38 persen. Sedangkan provinsi yang berada di pulau Jawa rata-rata keikutsertaannya belum mencapai 60 persen. Hal ini sangat jelas peningkatan keikutsertaan keluarga berencana sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM.

Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2006, dimana provinsi Bengkulu yang mampu mencapai angka 70,08 persen, sedangkan provinsi yang terendah adalah Maluku 30,12 persen. Provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa rata-rata keikutsertaannya sudah mencapai 60 persen.

Namun dari hal tersebut di atas, terkait dengan belum optimalnya kenaikan jumlah keikutsertaan KB, tentunya sangat erat kaitannya dengan persoalan implementasi kebijakan pemerintah tentang KB. Perlu menjadi perhatian adalah KB digalakan secara utuh dan menyeluruh, artinya KB tidak lagi menjadi potongan isu pada era otonomi daerah ini, melainkan perlu kerjasama implementasi kebijakan dari pusat sampai daerah, tidak sinkronnya implementasi KB terlihat dari upaya pemerintah selalu parsial dalam membuat program tanpa didukung kebijakan maupun anggaran sehingga jalan sendiri-sendiri.



4.1.4. Kualitas Aktivitas Ekonomi 1995 dan 2006

Secara umum kondisi kualitas aktivitas ekonomi di Indonesia dan di masing-masing provinsi berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS 1995 dan 2006 dapat di lihat pada tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4
Angka Indikator Kualitas Ekonomi

No	Provinsi	1995		2006	
		aek1	aek2	aek1	aek2
1	Aceh	59.75	27.06	59	32.15
2	Sumut	63	30.85	66.11	36.21
3	Sumbar	58.09	30.09	61.43	36
4	Riau	56.1	29.79	57.68	38.07
5	Jambi	59.32	26.63	62.38	35.3
6	Sumsel	63.85	26.7	64.44	35.43
7	Bengkulu	67.7	30.52	64.25	34.54
8	Lampung	61.83	27.2	64.16	37.67
9	Babel	-	-	61.15	37.98
10	Kepri	-	-	62.59	47.1
11	DKI	56.2	47.6	65.76	57.1
12	Jabar	57.09	35.32	59.63	42.76
13	Jateng	63.19	34.55	69.78	41.25
14	Yogya	61.21	43.17	68.01	49.57
15	Jatim	61.27	34.28	66.68	40.65
16	Banten	-	-	60.08	43.61
17	Bali	66.12	36.55	75.7	48.31
18	NTB	61.7	27.1	61.25	35.15
19	NTT	66.15	28.54	68.41	29.6
20	Timtim	62.31	31.33	-	-
21	Kalbar	68.5	22.7	69.37	32.2
22	Kalteng	64.11	25.31	67.81	31.87
23	Kalsel	66.04	28.05	65.44	34.91
24	Kaltim	59.59	37.8	60.49	44.88
25	Sulut	56.7	29.93	59.24	37.71
26	Sulteng	57.17	29.38	61.68	34.82
27	Sulsel	52.1	29.55	56.1	36.58
28	Sultra	53.99	29.13	59.33	34.67
29	Gorontalo	-	-	57.86	33.58
30	Sulbar	-	-	62.1	30.68
31	Maluku	54.27	33.89	56.76	33.75
32	Malut	-	-	61.96	36.08
33	Irian Jaya	66.47	32.96	62.77	36.28
34	Papua	-	-	72.26	37.38
	Indonesia	60.3	33.4	64.2	40.4

Keterangan tabel 4.4 :

ae1 = persentase penduduk usia 15-61 yang berstatus bekerja atau sedang mencari pekerjaan

ae2 = persentase rata-rata pengeluaran bukan makanan selama satu bulan

4.1.4.1. Aek1 (Tingkat partisipasi angkatan bekerja)

Status bekerja maupun tidak bekerja merupakan fokus yang menjadi prioritas bagi pemerintah. Setiap tahun pemerintah berupaya menurunkan angka pengangguran. Hal ini wajar dilakukan pemerintah karena melihat kondisi masyarakat mengenai pengangguran itu sendiri. Di era sebelum otonomi daerah kondisi masyarakat yang berstatus bekerja maupun sedang mencari pekerjaan rata-rata di atas angka 50 persen. Dari tabel 4.4 di atas terlihat bahwa di Indonesia jumlah penduduk berusia 15-61 tahun yang bekerja dan mencari pekerjaan di angka 60,3 persen. Pada era ini, kondisi provinsi yang masyarakatnya berada di kondisi bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang menonjol adalah Kalimantan Barat yakni sebesar 68,5 persen. Sedangkan yang kurang menonjol adalah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 52,1 persen.

Menurut BPS yang dilansir Media Indonesia (2006) persentase angka pengangguran terbuka pada februari 2006 sebesar 10,4 persen atau sebanyak 11,1 juta orang, karena pada saat pencacahan sebagian angkatan kerja bekerja pada sektor informal pertanian yang mengalami panen raya. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja paruh waktu atau kurang dari 35 jam seminggu, per februari 2006 sebanyak 29,9 juta orang, atau 31,4 persen dari total angkatan kerja.

Di era otonomi daerah kondisi masyarakat yang berstatus bekerja maupun sedang mencari pekerjaan rata-rata berada di angka 60 persen. Pada era ini kondisi provinsi yang masyarakatnya berada di kondisi sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang menonjol adalah provinsi Bali yakni sebesar 75,72 persen. Sedangkan yang kurang menonjol adalah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,2 persen. Untuk kondisi Indonesia berada di angka 64,2 persen.

4.1.4.2. Aek2 (Pengeluaran bukan makanan)

Dari tabel 4.4 di atas pada tahun 1995 terlihat bahwa di Indonesia rata-rata pengeluaran bukan makanan rumah tangga per bulan terhadap pengeluaran total adalah sebesar 33,4, akan tetapi Dari tabel di atas pada tahun 2006, terlihat bahwa pada era otonomi daerah di Indonesia, rata-rata pengeluaran bukan makanan rumah tangga per bulan terhadap pengeluaran total adalah sebesar 40,4 persen atau meningkat dibanding tahun 1995. Pada tingkat provinsi di tahun 1995, persentase tertinggi berada provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar 47,6 persen, begitu juga pada tahun 2006. Persentase provinsi terendah tahun 1995 ada di provinsi Kalimantan Barat sebesar 22,7 persen. Adapun persentase provinsi terendah pada tahun 2006 adalah di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 29,6 persen.



4.1.5. Kualitas Lingkungan 1995 dan 2006

Secara umum kondisi kualitas lingkungan di Indonesia dan di masing-masing provinsi berdasarkan hasil pengolahan data SUSENAS 1995 dan 2006 dapat di lihat pada tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5.
Angka Indikator Kualitas Lingkungan

No	Provinsi	1995				2006			
		Ling1	Ling2	Ling3	Ling4	Ling1	Ling2	Ling3	Ling4
1	NAD	24.99	47.61	84.52	15.12	34.15	84.35	84.13	26.84
2	Sumut	41.98	64.78	92.72	10.34	50.57	90.99	93.39	42.4
3	Sumbar	35.01	53.49	97.45	12.27	45.6	83.86	96.11	27.77
4	Riau	17.48	51.11	95.71	10.12	23.89	79.91	93.57	33.08
5	Jambi	23.6	45.78	91.58	9.28	35.57	79.23	92.48	29.3
6	Sumsel	30.94	49.73	86.24	7.23	40.69	77.21	87.97	28.69
7	Bengkulu	22.44	52.9	87.93	12.21	38.03	73.71	89.77	23.73
8	Lampung	19.04	27.03	54.66	16.29	42.82	72.67	75.18	24.29
9	Babel	-	-	-	-	35.48	91.25	96.91	44
10	Kepri	-	-	-	-	60.11	89.84	88.82	35.59
11	DKI	93.8	99	98.8	18.6	77.5	99.9	95.6	63.2
12	Jabar	44.09	76.39	89.03	18.53	43.15	98.26	91.07	36.1
13	Jateng	42.71	73.4	49.15	8.35	55.91	97.93	68.67	35.77
14	Yogya	44.69	81.63	74.46	8.09	59.01	98.57	86.66	39.58
15	Jatim	51.59	71.7	63.42	8.54	57.63	98	76.06	30.44
16	Banten	-	-	-	-	41.58	94.35	86.05	39.41
17	Bali	60.65	87.31	88.75	6.6	72.12	97.66	93.89	46.73
18	NTB	32.94	61.91	72.1	11.7	43.53	82.04	83.03	16.2
19	NTT	32.85	24.32	45	5.18	43.3	38.81	52.08	9.52
20	Timtim	44.46	22.7	34.42	8.48	-	-	-	-
21	Kalbar	11.2	40.47	97.13	2.06	19.4	75.02	96.97	26.42
22	Kalteng	24.76	41.04	97.82	3.06	33.26	69.19	94.84	16.29
23	Kalsel	42.75	60.36	97.05	6.04	54.17	89.46	96.47	21.75
24	Kaltim	50.96	76.56	98.5	2.11	62.43	92.23	95.56	40.03
25	Sulut	47.95	71.11	85.76	12.69	58.44	94.85	90.5	35.88
26	Sulteng	36.14	46.37	83.4	9.88	41.05	69.43	87.49	25.45
27	Suisel	37.91	54.99	95.63	8.99	51.15	85.23	93.76	35.09
28	Sultra	42.23	37.15	79.59	9.02	52.99	65.28	85.68	26.04
29	Gorontalo	-	-	-	-	40.2	66.64	86.24	12.6
30	Sulbar	-	-	-	-	32.55	64.68	91.17	16.42
31	Maluku	41.9	49.61	72.94	7.32	55.14	69.76	76.84	22.91
32	Malut	-	-	-	-	42.53	63.09	73.91	25.43
33	Irian Jaya	26.29	32.32	83.35	5.39	37.55	60.93	80.32	23.66
34	Papua	-	-	-	-	28.47	40	69	16.73
	Indonesia	43.5	66.7	76.5	11.3	49.7	90.6	83.7	33.6

Keterangan Tabel 4.5. :

Ling1 = persentase rumah tangga dengan sumber air minum memenuhi syarat kesehatan

Ling2 = persentase rumah tangga yang sumber penerangannya listrik

Ling3 = persentase rumah tangga dengan rumah lantainya tidak dari tanah

Ling4 = persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan air besar pada tangki jamban milik sendiri

4.1.5.1. Ling1 (Sumber air minum)

Sumber air minum yang bersih dan menyehatkan terus menerus menjadi problem kualitas hidup penduduk. Mulai terganggunya sumber air tidak begitu saja terjadi, hal ini terjadi melalui beberapa tahap sampai akhirnya muncul gejala disfungsi hutan sebagai penampung sumber air alami karena pengrusakan ekologi hutan yang berlarut-larut.

Dampak yang terjadi dari faktor tersebut adalah mulai terganggunya masyarakat terhadap konsumsi air bersih melalui sumber-sumber air minum yang menyehatkan.

Data kualitas lingkungan tahun 1995, menunjukan DKI Jakarta (93,8 persen) masih merupakan provinsi yang masyarakatnya masih memperhatikan sumber air bersih, setidaknya dari sumber air minum melalui pengadaan pompa air bawah tanah yang menjadi sumber tersedianya air untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Barat 11,2 persen, hal ini nampaknya terjadi karena penduduk Kalimantan Barat masih bergantung pada sumber air dari sungai-sungai yang terdapat di daerahnya. Adapun angka seluruh Indonesia masih di bawah 50 persen atau persisnya 43,53 persen.

Sedangkan data kualitas lingkungan pada era otonomi daerah (2006), juga masih diraih DKI Jakarta (77,49 persen). Adapun persentase terendah masih berada di provinsi Kalimantan Barat 19,37 persen, hal ini nampaknya terjadi karena penduduk Kalimantan Barat masih tetap bergantung pada sumber air dari sungai-sungai yang terdapat didaerahnya. Adapun angka persentase seluruh

Indonesia masih di bawah 50 persen atau persisnya 49,69 persen, angkanya meningkat dibanding tahun 1995.

4.1.5.2. Ling2 (Sumber penerangan listrik)

Sumber penerangan listrik menjadi ukuran dalam melihat kualitas sumber daya manusia. Keberadaan rumah-rumah di Indonesia yang mempunyai penerangan listrik sebagai sumber penerangan, dari keseluruhan kondisi Indonesia pada tahun 2006 mempunyai angka 90,62 persen. Adapun Dari keseluruhan kondisi Indonesia pada tahun 1995 baru 66,7 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan listrik di era otonomi daerah maju pesat dibanding kondisi sebelum otonomi daerah cenderung masih belum merata.

Sejak sebelum era otonomi daerah (1995), pasokan listrik masih terpusat di kota-kota yang berada di pulau Jawa, seperti Jakarta. Fakta ini ditunjukkan tabel 4.5, menerangkan bahwa 99 persen penduduk Jakarta mempunyai sumber penerangan dari listrik, berbeda dengan penduduk Timor Timur yang hanya 22,71 persen yang mempunyai sumber penerangan dari listrik.

Demikian juga di tahun 2006, ditunjukkan pada tabel 4.5. bahwa 99,94 persen penduduk Jakarta mempunyai sumber penerangan dari listrik atau hampir semua terfasilitasi penerangan listrik, berbeda dengan penduduk Papua yang hanya 39,99 persen yang mempunyai sumber penerangan dari listrik. Fakta masih terjadi kesenjangan infrastruktur kelistrikan yang menyebabkan tidak meratanya masyarakat menikmati listrik.

4.1.5.3. Ling3 (Lantai dari tanah)

Kondisi tempat tinggal yang menggunakan lantai dari tanah kondisinya sudah berkurang. Banyak keluarga yang sudah menggunakan lantai non tanah. Kondisi Indonesia pada tahun 2006 berada di 83,7 persen, sedangkan pada tahun 1995 sebesar 76,5 persen.

Kondisi masing-masing provinsi sangat beragam, Kondisi tempat tinggal yang menggunakan lantai dari tanah kondisinya sudah berkurang. Pada tahun 2006,

banyak keluarga yang sudah menggunakan lantai non tanah. Hal ini ditunjukkan di provinsi DKI Jakarta, rumah yang tidak menggunakan lantai dari tanah yakni sebesar 95,56 persen, sedangkan kondisi terdahulunya berada di provinsi Papua yakni sebesar 69,04 persen.

Berbeda dengan tahun 2006, kondisi tahun 1995 bahkan lebih baik. Hal ini ditunjukkan pada tabel 4.5, di provinsi DKI Jakarta saja, rumah yang berlantai tidak menggunakan dari tanah yakni sebesar 98,8 persen, sedangkan kondisi terdahulunya berada di provinsi NTT yakni sebesar 45,02 persen. Hal ini perlu diperhatikan serius oleh pemerintah tentang kondisi perumahan penduduk.

4.1.5.4. Ling4 (Kepemilikan tangki pembuangan air besar)

Kondisi tempat tinggal yang mempunyai tangki pembuangan air besar masih tergolong minim. Dari kondisi yang ada banyak keluarga yang belum menggunakan tangki pembuangan air besar untuk pembuangan air kotoran rumah tangga. Pada tabel 4.5, pada tahun 2006 kondisi Indonesia berada di angka 33,6 persen saja, sedangkan tahun 1995 kondisi Indonesia berada di angka 11,3 persen.

Kondisi di masing-masing provinsi, menunjukkan provinsi DKI Jakarta saja rumah yang menggunakan tangki pembuangan air besar hanya masih sebesar 63,2 persen, sedangkan di tahun 1995, rumah yang menggunakan tangki pembuangan air besar hanya sebesar 18,3 persen, kondisi lebih baik dibanding sebelum otonomi daerah,

Kondisi terdahulunya tahun 2006, berada di provinsi Gorontalo yakni sebesar 12,51 persen. Hal ini menunjukkan kepemilikan tangki pembuangan air besar di era sekarang pun masih belum menjadi kebutuhan utama kelengkapan rumah tangga. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, sedangkan kondisi tahun 1995, terdahulunya berada di provinsi Kalimantan Barat yakni sebesar 2,06 persen. Hal ini menunjukkan kepemilikan tangki pembuangan air besar belum menjadi kebutuhan utama kelengkapan rumah tangga.

4.2. Hasil Analisis Faktor

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, menggunakan metode analisis faktor dengan memanfaatkan program *SPSS for Windows version 12* dan dilakukan secara terpisah menurut sumber data Susenas 1995 dan 2006. beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan terhadap keluaran yang dihasilkan dalam proses pengolahan data dengan metoda analisis faktor adalah : statistik Bartlett, eigenvalue, persentase varian total, koefisien korelasi absolut terbesar (*component matrix*).

Analisis faktor dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama membentuk nilai faktor baru dari variabel-variabel dasar atau indikator-indikator tunggal terpilih seperti Dik1, Dik2, Dik3 dan Dik4, membentuk nilai faktor Educ. Variabel kes1, kes2, kes3, kes 4 membentuk faktir Healt. Variabel krt1, krt2,krt3 membentuk nilai faktor krt. Variabel ae1, ae2 membentuk nilai faktor Aek. Variabel env1, env2, env3, env4 membentuk nilai faktor Env. Tahap kedua membentuk nilai faktor baru dari hasil analisis faktor tahap pertama, yaitu nilai faktor dari pendidikan, kesehatan, Krt, Aek, dan Lingkungan. Nilai baru yang terbentuk disebut nilai faktor gabungan atau nilai faktor kualitas hidup atau kualitas sumber daya manusia. Dari nilai faktor total inilah maka dibentuk indeks komposit yang disebut sebagai indeks kualitas sumber daya manusia (IKSDM). Dalam anlisis faktor ini ada beberapa hal yang juga diperhatikan yaitu nilai faktor, ranking dan indeks.

- Statistik Bartlett dipakai untuk menguji hipotesis tentang matriks korelasi atau merupakan matriks satuan atau matriks identitas. Hipotesis yang diperhatikan dapat dinyatakan : $H_0 : M(r) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dan $H_1 : \text{Bukan } H_0$. Apabila diperoleh nilai P Bartlett test lebih kecil atau sama dengan 0,05 yang menunjukkan signifikasi artinya persamaan ini bisa dilanjutkan.
- *Eigen value* merupakan persyaratan yang dipergunakan dalam analisis faktor dengan nilai sebesar minimal sama dengan satu.
- Persentase variasi total, dipakai untuk melihat besarnya persentase yang bisa menjelaskan hasil analisis faktor tersebut atau berapa persen sebuah faktor tertentu dapat menjelaskan variasi dari data multivariat.

- Nilai faktor, merupakan nilai baru hasil analisis faktor, nilai faktor inilah yang dipergunakan untuk menganalisis ranking, indeks, dan skor pada variabel.
- Ranking dipakai untuk melihat perbedaan relatif antar daerah dan akan dipergunakan untuk menentukan skala prioritas intervensi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.
- Indeks, dipergunakan untuk melihat perbandingan antar daerah/provinsi yang dibandingkan era sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah dengan pembulatan indeks menjadi 101.
- Skor/klasifikasi., disusun dengan ketentuan (Agung, 1999)
 - a. Jika (nilai faktor ≥ 1.50), maka skor = "sangat baik"
 - b. Jika ($0.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < 1.50), maka skor = "baik"
 - c. Jika ($-0.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < 0.5), maka skor = "cukup"
 - d. Jika ($-1.50 \leq$ nilai faktor dan nilai faktor < -0.50), maka skor = "kurang"
 - e. Jika (nilai faktor ≤ -1.50), maka skor = "sangat kurang"



4.2.1. Analisis Faktor Tahap Pertama

4.2.1.1. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Pendidikan Tahun 1995 dan 2006

- Pada analisis faktor untuk data 1995 dan 2006 ini, diperoleh statistik sebagai berikut Bartlett dengan besaran signifikansi masing-masing sebesar 0,000. Nilai Bartlett test untuk data indikator pendidikan 1995 adalah 54,987, sedangkan nilai Bartlett test untuk indikator pendidikan tahun 2006 adalah 38,201. Hal ini membuktikan hasil signifikan, yang berarti menolak hipotesis nol (dimana $H_0 =$ matriks identitas dan $H_1 =$ input matriks \neq matriks identitas), sehingga dapat dikatakan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matrik satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis. Berikut ini persamaan faktor yang terbentuk dari data pendidikan 1995 dan 2006.

Tabel 4.6.

Persamaan Faktor Pendidikan

No	Tahun	Persamaan Faktor	KMO	Eigenvalue	Cumulative %
1	1995	$Feduc = 0,848 \cdot Zdik1 + 0,723 \cdot Zdik2 + 0,911 \cdot Zdik3 + 0,767 \cdot Zdik4$	0,627	2,660	66,499
2	2006	$Feduc = 0,0,737 \cdot Zdik1 + 0,835 \cdot Zdik2 + 0,923 \cdot Zdik3 + 0,290 \cdot Zdik4$	0,590	2,177	54,425

- Dari faktor yang terbentuk dapat diketahui besarnya koefisien korelasi untuk indikator pendidikan tahun 1995 adalah variabel dik1 sebesar 0,848, dik2 sebesar 0,723, dik3 sebesar 0,911 dan dik4 sebesar 0,767. Kemudian besarnya koefisien korelasi untuk indikator pendidikan tahun 2006 adalah variabel diks1 sebesar 0,737, dik2 sebesar 0,835, dik3 sebesar 0,923 dan dik4 sebesar 0,290.
- Selanjutnya dari hasil analisis faktor berdasarkan indikator tunggal Dik1, Dik2, Dik3, dan Dik4 diperoleh hasil sebagai berikut pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7.

Hasil Analisis Faktor Indikator Pendidikan Susenas Tahun 1995 dan 2006

No	Provinsi	1995				2006			
		Fdik 95	Idik 95	Rdik 95	Klass 95	Fdik 06	Idik 06	Rdik 06	Klass 06
1	Aceh	0.3	104	12	Cukup	1.26	114	4	Baik
2	Sumut	1.16	113	3	Baik	1.36	115	3	Baik
3	Sumbar	0.94	110	4	Baik	0.88	110	9	Baik
4	Riau	0.54	106	9	Baik	0.84	109	10	Baik
5	Jambi	-0.15	99	16	Cukup	-0.15	100	19	Cukup
6	Sumsel	-0.34	98	22	Cukup	-0.08	100	18	Cukup
7	Bengkulu	0.46	106	10	Cukup	0.51	106	12	Baik
8	Lampung	-0.07	100	14	Cukup	-0.18	99	20	Cukup
9	Babel	-	-	-	-	-1.05	90	30	Kurang
10	Kepri	-	-	-	-	0.92	110	8	Baik
11	DKI	2.27	124	1	Sangat Baik	1.55	116	1	Sangat Baik
12	Jabar	-0.33	98	21	Cukup	-0.52	96	24	Kurang
13	Jateng	-0.2	99	17	Cukup	-0.22	99	21	Cukup
14	Yogya	1.48	116	2	Baik	1.47	116	2	Baik
15	Jatim	-0.25	98	20	Cukup	0.06	102	16	Cukup
16	Banten	-	-	-	-	-0.29	98	22	Cukup
17	Bali	0.43	105	11	Cukup	0.59	107	11	Baik
18	NTB	-1.38	87	26	Kurang	-0.6	95	25	Kurang
19	NTT	-1.41	87	27	Kurang	-1.42	87	31	Kurang
20	Timtim	-2.73	74	28	Sangat Kurang	-	-	-	-
21	Kalbar	-1.22	89	25	Kurang	-0.7	94	29	Kurang
22	Kalteng	0.6	107	7	Baik	0.33	104	14	Cukup
23	Kalsel	-0.21	99	18	Cukup	-0.69	94	28	Kurang
24	Kaltim	0.9	110	5	Baik	0.96	111	7	Baik
25	Sulut	0.55	106	8	Baik	1.06	112	6	Baik
26	Sulteng	-0.22	99	19	Cukup	-0.41	97	23	Cukup
27	Suisel	-0.62	95	23	Kurang	-0.63	95	26	Kurang
28	Sultra	-0.1	100	15	Cukup	0.18	103	15	Cukup
29	Gorontalo	-	-	-	-	-1.51	86	32	Sangat Kurang
30	Sulbar	-	-	-	-	-1.69	84	33	Sangat Kurang
31	Maluku	0.68	108	6	Baik	1.14	112	5	Baik
32	Malut					0.38	105	13	Cukup
33	Irian Jaya	-1.03	91	24	Kurang	-0.65	95	27	Kurang
34	Papua	-	-	-	-	-2.72	74	34	Sangat Kurang
	Indonesia	-0.03	101	13	Cukup	-0.01	101	17	Cukup

Dari persamaan factor yang terbentuk maka diperoleh nilai Z yang tercantum dalam table 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Nilai Z Masing-Masing Faktor

1995	2006
$Z_{dik1} = (dik1 - 92,5704)/5,35861$	$Z_{dik1} = (dik1 - 96,5085)/3,32658$
$Z_{dik2} = (dik2 - 60,6207)/8,40808$	$Z_{dik2} = (dik2 - 70,2962)/6,25545$
$Z_{dik3} = (dik3 - 37,8171)/9,57790$	$Z_{dik3} = (dik3 - 53,3056)/9,83792$
$Z_{dik4} = (dik4 - 69,6814)/16,79134$	$Z_{dik4} = (dik4 - 69,0865)/10,91886$

- Nilai faktor pendidikan (Fdik) menunjukkan hasil faktor yang diperoleh untuk setiap provinsi. Nilai faktor inilah yang dipergunakan untuk menganalisis ranking indeks dan skor/klasifikasi pada variabel pendidikan pada kedua data tersebut baik 1995 maupun 2006.
- Indeks pendidikan tahun 1995 dan 2006 (Idik), ialah indeks kualitas pendidikan yang ditentukan dengan menerapkan transformasi : $Idik = RND(101+10*Fdik)$, dimana Fdik adalah nilai faktor dari indikator pembanding yaitu Indonesia sehingga nilai indeksnya dibulatkan menjadi 101.

Terlihat dari tabel 4.7, di atas pada tahun 1995 terlihat bahwa pada tingkat provinsi Idik tertinggi dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta sebesar 124, sedangkan Idik provinsi Timor Timur adalah 74 berada paling rendah.

Serupa dengan kondisi tahun 1995, kondisi Idik tertinggi untuk 2006, masih dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta meskipun indek kualitasnya turun menjadi sebesar 116 dibanding nilai sebelum otonomi daerah bergulir, sedangkan Idik terendah ditempati provinsi papua dengan indeks sangat kurang yakni sebesar 74.

- Ranking pendidikan 1995 (Rdik) ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh oleh masing-masing wilayah. Berdasarkan tabel hasil analisis faktor di atas terlihat bahwa untuk ranking indikator pendidikan Indonesia ada di

ranking 13, sedangkan pada era otonomi daerah (2006) untuk ranking indikator pendidikan Indonesia berada di ranking 17. Artinya untuk ranking Indonesia mengalami penurunan.

Pada tingkat provinsi tahun 1995, ranking terbaik diduduki oleh provinsi DKI Jakarta, sedangkan ranking terendah diduduki oleh provinsi Timor Timur. Hal ini juga mengalami kesamaan bahwa, tingkat provinsi ranking terbaik masih diduduki oleh provinsi DKI Jakarta, sedangkan ranking terendah diduduki oleh provinsi Papua.

- Dari tabel 4.7, hasil analisis faktor di atas terlihat bahwa Indonesia pada tahun 1995 dan 2006 masuk pada klasifikasi "cukup". Pada tahun 1995 dan 2006 juga di tingkat provinsi, DKI Jakarta memegang klasifikasi "sangat baik". Provinsi-provinsi yang konsisten mempunyai klasifikasi "baik" dari tahun 1995 maupun 2006 adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara.

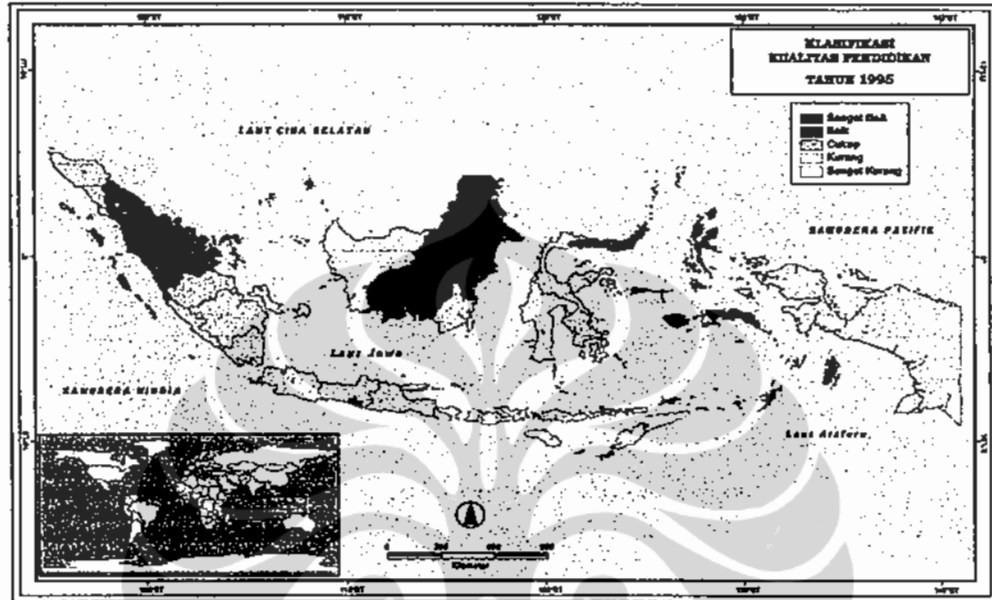
Provinsi-provinsi yang mengalami perubahan klasifikasi dari "cukup" di tahun 1995 berubah ke "baik" di tahun 2006 adalah provinsi Aceh, Bengkulu dan Bali. Adapun sebaliknya provinsi yang mengalami penurunan klasifikasi dari "baik" di tahun 1995 dan berubah "cukup" di tahun 2006 adalah provinsi Kalimantan Tengah.

Hal ini membuktikan bahwa persoalan diferensiasi Jawa dan luar Jawa pada kondisi sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah berjalan hampir dapat dipatahkan untuk indikator pendidikan. Hal ini terbukti dari empat provinsi di pulau Jawa pada tahun 1995, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tiga diantaranya berklasifikasi "cukup", yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan Jakarta "sangat baik" dan Yogyakarta "baik". Kondisi klasifikasi "cukup" juga dialami oleh banyak provinsi di luar Jawa, bahkan banyak yang terklasifikasi "baik". Berikut ini peta/gambar klasifikasi kualitas pendidikan di Indonesia

sebelum atau sesudah berjalannya otonomi daerah dapat di lihat pada gambar 4.1 dan 4.2.

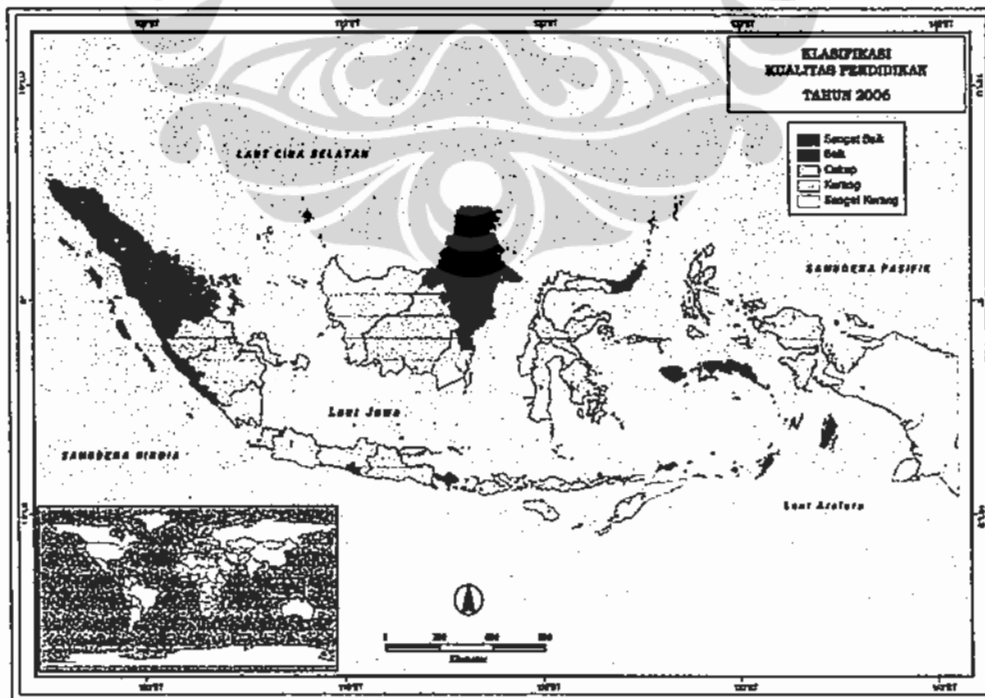
Gambar 4.1.

Peta Klasifikasi Kualitas Pendidikan Indonesia 1995



Gambar 4.2.

Peta Klasifikasi Kualitas Pendidikan Indonesia 2006



4.2.1.2. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Kesehatan Tahun 1995 dan 2006

- Pada analisis faktor untuk data kesehatan 1995 ini diperoleh Statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai 0,007. Nilai Bartlett test untuk data indikator kesehatan 1995 adalah 12,096. Nilai signifikansi data kesehatan tahun 2009 adalah 0,000, adapun nilai Bartlett test untuk indikator kesehatan tahun 2006 adalah 29,294. Hal ini membuktikan hasil signifikan, yang berarti menolak hipotesis nol (dimana $H_0 =$ matriks identitas dan $H_1 =$ input matriks \neq matriks identitas), sehingga dapat dikatakan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matrik satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis.
- Dengan memperhatikan nilai *eigenvalues* untuk data indikator kesehatan 1995, hasilnya adalah lebih besar atau sama dengan satu, maka diperoleh hanya sebuah faktor tunggal (*eigenvalues* = 1,765). Begitu juga nilai *eigenvalues* indikator kesehatan tahun 2006, yang terbentuk satu faktor tunggal sebesar 2,059.
- Selanjutnya dari hasil analisis faktor tunggal kes1, kes2, kes3 dan kes4, diperoleh 2 buah faktor :

$$F1 (1995) = 0,858 * Zkes1 + 0,647 * Zkes2 + 0,781 * Zkes3$$

$$F2 (1995) = 0,900 * kes4$$

$$F1 (1995) = 0,916 * Zkes1 + 0,823 * Zkes2 - 0,703 * Zkes4$$

$$F2 (2006) = 0,930 * kes3$$
- Selanjutnya dari kedua faktor yang terbentuk ini akan kembali dibuat satu faktor kesehatan (Fkes). Data 1995 mengeluarkan Kes4 (lamanya bayi disusui) kemudian dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa kes4, satu-satunya variable yang masuk dalam faktor 2, secara substansi sangat lamanya menyusui tergantung pada kesehatan individu Ibu, bahkan data ini menunjukkan bahwa lama bayi disusui mempunyai rata-rata sama pada setiap provinsi yakni 83 persen.
- Selanjutnya dari kedua faktor yang terbentuk ini akan kembali dibuat satu faktor kesehatan (Fkes). Data 2006 Kes3 (anak yang dilahirkan hidup)

kemudian dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa kes3, satu-satunya variable yang masuk dalam faktor 2.

- Dari faktor yang terbentuk dapat diketahui besarnya koefesien korelasi untuk indikator kesehatan tahun 1995 adalah variabel kes1 sebesar 0,739, kes2 sebesar 0,432, dan kes3 sebesar 0,593. Kemudian besarnya koefesien korelasi untuk indikator kesehatan tahun 2006 adalah variabel kes1 sebesar 0,898, kes2 sebesar 0,848, kes4 sebesar -0,730.
- Persentase varian total yang dapat dijelaskan atau faktor kesehatan pada data 1995, dapat menjelaskan variasi dari data multivariat sebesar 58,819. Lebih lanjut untuk data 2006, persentase varian total yang dapat dijelaskan atau faktor kesehatan dapat menjelaskan variasi dari data multivariat sebesar 68,633.
- Berikut ini persamaan factor baru yang terbentuk dari faktor kesehatan :

Tabel 4.9.
Persamaan Faktor Kesehatan

No	Tahun	Persamaan Faktor	KMO	Eigenvalue	Cumulative %
1	1995	$F_{health} = 0,860 \cdot Z_{kes1} + 0,658 \cdot Z_{kes2} + 0,770 \cdot Z_{kes3}$	0,576	1,765	58,819
2	2006	$F_{health} = 0,898 \cdot Z_{kes1} + 0,848 \cdot Z_{kes2} - 0,730 \cdot Z_{kes4}$	0,627	2,059	68,633

- Dari hasil analisis data 1995 ini, diperoleh hanya satu nilai eigen value yang lebih besar dari satu sebesar 1,765. Sedangkan hasil analisis data 2006, juga diperoleh hanya satu nilai eigen value yang lebih besar dari satu sebesar 2.059
- Berikut ini ditampilkan tabel dari nilai Z yang terbentuk dari hasil persamaan faktor indikator kualitas kesehatan

Tabel 4.10.
Nilai Z Masing-Masing faktor

1995	2006
$Z_{kes1} = (kes1 - 46,5850)/18,14681$	$Z_{kes1} = (kes1 - 61,9874)/19,16602$
$Z_{kes2} = (kes2 - 64,5332)/11,43300$	$Z_{kes2} = (kes2 - 84,0535)/6,87382$
$Z_{kes3} = (kes3 - 93,7196)/1.83303$	$Z_{kes4} = (kes4 - 85,7571)/2.02929$

- Selanjutnya Ditampilkan tabel klasifikasi kualitas kesehatan yang terbentuk dari pengolahan persamaan faktor dari data indikator kualitas kesehatan yang tercantum dalam tabel 4.11.

Tabel 4.11.
Klasifikasi Indikator Kualitas Kesehatan

No	Provinsi	1995				2006			
		Fkes	Ikes	Rkes	Klass	Fkes	Ikes	Rkes	Klass
1	NAD	0.15	102	14	Cukup	-0.37	97	20	Cukup
2	Sumut	0.84	109	5	Baik	0.07	102	17	Cukup
3	Sumbar	0.33	104	10	Cukup	0.39	105	12	Cukup
4	Riau	0.89	110	4	Baik	0.78	109	8	Baik
5	Jambi	0.3	104	11	Cukup	-0.58	95	24	Kurang
6	Sumsel	0.29	104	12	Cukup	0.39	105	13	Cukup
7	Bengkulu	0.53	106	8	Baik	-0.44	97	22	Cukup
8	Lampung	0.21	103	13	Cukup	0.15	103	16	Cukup
9	Babel					0.16	103	15	Cukup
10	Kepri					0.46	106	10	Cukup
11	DKI	2.23	123	1	Sangat Baik	1.97	121	1	Sangat Baik
12	Jabar	-0.12	100	17	Cukup	0.65	107	9	Baik
13	Jateng	-0.23	99	19	Cukup	0.93	110	6	Baik
14	Yogya	0.49	106	9	Cukup	1.81	119	2	Sangat Baik
15	Jatim	-0.59	95	22	Kurang	1.1	112	5	Baik
16	Banten					0.22	103	14	Cukup
17	Bali	0.66	108	6	Baik	1.75	118	3	Sangat Baik
18	NTB	-1.99	81	27	Sangat Kurang	-0.65	94	27	Kurang
19	NTT	-1.07	90	26	Kurang	-0.84	93	29	Kurang
20	Timtim	-2.73	74	28	Sangat Kurang				
21	Kalbar	-0.88	92	25	Kurang	-0.54	96	23	Kurang
22	Kalteng	0.64	107	7	Baik	-0.38	97	21	Cukup
23	Kalsel	-0.24	99	20	Cukup	-0.11	100	18	Cukup
24	Kaltim	0.96	111	3	Baik	1.32	114	4	Baik
25	Sulut	1.61	117	2	Sangat Baik	0.84	109	7	Baik
26	Sulteng	-0.2	99	18	Cukup	-0.64	95	26	Kurang
27	Sulsel	-0.77	93	23	Kurang	-0.6	95	25	Kurang
28	Sultra	-0.79	93	24	Kurang	-1.06	90	31	Kurang
29	Gorontalo					-0.66	94	28	Kurang
30	Sulbar					-2.29	78	34	Sangat Kurang
31	Maluku	0.03	101	15	Cukup	-1.24	89	32	Kurang
32	Malut					-2.06	80	33	Sangat Kurang
33	Irian Jaya	-0.47	96	21	Cukup	-0.11	100	19	Cukup
34	Papua					-0.88	92	30	Kurang
	Indonesia	-0.09	100	16	Cukup	0.44	105	11	Cukup

- Nilai faktor kesehatan (Fkes) menunjukkan hasil faktor yang diperoleh untuk masing-masing provinsi dan Indonesia. Nilai faktor inilah digunakan untuk menganalisa ranking, indeks dan skor pada variabel kesehatan.
- Indeks kesehatan (Ikes), merupakan indeks kualitas kesehatan yang ditentukan dengan menerapkan transformasi : $I_{health} = RND(101+10 \cdot F_{kes})$, dimana nilai F_{health} merupakan nilai faktor pembanding yaitu wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa untuk indeks kesehatan dibulatkan 101.

Pada tabel 4.11 di atas terlihat bahwa Indonesia untuk indeks kesehatan (I_{health}) pada tahun 1995 dan 2006 mempunyai klasifikasi "cukup", dengan indeks 100 dan 105. Pada tahun 1995 di tingkat provinsi klasifikasi tertinggi atau mempunyai predikat "sangat baik" adalah DKI Jakarta yakni 123, akan tetapi pada tahun 2006 mempunyai indeks 119, tetap terklasifikasi "sangat baik".

Sedangkan provinsi yang mempunyai indeks terendah atau berpredikat "sangat kurang" pada tahun 1995 adalah provinsi Timor Timur sebesar 74. Pada tahun 2006, provinsi yang mempunyai indeks terendah adalah Maluku Utara dengan indeks sebesar 80.

Pada tahun 2006, provinsi-provinsi yang mempunyai indeks baik adalah Yogyakarta yakni 119, dan provinsi Bali 118, kondisi ini jauh berbeda sebelum adanya otonomi daerah, dimana provinsi Yogyakarta dan Bali masih jauh di bawah DKI Jakarta. Sedangkan indeks terendah atau berpredikat "sangat kurang" masih menggejala di beberapa provinsi di luar pulau Jawa. Setelah provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan era otonomi bergulir terlihat banyak indeks provinsi yang tidak membaik terutama provinsi baru hasil pemekaran. Adapun provinsi yang tergolong mempunyai indeks kecil adalah Jambi, NTT, NTB, Kalbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku dan Papua, masing-masing mempunyai indeks 95, 94, 93, 96, 95, 95, 90, 94, 89 dan 92. sedangkan indeks yang

terkatagori sangat kecil adalah pada provinsi Sulbar dan Maluku Utara, masing-masing adalah 78 dan 80.

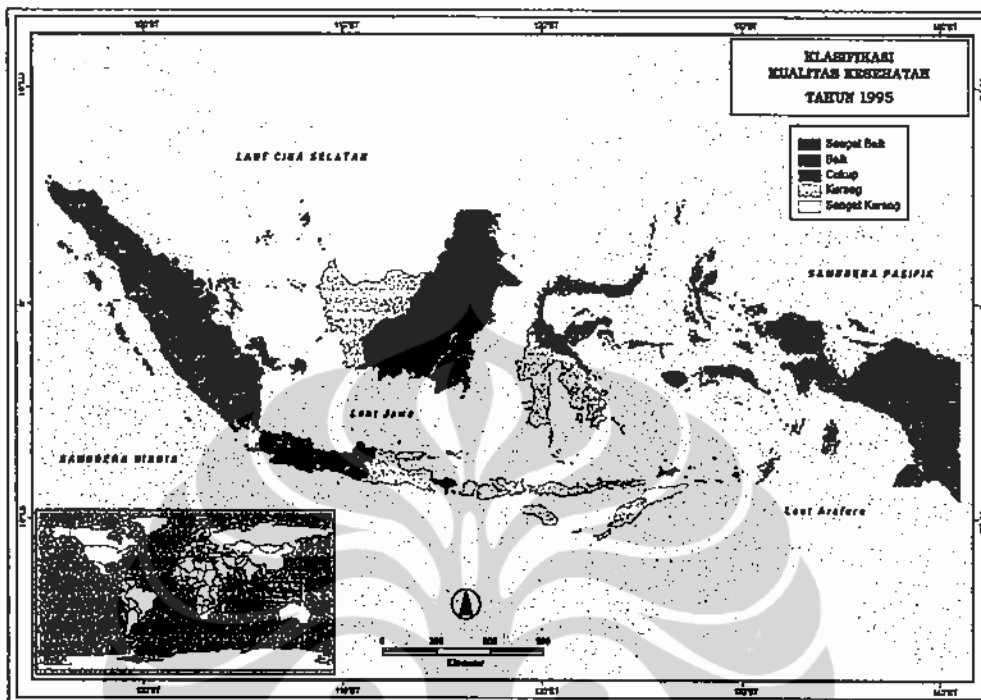
- Ranking kesehatan (Rkes) ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh masing-masing provinsi. Berdasarkan tabel hasil analisis faktor di atas terlihat bahwa untuk ranking indikator kesehatan pada tingkat provinsi ranking pertama diperoleh oleh provinsi DKI Jakarta, kondisi ini bertahan dari tahun 1995 maupun 2006.

Kondisi ranking terakhir pada tahun 1995 dimiliki oleh provinsi Timor Timur. Sedangkan pada tahun 2006 ranking terakhir (tiga puluh empat) provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk Indonesia pada tahun 1995 berada di ranking 11 dan pada tahun 2006 berada di ranking 16.

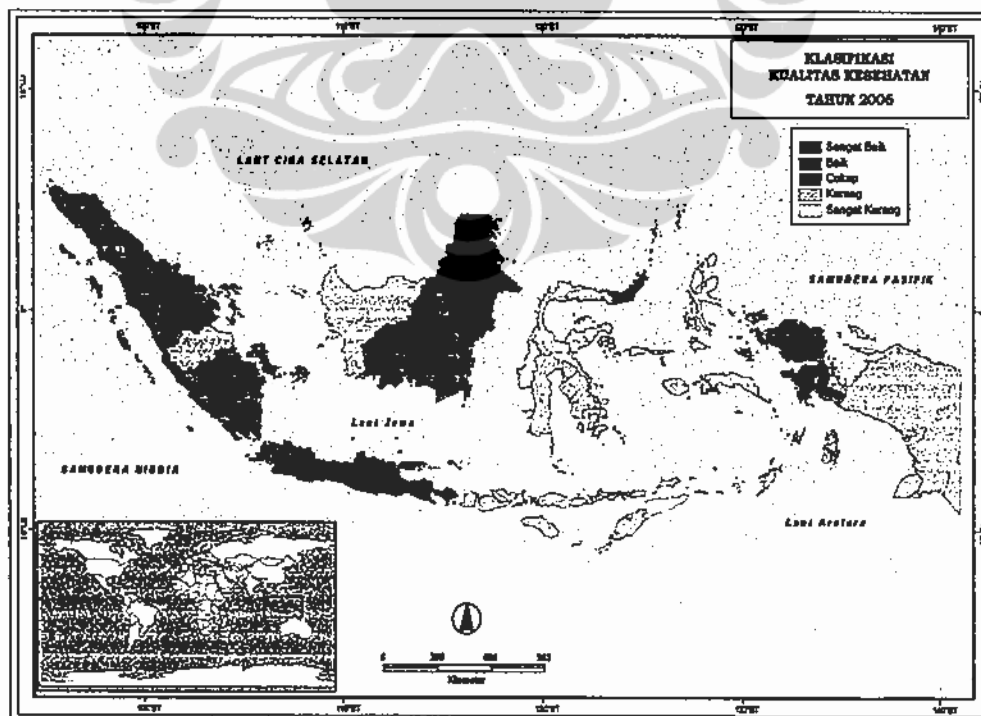
Dari tabel hasil analisis indikator kesehatan di atas terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta yang terletak di pulau Jawa masih memimpin klasifikasi kesehatan ini dengan katagori "sangat baik", sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa masih terklasifikasikan "cukup", kecuali Jawa Timur yang terklasifikasi "kurang".. Sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "kurang", masih didominasi provinsi di luar Jawa. Misalkan NTT, Kalbar, Sulsel, Sultra. Sedangkan NTB, Timor Timur, terklasifikasi sangat kurang".

Dari tabel hasil analisis indikator kesehatan di atas terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta yang terletak di pulau Jawa terklasifikasi pada indikator kesehatan ini dengan katagori "sangat baik", sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa pada era otonomi daerah meningkat klasifikasinya menjadi "baik", sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "kurang", masih didominasi provinsi di luar Jawa. Misalkan NTT, Kalbar, Sulsel, Sultra. Sedangkan NTB, Timor Timur. Selanjutnya provinsi yang terklasifikasi "sangat kurang" adalah Sulbar dan Malut. Dalam peta dapat terlihat seperti peta berikut ini :

Gambar 4.3.
Peta Klasifikasi Kualitas Kesehatan Indonesia Tahun 1995



Gambar 4.4.
Peta Klasifikasi Kualitas Kesehatan Indonesia Tahun 2006



4.2.1.3. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Rumah Tangga Tahun 1995 dan 2006

- Pada analisis faktor data 1995, diperoleh statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai $P = 0,042$. Begitu juga analisis faktor data 2006, diperoleh statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai $P = 0,001$. Sehingga nilai Bartlett test membuktikan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matriks satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis.
- Selanjutnya dari hasil analisis faktor berdasarkan indikator tunggal kualitas rumah tangga, krt1, krt2, krt3, hasil diperoleh 2 buah faktor :

$$Fkrt1 (1995) = 0,883 * Zkrt2 - 0,821 * Zkrt3$$

$$Fkrt2 (1995) = 0,970 * Zkrt1$$

$$Fkrt1 (1995) = 0,907 * Zkrt2 - 0,831 * Zkrt3$$

$$Fkrt2 (2006) = 0,970 * Zkrt1$$
- Selanjutnya dari kedua faktor yang terbentuk ini akan kembali dibuat satu faktor kualitas rumah tangga (Fkrt). Indikator krt1 (umur kawin pertama) kemudian dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa krt1, satu-satunya variable yang masuk dalam factor 2. Setelah krt1 dikeluarkan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Klasifikasi Indikator Kualitas Rumah Tangga

No	Provinsi	1995				2006			
		Fkrt	Ikrt	Rkrt	Klass	Fkrt	Ikrt	Rkrt	Klass
1	Aceh	-1.57	85	27	Sangat Kurang	-1.55	85	32	Sangat Kurang
2	Sumut	-1.46	86	26	Kurang	-1.35	88	29	Kurang
3	Sumbar	-0.69	94	22	Kurang	-0.51	96	24	Kurang
4	Riau	-0.97	91	25	Kurang	-0.54	96	25	Kurang
5	Jambi	-0.08	100	15	Cukup	0.34	104	15	Cukup
6	Sumsel	-0.61	95	20	Kurang	0.13	102	19	Cukup
7	Bengkulu	0.28	104	12	Cukup	0.63	107	7	Baik
8	Lampung	0.11	102	14	Cukup	0.45	105	11	Cukup
9	Babel					0.32	104	16	Cukup
10	Kepri					0.59	107	8	Baik
11	DKI	0.17	103	13	Cukup	0.34	104	14	Cukup
12	Jabar	0.48	106	9	Cukup	0.55	107	9	Baik
13	Jateng	0.87	110	5	Baik	0.93	110	6	Baik
14	Yogya	2.01	121	2	Sangat Baik	1.94	120	1	Sangat Baik
15	Jatim	1.69	118	3	Sangat Baik	1.46	116	4	Baik
16	Banten					-0.13	100	22	Cukup
17	Bali	2.15	122	1	Sangat Baik	1.79	119	2	Sangat Baik
18	NTB	-0.25	99	16	Cukup	0.11	102	20	Cukup
19	NTT	-0.48	96	18	Cukup	-1.37	87	30	Kurang
20	Timtim	-1.73	84	28	Sangat Kurang				
21	Kalbar	-0.35	98	17	Cukup	-0.08	100	21	Cukup
22	Kalteng	0.5	106	8	Baik	0.46	106	10	Cukup
23	Kalsel	0.58	107	7	Baik	0.97	111	5	Baik
24	Kaltim	0.58	107	6	Baik	0.23	103	17	Cukup
25	Sulut	1.05	111	4	Baik	1.51	116	3	Sangat Baik
26	Sulteng	0.29	104	11	Cukup	0.19	103	18	Cukup
27	Sulsel	-0.55	95	19	Kurang	-0.44	97	23	Cukup
28	Sultra	-0.89	92	23	Kurang	-0.94	92	26	Kurang
29	Gorontalo					0.44	105	12	Cukup
30	Sulbar					-1.23	89	28	Kurang
31	Maluku	-0.9	92	24	Kurang	-1.63	85	34	Sangat Kurang
32	Malut					-1.03	91	27	Kurang
33	Irian Jaya	-0.63	95	21	Kurang	-1.59	85	33	Sangat Kurang
34	Papua					-1.42	87	31	Kurang
	Indonesia	0.41	105	10	Cukup	-0.63	105	13	Cukup

- Persamaan nilai faktor yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13.

Persamaan Faktor Kualitas Rumah Tangga

No	Tahun	Persamaan Faktor	KMO	Eigenvalue	Cumulative %
1	1995	$F_{krt} = -0,855 \cdot Z_{krt2} + 0,855 \cdot Z_{krt3}$	0,500	1,462	73,087
2	2006	$F_{krt} = -0,874 \cdot Z_{krt2} + 0,874 \cdot Z_{krt3}$	0,500	1,526	76,306

Dari persamaan tersebut, $krt2$ (jumlah rumah tangga yang mempunyai anak di bawah 3), memberikan kontribusi negatif terhadap pembentukan nilai faktor. Hal ini dikarenakan dalam setiap rumah tangga masih banyak keluarga yang mempunyai anak di atas tiga.

Nilai Z-nya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14.

Nilai Z Masing-Masing Faktor Kualitas Rumah Tangga

$Z_{krt2} = (krt2 - 48,4393)/3,67160$	$Z_{krt2} = (krt2 - 45,5135)/3,69633$
$Z_{krt3} = (krt3 - 52,0654)/11,15785$	$Z_{krt3} = (krt3 - 54,0050)/11,79563$

- Dari hasil analisis data tahun 1995, diperoleh hanya sebuah eigen value sebesar 1,462. Sedangkan hasil analisis 2006, juga diperoleh hanya sebuah eigen value sebesar 1,526.
- Persentase variasi total yang dapat dijelaskan atau faktor kualitas rumah tangga dapat menjelaskan variasi dari data multivariat tahun 1995 sebesar 73,087. Data tahun 2006 membentuk persentase variasi total yang dapat dijelaskan atau faktor kualitas rumah tangga dapat menjelaskan variasi dari data multivariat sebesar 76,306.
- Nilai faktor kualitas rumah tangga (F_{krt}) menunjukkan hasil faktor yang diperoleh untuk masing-masing provinsi dan Indonesia. Nilai faktor inilah digunakan untuk menganalisa ranking, indeks dan skor pada variabel kesehatan.
- Indeks kualitas rumah tangga dalam ber-KB ($Ikrt$), merupakan indeks kualitas rumah tangga dalam ber-KB yang ditentukan dengan menerapkan transformasi : $Ikrt = RND(101+10 \cdot F_{krt})$, dimana nilai F_{krt} merupakan nilai faktor

pembandingan yaitu wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa untuk indeks kualitas rumah tangga dibulatkan 101.

Tabel 4.12 di atas menjelaskan bagaimana kondisi indeks kualitas rumah tangga dalam ber-KB (Ikrt) pada tingkat provinsi dan Indonesia. Pada tahun 1995, indeks tertinggi atau mempunyai predikat "sangat baik" adalah provinsi Bali yakni 122, disusul provinsi Yogyakarta yakni 121, dan provinsi Jawa Timur 118, sedangkan diluar Jawa masih banyak provinsi yang mempunyai indeks di bawah indeks Indonesia. Indeks Indonesia sebesar 105. Kondisi ini yang menyebabkan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa masih cenderung di bawah indeks Indonesia, sedangkan provinsi di luar Jawa yang berada di atas indeks nasional (Indonesia) adalah Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, masing-masing mempunyai indeks 106, 106, 107, 111. Adapun indeks terendah dimiliki oleh provinsi Timor-Timur.

Data 2006 menunjukkan bahwa untuk indeks kualitas rumah tangga dalam ber-KB (Ikrt) pada tingkat provinsi tertinggi atau mempunyai predikat "sangat baik" adalah provinsi Yogyakarta yakni 120, disusul provinsi Bali yakni 119, dan provinsi Sulawesi Utara 116. Sedangkan provinsi DKI Jakarta mempunyai indeks dibawah nilai nasional. DKI terklasifikasikan "cukup" dengan indeks 104, adapun Indeks Indonesia sebesar 105. Kondisi ini yang juga menyebabkan provinsi-provinsi di luar pulau Jawa masih cenderung di bawah indeks Indonesia, provinsi di luar Jawa yang berada di bawah indeks nasional (Indonesia) atau terklasifikasi "sangat kurang" adalah NAD, Maluku dan Irian Jaya Barat, Adapun indeks terendah dimiliki oleh provinsi Maluku.

- Ranking indeks kualitas rumah tangga dalam ber-KB (Ikrt) tahun 1995, ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh masing-masing provinsi. Berdasarkan tabel hasil analisis faktor di atas terlihat bahwa untuk ranking indikator kualitas rumah tangga dalam ber-KB pada tingkat provinsi ranking terbaik (satu) diperoleh oleh provinsi Bali, kedua adalah provinsi Yogyakarta dan ketiga adalah provinsi Jatim. Sedangkan ranking terakhir (dua puluh

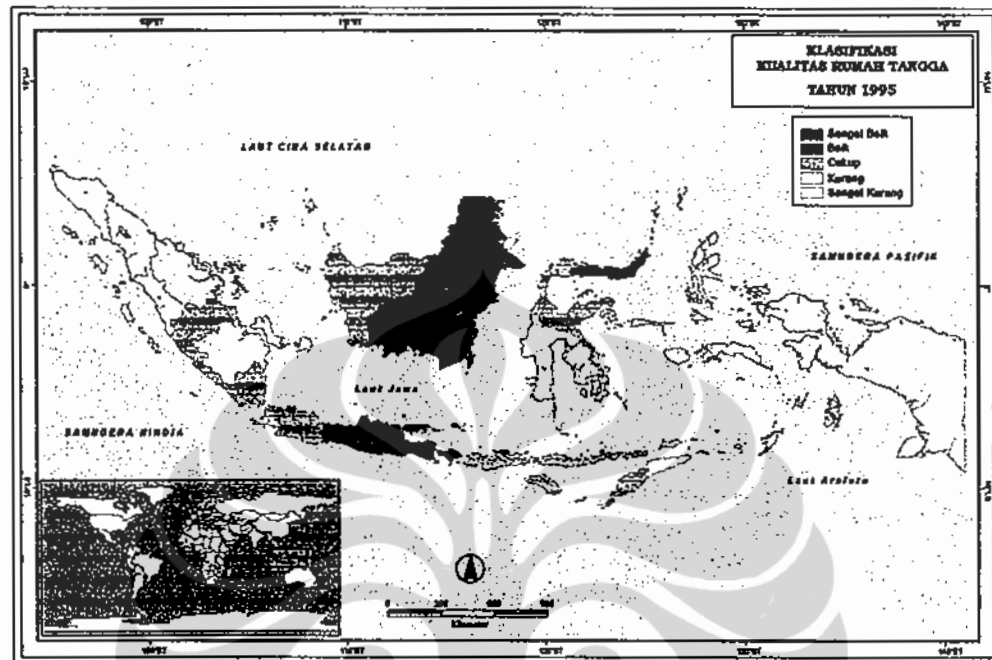
delapan) provinsi Timor Timur. Sedangkan untuk Indonesia berada di ranking 10.

Berbeda dengan data tahun 2006, ranking indeks ini terlihat bahwa untuk ranking indikator kualitas rumah tangga dalam ber-KB pada tingkat provinsi ranking terbaik (satu) diperoleh oleh provinsi Yogyakarta, kedua adalah provinsi Bali dan ketiga adalah provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan ranking terakhir (tiga puluh empat) provinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan untuk Indonesia berada di ranking 13. hal ini menunjukkan bahwa ranking Indonesia mengalami penurunan pada era otonomi daerah.

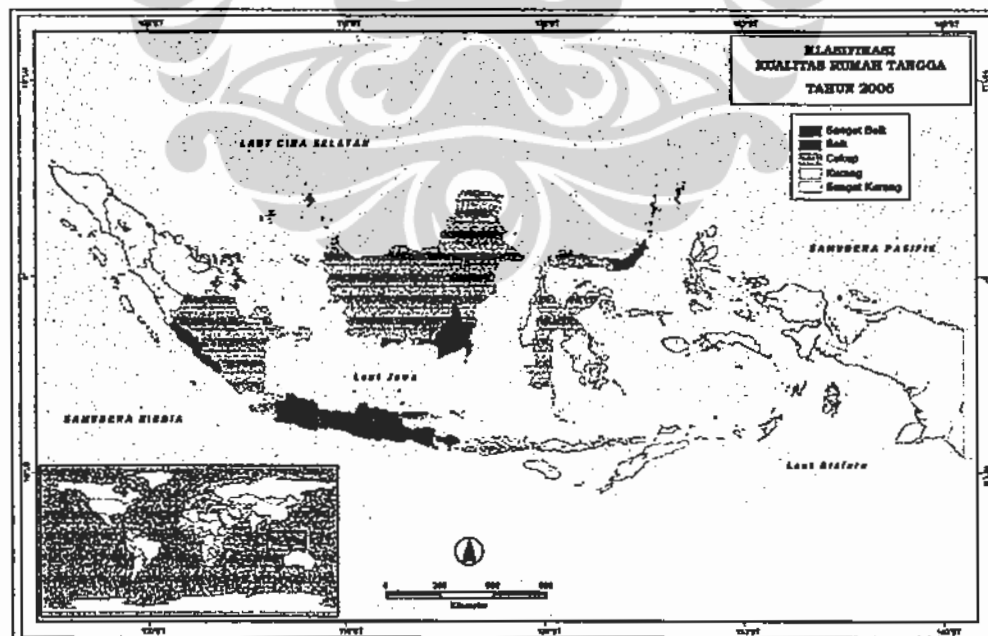
Dari tabel hasil analisis indikator kualitas rumah tangga tahun 1995, terlihat bahwa provinsi Bali Yogyakarta dan Jatim terklasifikasi pada indikator kualitas rumah tangga ini dengan katagori "sangat baik", sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa pada era sebelum otonomi daerah terklasifikasi menjadi "baik" dan "cukup", sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "sangat kurang," masih didominasi provinsi di luar Jawa. Misalkan Timor Timur dan Aceh.

Setelah otonomi daerah berjalan (2006), data hasil analisis indikator kualitas rumah tangga menunjukkan bahwa provinsi Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara terklasifikasi pada indikator kualitas rumah tangga dalam ber-KB ini dengan katagori "sangat baik", sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa pada era setelah otonomi daerah terklasifikasi menjadi "baik" dan "cukup", sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "sangat kurang", masih didominasi provinsi di luar Jawa. Misalkan NAD, Maluku, Irian Jaya Barat. Dalam peta dapat terlihat seperti peta berikut ini :

Gambar 4.5.
Peta Klasifikasi Kualitas Rumah Tangga Indonesia Tahun 1995



Gambar 4.6.
Peta Klasifikasi Kualitas Rumah Tangga Indonesia Tahun 2006



4.2.1.4. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Ekonomi

- Pada analisis faktor untuk data 1995, diperoleh statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai $P = 0,237$ atau tidak signifikan. Sedangkan pada analisis faktor data 2006 diperoleh statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai $P = 0,195$ juga menunjukkan angka yang tidak signifikan. Masing-masing nilai Bartlett test membuktikan bahwa matriks korelasi merupakan matriks identitas atau matriks satuan. Dengan demikian maka data tidak dapat dilanjutkan untuk proses analisis faktor. Walaupun faktor kualitas aktivitas ekonomi tidak masuk dalam faktor pembentuk IKSDM, namun tidak berarti faktor IKSDM tidak bisa terbentuk, karena secara prinsipil kemampuan daya beli yang tercantum dalam prinsip dasar *Human Development Index* sudah inheren di dalam indeks yang terbentuk selain indeks kualitas ekonomi.

4.2.1.5. Analisis Faktor untuk Indikator Kualitas Lingkungan Tahun 1995 dan 2006

- Data tahun 1995 setelah dianalisis faktor ini diperoleh statistik Bartlett yang menunjukkan signifikansi dengan nilai $P = 0,000$. Kemudian data 2006 setelah dianalisis faktor menunjukkan angka statistik Bartlett sebesar nilai $P = 0,000$. Nilai Bartlett test membuktikan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matriks satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis.
- nilai Bartlett test membuktikan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matriks satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis.
- Selanjutnya dari hasil analisis faktor berdasarkan indikator tunggal kualitas rumah tangga data tahun 1995, Ling1, Ling2, Ling3, dan Ling4 hasil rotasi diperoleh 2 buah faktor :

$$FLing1 (1995) = 0,870 * ZLing1 + 0,806 * ZLing2 + 0,644 * ZLing4$$

$$FLing2 (1995) = 0,923 * ZLing3$$

Selanjutnya dari hasil analisis faktor berdasarkan indikator tunggal kualitas rumah tangga data tahun 2006, env1, env2, env3, dan env4 hasil rotasi diperoleh faktor sebagai berikut :

$$FLing (2006) = 0,698 * ZLing1 + 0,921 ZLing2 - 0,607 * ZLing3 + 0,644 ZLing4$$

- Selanjutnya dari kedua faktor yang terbentuk dari data 1995, kembali dibuat satu faktor lingkungan (FLing). Indikator Ling3 (rumah tangga yang tempat tinggalnya tidak dari tanah) kemudian dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Ling3, satu-satunya variable yang masuk dalam faktor 2. Setelah Ling3 dikeluarkan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.15.

Klasifikasi Indikator Kualitas Lingkungan

No	Provinsi	1995				2006			
		FLing	ILing	RLing	Klass	FLing	ILing	RLing	Klass
1	Aceh	-0.22	99	16	Cukup	-0.301	98	20	Cukup
2	Sumut	0.39	105	10	Cukup	0.935	110	5	Baik
3	Sumbar	0.03	101	12	Cukup	0.25	103	16	Cukup
4	Riau	-0.69	94	21	Kurang	-0.193	99	19	Cukup
5	Jambi	-0.7	94	23	Kurang	-0.108	100	17	Cukup
6	Sumsel	-0.52	96	20	Kurang	-0.173	99	18	Cukup
7	Bengkulu	-0.36	97	18	Cukup	-0.43	97	22	Cukup
8	Lampung	-0.83	93	24	Kurang	-0.681	94	27	Kurang
9	Babel					0.753	109	8	Baik
10	Kepri					0.781	109	7	Baik
11	DKI	3.32	134	1	Sangat Baik	2.452	126	1	Sangat Baik
12	Jabar	1.28	114	2	Baik	0.681	108	9	Baik
13	Jateng	0.49	106	8	Cukup	0.401	105	13	Cukup
14	Yogya	0.74	108	5	Baik	1.037	111	4	Baik
15	Jatim	0.73	108	6	Baik	0.442	105	12	Cukup
16	Banten					0.546	106	11	Baik
17	Bali	1.25	114	3	Baik	1.704	118	2	Sangat Baik
18	NTB	0.14	102	11	Cukup	-0.528	96	25	Kurang
19	NTT	-1.22	89	27	Kurang	-2.485	76	34	Sangat Kurang
20	Timtim	-0.7	94	22	Kurang				
21	Kalbar	-1.68	84	28	Sangat Kurang	-0.54	96	26	Kurang
22	Kalteng	-1.19	89	25	Kurang	-0.758	93	28	Kurang
23	Kalsel	0.02	101	13	Cukup	0.374	105	15	Cukup
24	Kaltim	0.4	105	9	Cukup	1.192	113	3	Baik
25	Sulut	0.88	110	4	Baik	0.91	110	6	Baik
26	Sulteng	-0.27	98	17	Cukup	-0.461	96	23	Cukup
27	Sulse	-0.06	100	14	Cukup	0.584	107	10	Baik
28	Sultra	-0.37	97	19	Cukup	-0.325	98	21	Cukup
29	Gorontalo					-0.997	91	32	Kurang
30	Sulbar					-0.961	91	30	Kurang
31	Maluku	-0.19	99	15	Cukup	-0.489	96	24	Cukup
32	Malut					-0.9	92	29	Kurang
33	Irian Jaya	-1.21	89	26	Kurang	-0.962	91	31	Kurang
34	Papua					-2.134	80	33	Sangat Kurang
	Indonesia	0.55	106	7	Baik	0.39	105	14	Cukup

Persamaan nilai faktor data 1995 yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16.

Persamaan Faktor Kualitas Lingkungan

No	Tahun	Persamaan Faktor	KMO	Eigenvalue	Cumulative %
1	1995	$FLing = 0,981*ZLing1 + 0,892*ZLing2 + 0,533*ZLing4$	0,561	1,873	62,422
2	2006	$FLing = 0,698*ZLing1 + 0,921*ZLing2 + 0,644*ZLing4$	0,500	1,526	76,306

Nilai Z-nya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17.

Nilai Z Masing-Masing Faktor Lingkungan

$Zenv1 = (Ling1 - 38,1743)/15,95089$	$Zenv1 = (Ling1 - 45,8712)/12,85469$
$Zenv2 = (Ling2 - 55,9818)/19,31098$	$Zenv2 = (Ling2 - 80,1465)/15,81821$
$Zenv4 = (Ling4 - 9,4568)/4,29966$	$Zenv4 = (Ling4 - 29,7332)/10,98230$

- Dari hasil analisis data 1995 ini diperoleh hanya sebuah eigen value sebesar 1,873. Adapun untuk data 2006 diperoleh nilai eigen value sebesar 2,531.
- Persentase variasi total yang dapat dijelaskan atau faktor kualitas lingkungan dapat menjelaskan variasi dari data multivariat tahun 1995 sebesar 62,422 dan data tahun 2006 sebesar 63,281.
- Nilai faktor kualitas lingkungan (FLing) menunjukkan hasil faktor yang diperoleh untuk masing-masing provinsi dan Indonesia. Nilai faktor inilah digunakan untuk menganalisa ranking, indeks dan skor pada variabel kualitas lingkungan.
- Indeks kualitas lingkungan, merupakan indeks kualitas lingkungan yang ditentukan dengan menerapkan transformasi : $Ienv = RND(101+10*FLing)$, dimana nilai FLing merupakan nilai faktor pembanding yaitu wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa untuk indeks kualitas lingkungan dibulatkan 101.

Tabel 4.15, di atas terlihat bahwa untuk indeks kualitas lingkungan (Ienv) pada tingkat provinsi tahun 1995 tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta yakni 134. Indeks Indonesia sebesar 106. Adapun indeks terendah dimiliki oleh provinsi Kalimantan Barat. Tabel 4.15. di atas juga memuat indeks kualitas lingkungan (Ienv) pada tingkat provinsi tahun 2006 tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta yakni 126, adapun Indeks Indonesia sebesar 105 dan indeks terendah dimiliki oleh provinsi NTT.

- Ranking indeks kualitas lingkungan (Ienv) ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh masing-masing provinsi. Berdasarkan tabel hasil analisis faktor tahun 1995 di atas, terlihat bahwa untuk ranking indikator kualitas lingkungan pada tingkat provinsi ranking terbaik (satu) diperoleh oleh provinsi DKI Jakarta, sedangkan ranking terakhir (dua puluh delapan) provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk Indonesia berada di ranking 7.

Lain halnya dengan hasil analisis faktor tahun 2006, tabel 4.15 terlihat bahwa untuk ranking indikator kualitas lingkungan pada tingkat provinsi ranking terbaik (satu) diperoleh oleh provinsi DKI Jakarta, sedangkan ranking terakhir (dua puluh delapan) provinsi NTT. Sedangkan untuk Indonesia berada di ranking 14. Pada peringkat Indonesia mengalami penurunan yang drastis.

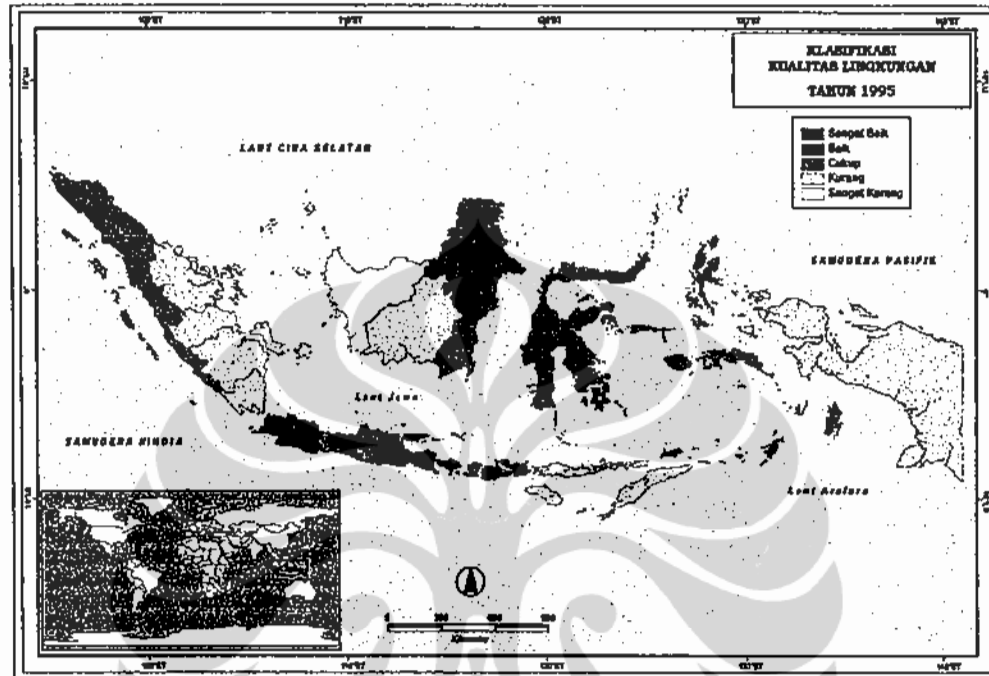
Dapat diperhatikan pada hasil analisis indikator kualitas lingkungan pada tabel 4.15 di atas, pada tahun 1995 terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta terklasifikasi "sangat baik," sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa pada era ini terklasifikasi menjadi "baik" dan "cukup". sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "sangat kurang," adalah Kalimantan Barat, sedangkan secara nasional Indonesia terklasifikasi "baik."

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, tahun 2006 pada indikator kualitas lingkungan, provinsi DKI Jakarta terklasifikasi "sangat baik," sedangkan provinsi-provinsi lainnya yang berada di pulau Jawa pada era ini terklasifikasi menjadi "baik" dan "cukup". sedangkan untuk provinsi yang masih terklasifikasi "sangat kurang", adalah NTT dan Papua. Secara nasional

Indonesia terklasifikasi "cukup". Dalam peta dapat terlihat seperti peta berikut ini :

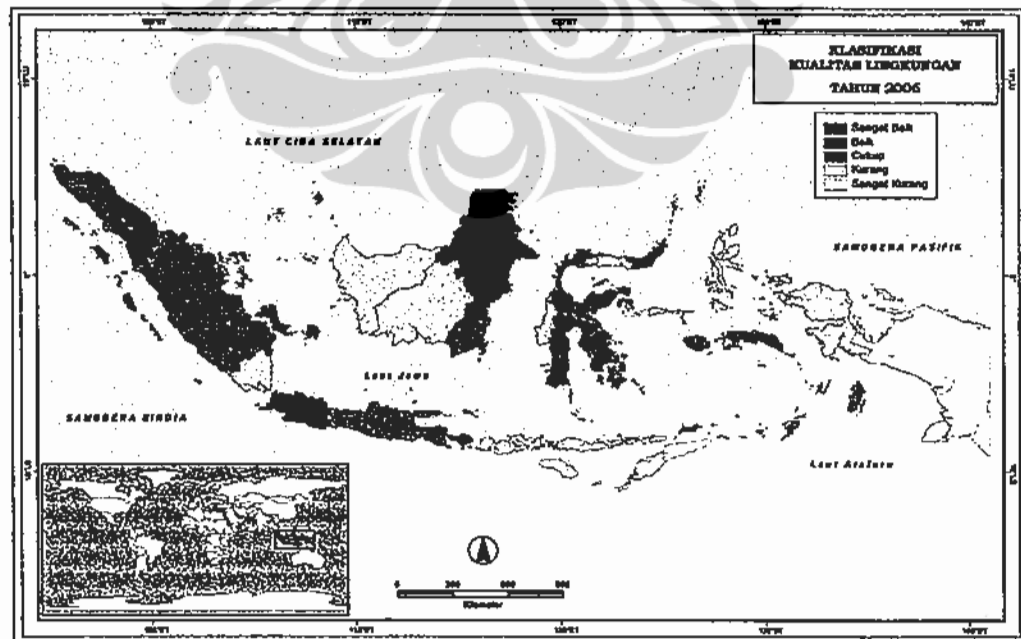
Gambar 4.7.

Peta Klasifikasi Kualitas Lingkungan Indonesia Tahun 1995



Gambar 4.8.

Peta Klasifikasi Kualitas Lingkungan Indonesia Tahun 2006



4.2.2. Analisis Faktor Tahap Kedua Analisis Faktor Gabungan Data Tahun 1995 dan 2006)

- Pada analisis Faktor tahap kedua diperoleh Statistik Bartlett untuk kedua data tersebut yakni 1995 dan 2006, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. hal ini mengindikasikan Bartlett test menunjukkan bahwa matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau matriks satuan. Dengan demikian maka data dapat dilanjutkan untuk proses faktor analisis.
- Selanjutnya dari hasil analisis faktor berdasarkan indikator gabungan pendidikan, kesehatan, kualitas rumah tangga dan lingkungan dihasilkan komposisi yang disajikan dalam tabel 4.18 berikut ini :



Tabel 4.18.
Hasil Analisis Faktor Indikator Gabungan Susenas

No	Provinsi	1995				2006			
		FSDM	ISDM	RSDM	Klass	FSDM	ISDM	RSDM	Klass
1	Aceh	-0.433	97	20	Cukup	-0.329	98	23	Cukup
2	Sumut	0.279	104	8	Cukup	0.32	104	12	Cukup
3	Sumbar	0.048	101	12	Cukup	0.305	104	12	Cukup
4	Riau	-0.044	101	14	Cukup	0.245	104	12	Cukup
5	Jambi	-0.27	98	17	Cukup	-0.174	99	21	Cukup
6	Sumsel	-0.442	97	21	Cukup	0.089	102	16	Cukup
7	Bengkulu	0.231	103	11	Cukup	0.017	101	18	Cukup
8	Lampung	-0.225	99	16	Cukup	-0.103	100	19	Cukup
9	Babel					0.123	102	16	Cukup
10	Kepri					0.824	109	7	Baik
11	DKI	2.682	128	1	Sangat Baik	1.989	121	1	Sangat Baik
12	Jabar	0.25	104	10	Cukup	0.466	106	9	Cukup
13	Jateng	0.362	105	7	Cukup	0.649	107	8	Baik
14	Yogya	1.731	118	3	Sangat Baik	1.878	120	2	Sangat Baik
15	Jatim	0.521	106	6	Baik	0.939	110	6	Baik
16	Banten					0.147	102	16	Cukup
17	Bali	1.731	118	2	Sangat Baik	1.813	119	3	Sangat Baik
18	NTB	-1.067	90	25	Kurang	-0.522	96	25	Kurang
19	NTT	-1.301	88	27	Kurang	-1.869	82	33	Sangat Kurang
20	Timtim	-2.025	81	28	Sangat Kurang				
21	Kalbar	-1.279	88	26	Kurang	-0.57	95	26	Kurang
22	Kalteng	-0.01	101	13	Cukup	-0.171	99	21	Cukup
23	Kalsel	-0.214	99	15	Cukup	0.18	103	14	Cukup
24	Kaltim	0.934	110	5	Baik	1.159	113	5	Baik
25	Sulut	1.157	113	4	Baik	1.282	114	4	Baik
26	Sulteng	-0.357	97	18	Cukup	-0.425	97	24	Cukup
27	Sulsel	-0.589	95	22	Kurang	-0.288	98	23	Cukup
28	Sultra	-0.699	94	23	Kurang	-0.677	94	28	Kurang
29	Gorontalo					-0.83	93	29	Kurang
30	Sulbar					-1.874	82	33	Sangat Kurang
31	Maluku	-0.376	97	19	Cukup	-0.737	94	28	Kurang
32	Malut					-1.179	89	31	Kurang
33	Irian Jaya	-0.848	93	24	Kurang	-0.97	91	30	Kurang
34	Papua					-2.116	80	34	Sangat Kurang
	Indonesia	0.254	104	9	Cukup	0.39	105	10	Cukup

Persamaan nilai faktor yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19.

Persamaan Faktor Gabungan

No	Tahun	Persamaan Faktor	KMO	Eigenvalue	Cumulative %
1	1995	$F_{total} = 0,840 \cdot F_{educ} + 0,903 \cdot F_{health} + 0,661 \cdot F_{krt} + 0,815 \cdot F_{env}$	0,593	3,007	75,169
2	2006	$F_{total} = 0,701 \cdot F_{educ} + 0,903 \cdot F_{health} + 0,745 \cdot F_{krt} + 0,912 \cdot F_{env}$	0,658	2,420	60,491

- Dari hasil analisis data 1995 ini diperoleh sebuah nilai eigen value yang lebih besar dari satu sebesar 2,623 dan hasil analisis data 2006 diperoleh sebuah nilai eigen value sebesar 2,694.
- Data 1995 mampu menjelaskan persentase variasi total sebesar 65,682, sedangkan tahun 2006 dapat menjelaskan persentase variasi total sebesar 67,340.
- Nilai faktor total menunjukkan hasil faktor yang diperoleh untuk masing-masing provinsi dan nilai Indonesia di tahun 1995. Nilai faktor inilah yang dipergunakan untuk menganalisa indeks, ranking, dan skor atau klasifikasi nilai provinsi serta nilai Indonesia.
- Indeks total/gabungan ditentukan dengan menerapkan transformasi : Nilai Indeks Gabungan = $RND (101 + 10 \cdot FKH)$, dimana nilai FKH adalah nilai faktor masing-masing provinsi, sehingga nilai indeksnya dibulatkan menjadi 101. Indeks total merupakan komposit dari indeks pendidikan (I_{educ}), indeks kesehatan (I_{health}), indeks kualitas rumah tangga (I_{krt}), indeks kualitas lingkungan (I_{env}). Indeks total/gabungan inilah yang diberi nama Indeks Komposit Kualitas Sumber Daya Manusia (IKSDM). Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 1995 di tingkat provinsi, peringkat terbaik dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta mempunyai indeks 128 di atas nilai Indonesia yang sebesar 103. Sedangkan indeks kualitas sumber daya manusia terendah berada di provinsi Timor Timur, provinsi ini mempunyai indeks jauh di bawah nilai Indonesai sebesar 81. Sedangkan nasional (Indonesia) adalah 104.

pada tahun 2006 di tingkat provinsi, peringkat terbaik dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta mempunyai indeks 121 di atas nilai Indonesia yang

sebesar 105. Sedangkan indeks kualitas sumber daya manusia terendah berada di provinsi Papua, provinsi ini mempunyai indeks jauh di bawah nilai Indonesai sebesar 80.

- Ranking total, disebut juga ranking kualitas sumber daya manusia (RKSDM) ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh dari masing-masing provinsi. Rangkaing Kualitas Sumber Daya Manusia pada pada tahun 1995, tertinggi dipegang oleh provinsi DKI Jakarta. Sedangkan ranking terakhir atau 28 adalah provinsi Timor Timur, sedangkan untuk ranking Indonesia berada di raking 9.

Ranking total, disebut juga ranking kualitas sumber daya manusia (RKSDM) ditentukan berdasarkan nilai faktor yang diperoleh dari masing-masing provinsi. Rangkaing Kualitas Sumber Daya Manusia pada pada tahun 2006, tertinggi dipegang oleh provinsi DKI Jakarta. Sedangkan ranking terakhir atau 34 adalah provinsi Papua, sedangkan untuk ranking Indonesia berada di raking 10.

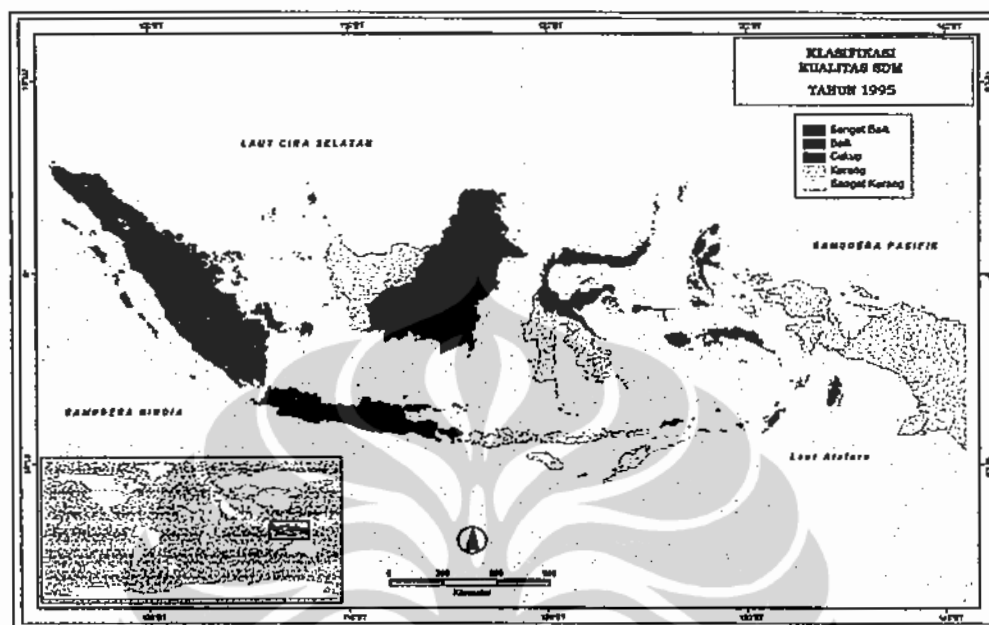
- Dari tabel 4.18 di atas padatahun 1995, terlihat bahwa Indonesia masuk pada klasifikasi "cukup." Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta terklasifikasi "sangat baik", sedangkan Timor Timur terklasifikasi "sangat kurang." Untuk klasifikasi ini provinsi-provinsi di pulau Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Timor-Timur) semuanya masih terklasifikasi "sangat kurang."

Namun untuk provinsi Bali terklasifikasi "baik," Sedangkan provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa, terklasifikasi "sangat baik" adalah DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta, sedangkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat terklasifikasi "cukup." Di pulau Sumatera provinsi Sumatera Utara dan Riau terklasifikasi "baik," sedangkan Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung terklasifikasi "cukup." Berbeda dengan kondisi di pulau Kalimantan, klasifikasi "baik" diraih hanya oleh kalimantan Timur, sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan terklasifikasi "kurang", serta provinsi Kalimantan Selatan terklasifikasi "cukup." Kondisi di pulau

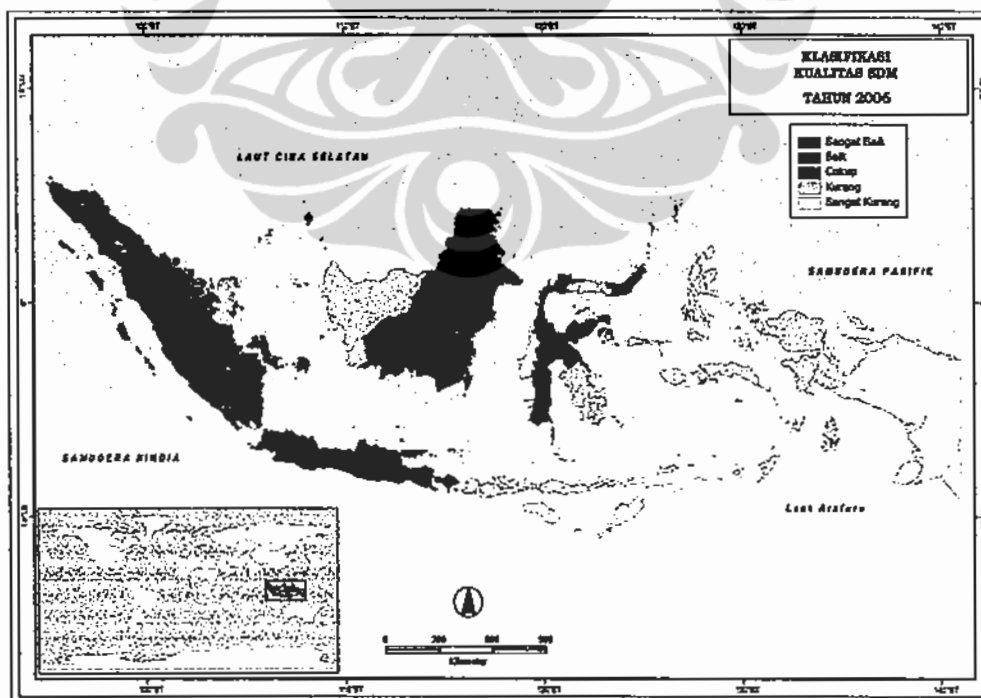
Sulawesi juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut ; Sulawesi Utara terklasifikasi "baik," sedangkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku terklasifikasi "cukup." adapun untuk provinsi Irian Jaya terklasifikasi "kurang."

Demikian juga pada tahun 2006, tabel 4.18 di atas terlihat bahwa Indonesia masuk pada klasifikasi "cukup." Pada tingkat provinsi, DKI Jakarta terklasifikasi "sangat baik", sedangkan Papua terklasifikasi "sangat kurang." Untuk klasifikasi ini provinsi-provinsi di luar pulau Jawa masih cenderung terklasifikasi "kurang" dan "sangat kurang." Untuk provinsi Bali terklasifikasi "sangat baik," provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa, terklasifikasi "sangat baik" adalah DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta, sedangkan, Jawa Tengah dan Jawa Timur "baik", Jawa Barat terklasifikasi dan Banten "cukup." Di pulau Sumatera provinsi Kepulauan Riau "baik," sedangkan Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung dan Bangka Belitung terklasifikasi "cukup." Di pulau Kalimantan, klasifikasi "baik" diraih hanya oleh Kalimantan Timur, sedangkan Kalimantan Barat "kurang", Kalimantan Tengah terklasifikasi serta provinsi Kalimantan Selatan terklasifikasi "cukup." Kondisi di pulau Sulawesi juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut ; Sulawesi Utara terklasifikasi "baik," sedangkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan terklasifikasi "cukup." adapun untuk provinsi Sulawesi Tenggara & Gorontalo "Kurang" serta Sulawesi Barat "sangat kurang". Provinsi Maluku dan Maluku Utara "kurang", Irian Jaya Barat dan Papua terklasifikasi "kurang." Berikut ini peta yang menunjukkan kondisi tersebut :

Gambar 4.9.
Peta Klasifikasi Kualitas Hidup/Sumber Daya manusia Indonesia
Tahun 1995



Gambar 4.10.
Peta Klasifikasi Kualitas Hidup/Sumber Daya manusia Indonesia
Tahun 2006



4.2.3. Perbandingan Indeks Kualitas Sumber Daya Manusia (IKSDM) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4.2.3.1. Perbandingan IKSDM tahun 1995 dengan IPM 1999

IKSDM merupakan indeks komposit dari 4 indikator tunggal yaitu pendidikan, kesehatan, kualitas rumah tangga dalam ber-KB dan kualitas lingkungan dimana total indikator tunggal yang membentuk keempat kelompok tersebut adalah 15 variabel dasar atau indikator tunggal seperti telah disebutkan lebih dahulu. IPM merupakan indeks komposit dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Perbandingan IKSDM dan IPM pada tingkat provinsi.

Tabel 4.20.

Perbandingan IKSDM (1995) dengan IPM BPS (1999)

No	Provinsi	IKSDM 1995	Kategori	IPM 1999
1	Aceh	102	Cukup	65.3
2	Sumut	107	Baik	66.6
3	Sumbar	102	Cukup	65.8
4	Riau	107	Baik	67.3
5	Jambi	100	Cukup	65.4
6	Sumsel	97	Cukup	63.9
7	Bengkulu	101	Cukup	64.8
8	Lampung	100	Cukup	63
9	DKI	130	Sangat Baik	72.5
10	Jabar	105	Cukup	64.6
11	Jateng	102	Cukup	64.6
12	Yogya	114	Baik	68.7
13	Jatim	101	Cukup	61.8
14	Bali	108	Baik	65.7
15	NTB	84	Sangat Kurang	64.2
16	NTT	86	Sangat Kurang	60.4
17	Timtim	80	Sangat Kurang	
18	Kalbar	86	Kurang	60.6
19	Kalteng	103	Cukup	66.7
20	Kalsel	96	Kurang	62.2
21	Kaltim	111	Baik	67.8
22	Sulut	112	Baik	67.1
23	Sulteng	97	Cukup	62.8
24	Sulsel	98	Cukup	63.6
25	Sultra	98	Cukup	62.9
26	Maluku	105	Cukup	67.2
27	Irian Jaya	94	Kurang	58.8
28	Indonesia	103	Cukup	64.3

Dari tabel di atas secara umum terlihat bahwa indikator IKSDM dan IPM memberikan peringkat yang searah, dimana dari 27 provinsi yang ada, terlihat provinsi yang memiliki peringkat indeks paling baik menurut IKSDM adalah provinsi DKI Jakarta dengan IKSDM 130 dan provinsi yang berada peringkat paling rendah adalah provinsi Timor Timur dengan IKSDM 80. Menurut IPM 1999 juga demikian, dimana provinsi yang memiliki indeks paling baik adalah provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 72,5.

Tabel 4.21.

Korelasi IKSDM (1995) dengan IPM BPS (1999)

			IKSDM 95	IPM 99
Spearman's rho	IKSDM 95	Correlation Coefficient	1.000	.876**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	28	27
	IPM 99	Correlation Coefficient	.876**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	27	27

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa antara IKSDM dan IPM memiliki hubungan yang sangat erat dengan koefisien korelasi sebesar 0,876, signifikan dengan nilai $P = 0,000$. jadi dengan demikian IKSDM dapat dipakai untuk menjadi alternatif pembentukan IPM.

IPM yang dibuat oleh BPS mengacu pada HDI (*Human Development Index*) standar yang dibuat oleh UNDP, dimana pembentukannya didasarkan pada variable-variabel atau indikator-indikator yang tidak dapat diobservasi secara langsung seperti angka harapan hidup dan angka kematian bayi, sedangkan pada IKSDM variable-variabelnya dapat diobservasi secara langsung dan dapat diukur pada setiap tingkat wilayah.

4.2.3.2. Perbandingan IKSDM tahun 2006 dengan IPM BPS 2005.

Pada perbandingan IKSDM dengan IPM masih merupakan indeks komposit dari 4 indikator tunggal yaitu pendidikan, kesehatan, kualitas rumah tangga dalam ber-KB dan kualitas lingkungan dimana total indikator tunggal yang membentuk keempat kelompok tersebut adalah 15 variabel dasar atau indikator tunggal seperti

telah disebutkan lebih dahulu. IPM merupakan indeks komposit dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks daya beli yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Perbandingan IKSDM dan IPM pada tingkat provinsi. Provinsi yang ada pada tahun 2006 ini menjadi 34, karena telah terjadi pemekaran secara administrasi pemerintahan. Berikut ini perbandingan antara IKSDM dan IPM pada tingkat provinsi dan Indonesia.

Tabel 4.22.

Perbandingan IKSDM (2006) dengan IPM BPS (2005)

No	Provinsi	IKSDM.06	Klass	IPM 05
1	NAD	99	Cukup	69
2	Sumut	107	Baik	72
3	Sumbar	102	Cukup	71.2
4	Riau	105	Cukup	73.6
5	Jambi	96	Cukup	71
6	Sumsel	102	Cukup	70.2
7	Bengkulu	97	Cukup	71.1
8	Lampung	101	Cukup	68.8
9	Babel	97	Cukup	70.7
10	Kepri	109	Baik	72.2
11	DKI	126	Sangat Baik	76.1
12	Jabar	102	Cukup	69.9
13	Jateng	110	Baik	69.8
14	Yogya	122	Sangat Baik	73.5
15	Jatim	110	Baik	68.4
16	Banten	102	Cukup	68.8
17	Bali	123	Sangat Baik	69.8
18	NTB	89	Kurang	62.4
19	NTT	91	Kurang	63.6
20	Kalbar	98	Cukup	66.2
21	Kalteng	100	Cukup	73.2
22	Kalsel	99	Cukup	67.4
23	Kaltim	113	Baik	72.9
24	Sulut	105	Cukup	74.2
25	Sulteng	94	Kurang	68.5
26	Sulsel	91	Kurang	68.1
27	Sultra	93	Kurang	67.5
28	Gorontalo	88	Kurang	67.5
29	Sulbar	81	Sangat Kurang	65.7
30	Maluku	94	Kurang	69.2
31	Malut	90	Kurang	67
32	IrijaBarat	99	Cukup	64.8
33	Papua	94	Kurang	62.1
34	Indonesia	105	Cukup	69.6

Dari tabel di atas secara umum terlihat bahwa indikator IKSDM dan IPM memberikan peringkat yang searah, dimana dari 27 provinsi yang ada, terlihat provinsi yang memiliki peringkat indeks paling baik menurut IKSDM adalah provinsi DKI Jakarta dengan IKSDM 130 dan provinsi yang berada peringkat paling rendah adalah provinsi Timor Timur dengan IKSDM 80. Menurut IPM 1999 juga demikian, dimana provinsi yang memiliki indeks paling baik adalah provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 72,5.

Tabel 4.23.

Korelasi IKSDM (2006) dengan IPM BPS (2005)

			IPM 05	IKSDM 06
Spearman's rho	IPM 05	Correlation Coefficient	1.000	.699**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	34	34
	IKSDM 06	Correlation Coefficient	.699**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	34	34

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil analisis korelasi di atas menunjukkan bahwa antara IKSDM dan IPM memiliki hubungan yang sangat erat dengan koefisien korelasi sebesar 0,876, signifikan dengan nilai $P = 0,000$. jadi dengan demikian IKSDM dapat dipakai untuk menjadi alternative pembentukan IPM.

IPM yang dibuat oleh BPS mengacu pada HDI (*Human Development Index*) standar yang dibuat oleh UNDP, dimana pembentukannya didasarkan pada variable-variabel atau indikator-indikator yang tidak dapat diobservasi secara langsung seperti angka harapan hidup dan angka kematian bayi, sedangkan pada IKSDM variabel-variabelnya dapat diobservasi secara langsung dan dapat diukur pada setiap tingkat wilayah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kualitas sumber daya manusia di masing-masing provinsi pada tahun 1995 (sebelum otonomi daerah) dan tahun 2006 (setelah otonomi daerah) dapat disimpulkan sebagai berikut : Setelah otonomi daerah berjalan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan terklasifikasi cukup. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas masing-masing provinsi yang ada setelah otonomi daerah digulirkan, untuk provinsi yang baru berdiri, perkembangan pendidikan kecenderungannya masih belum memuaskan.
- 2) Kualitas kesehatan Indonesia setelah berjalannya otonomi daerah masih sama kualitasnya dengan era sebelum otonomi daerah. Otonomi daerah belum bisa menjadi jaminan perbaikan kualitas bidang kesehatan, terutama di luar Jawa. Perbaikan kualitas kesehatan hanya terlihat membaik di provinsi-provinsi di Jawa. Provinsi-provinsi baru masih dibayangi rendahnya kualitas kesehatan. Setidaknya ada 12 provinsi dari 33 provinsi yang masih terklasifikasi "kurang" dan "sangat kurang". Provinsi itu adalah Jambi, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
- 3) Kualitas rumah tangga yang didalamnya meliputi aspek keluarga berencana dan umur kawin pertama wanita berusia 10 tahun ke atas, Kondisi pada era otonomi daerah, aspek kualitas rumah tangga Indonesia masih belum membaik. Bahkan masih banyak permasalahan kualitas rumah tangga dialami pada penduduk provinsi di luar pulau Jawa terutama provinsi-provinsi yang baru berdiri hasil pemekaran.
- 4) Pada bidang kualitas lingkungan, Indonesia di era otonomi daerah kondisi kualitas lingkungan mengalami penurunan kualitas, dari klasifikasi "baik" menjadi "cukup".

- 5) Kualitas sumber daya manusia Indonesia setelah otonomi daerah bergulir kualitasnya tidak jauh berbeda dengan sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

5.2. Saran

1. Provinsi terklasifikasi “kurang” dan “sangat kurang” pada kualitas pendidikan disarankan untuk meningkatkan partisipasi sekolah melalui peningkatan anggaran pendidikan serta peningkatan distribusi tenaga pengajar dan peningkatan fasilitas sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terutama pendidikan dasar sembilan tahun. Hal disebabkan oleh rendahnya persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi sekolah, rendahnya persentase penduduk usia 15-49 yang berpendidikan minimal SLTP, dan rendahnya persentase penduduk usia 15-59 tahun yang dapat baca tulis huruf latin serta persentase penduduk yang minimal berusia 40 tahun yang dapat membaca maupun menulis.
2. Kondisi kualitas kesehatan pada provinsi yang terklasifikasi “kurang” dan “sangat kurang,” harus mengupayakan biaya kesehatan yang terjangkau bahkan gratis, misalnya menentukan standar biaya melahirkan yang terjangkau masyarakat dan serta distribusi tenaga medis secara merata seperti distribusi tenaga penolong kelahiran misalnya dokter/bidan, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar senantiasa bisa melayani masyarakat.
3. Kondisi otonomi daerah juga dilema bagi berlangsungnya program keluarga berencana. Provinsi yang terklasifikasi “kurang” dan “sangat kurang”, tentunya harus mampu merevitalisasi peran keluarga berencana dan penyuluhan tentang seputar usia pernikahan untuk kesehatan reproduksi, sehingga semboyan keluarga berkualitas akan tetap terjaga.
4. Kualitas lingkungan harus segera di tanggulangi pemerintah. Misalkan saja masalah kepemilikan tangki pembuangan air besar, atau penyediaan air bersih. Kualitas lingkungan yang mengalami penurunan kualitas harus sangat menjadi perhatian terutama masalah lingkungan rumah tangga seputar lingkungan rumah tangga.

5. Kualitas sumber daya manusia masih sangat perlu peningkatan kualitas melalui terobosan-terobosan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan-kebijakan politik yang lebih terimplementasi agar lebih dapat terlaksana secara teknis oleh unit-unit kerja di masyarakat.
6. Penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, misalnya dari segi variabel yang digunakan. Bisa jadi masih banyak variabel-variabel lain yang lebih baik atau lebih tepat untuk dipakai tapi tidak termuat dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut.



DAFTAR REFERENSI

Agung, IGN. 1999. *Idikator Kependudukan Strategi Guna Perencanaan Pembangunan Berwawasan Kependudukan* di Tingkat Kabupaten. Lembaga Demografi dan Kantor Negara Kependudukan. Jakarta.

_____. 1998. *Metode Penelitian Sosial, bagian 2; Pengertian dan Pemakaian Praktis*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

_____. 1996. The Development of Composit Indices for the Quality of Life and Human Reources Using Factor Analysis. *Journal of Population*. Vol.2, no.2;208-217. Jakarta.

Agung, IGN dan Isjulianto. 1999. *Studi Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Kalimantan Timur*. Kerja sama Bappeda Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Demografi FEUI. Jakarta

Ananta, Aris 1996. Human Development Index; Kelemahan dan Kekuatan. *Warta Demografi* 2: 16-21

Ananta, Aris dan Hatmadji, Sri Harijati. 1985. *Mutu Modal Manusia Suatu Analisis Pendahuluan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Berg, Alan. 1986. *Peranan Gizi dalam Pembangunan Nasional*. Persatuan gizi Pangan Indonesia dan CV. Rajawali. Jakarta.

Beni, Romanus 1996. Problematik Pengukuran Kinerja Pebangunan Manusia. *Warta Demografi* 2:8-10.

Badan Koordinasi Keluarga Berenca Nasional, 1994. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama RI. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2007. *Produk Domestik Regional Bruto Propisi-Propinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2000*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 1999. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statisik. Jakarta.

Badan Pusat Statistk. 1996. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perbandingan antar Propinsi 1990-1993*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 1996. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

- Djalal Abdoel. 1993. *Pembangunan Manusia : Peningkatan Kualitas Fisik Pendudu*. Pusat Penelitian Pranata Universitas Indonesia. Jakarta.
- Fadjri, P. 2000. *Skala Prioitas Otonomi Daerah di Tinjau dari Sisi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Barat*. Tesis Universitas Indonesia.
- Fadjri, P 2000. *Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Menurut Kota di Indonesia*. *Warta Demografi* (3) hal 34.
- Fathonah, Siti. 2007. *Indonesia Family Planning Program : Moving to The New Era*. Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Fathonah, Siti. 2007. *Dinamika Praktek KB : Pola, Perbedaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Harbinson, Frederick dan Charles A Myers. 1964. *Education, Manpower, and Economic Growth Strategies of Human Resources Development*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Ndraha T. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Najib, Muhammad. 2002. *Kualitas Sumber Daya manusia Tingkat Kabupaten Di Wilayah Kalimantan*. Tesis Universitas Indonesia.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. *Pembangunan Wilayah; Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Sukamdi. 1996 *Pembangunan Manusia di Indonesia. Suatu Agenda*. *Warta Demografi* 2: 22-28.
- Hatmadji, Sri Harijati. Rochani, Sutji. Priyono, Edy. *Perubahan Demografi dan Kesejahteraan Rumah Tangga. Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi* 177-211. Lembaga Demografi dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia. Demografi Politik Pasca Suharto*. LIPI Press Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Tjiptoherijanto P. 1998. *Pemberdayaan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. PT Cita Putra Bangsa. Jakarta.

Tjiptoherijanto, Priyono dan Budhi Susetyo. 1994. *Ekonomi Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Thabrany. 1996. Investasi Kesehatan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Warta Demografi* 2 : 29-36.

The World Bank. 2006. *Laporan Pembangunan Dunia. Kesetaraan dan Pembangunan*. Salemba Empat. Jakarta.

The World Bank. 2007. *Laporan Pembangunan Dunia. Pembangunan dan Generasi Mendatang*. Salemba Empat. Jakarta





Lanjutan

Sulteng	93.04	49.79	36.91	77.52	35.85	67.22	91.2	81.58	26.01	46.95	53.05	57.17	29.38	36.14	46.37	83.4	9.88
Sulsel	88.64	53.43	38.62	58.88	43.19	54.8	92.62	83.36	27.18	47.63	39.1	52.09	29.55	37.91	54.99	95.63	8.99
Sultra	91.5	61.14	39.54	63.06	24.16	60.07	92.88	82.51	22.23	51.32	43.76	53.99	29.13	42.23	37.15	79.59	9.02
Maluku	94.9	65.74	40.66	85.59	31.83	46.89	94.04	84.12	45.23	50.12	40.04	54.27	33.89	41.9	49.61	72.94	7.32
Irian Jaya	81.45	65.41	30.03	55.59	34.88	62.61	95.49	83.54	33.03	48.95	41.54	66.47	32.96	26.29	32.32	83.35	5.39
Indonesia	93.94	59.88	36.36	67.54	46.13	65.2	93.55	83.26	21.88	46.86	55.15	60.32	33.35	43.53	66.71	76.45	11.33



Kalsel	96.4	63.35	48.6	65.6	60.8	77.99	94.9	84.1	25.4	43.3	66.71	65.4	34.9	54.2	89.5	3.53	21.8
Kaltim	97.5	77.18	63.5	68.3	77	89.24	94.9	81.9	36.5	44.2	54.67	60.5	44.9	62.4	92.2	4.44	40
Sulut	97.4	71.96	65.8	95.8	75	93.07	97.9	85.8	49.5	40.7	69.76	59.2	37.7	58.4	94.9	9.5	35.9
Sulteng	97.1	64.87	49.9	69.8	47.4	81.51	95.4	86.7	34.5	44.5	54.69	61.7	34.8	41.1	69.4	12.5	25.5
Sulse	95.1	64.93	52.5	59.1	54.1	80.1	95	86.8	38.3	44.8	42.58	56.1	36.6	51.2	85.2	6.24	35.1
Sultra	97	71.22	55.6	67	33.4	79.73	95.3	86.6	30.8	49.3	46.8	59.3	34.7	53	65.3	14.3	26
Gorontalo	93.4	63.3	36.4	65.9	35.9	83.62	96	86	39.8	44.9	61.24	57.9	33.6	40.2	66.6	13.8	13
Sulbar	94	58.9	38.1	62.2	21	68	94.7	88.1	28.5	48.7	38.82	62.1	30.7	32.6	64.7	8.83	16.4
Maluku	97.6	80.54	58.9	82.8	44.4	72.27	97	86.5	46.1	48.6	30.12	56.8	33.8	55.1	69.8	23.2	22.9
Malut	97.4	75.46	51	75.8	26.6	75.21	96.2	89.9	34.9	47.6	39.61	62	36.1	42.5	63.1	26.1	25.4
IrijaBarat	90.9	73.04	45.5	76.3	50.6	82.34	98	84.3	46	48.8	31.73	62.8	36.3	37.6	60.9	19.7	23.7
Papua	80.4	65.79	38	57.8	48.6	76.56	97.5	86.5	31.2	47.6	31.2	72.3	37.4	28.5	40	31	16.7
Indonesia	97.4	69.1	53.5	66.3	67	86.2	95.2	84.6	31.6	44	57.9	64.2	40.4	49.7	91	16.4	34

Lampiran 3. Program Pengolahan Data

1. Program pembentukan faktor

```

FACTOR
/VARIABLES dik1 dik2 dik3 dik4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS dik1 dik2 dik3
dik4
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

```

```

COMPUTE Ieduc = RND(RND(101+10*Feduc)) .
EXECUTE .

```

```

RANK
VARIABLES=Feduc (A) /RANK /PRINT=YES
/TIES=MEAN .

```

```

FACTOR
/VARIABLES kes1 kes2 kes3 kes4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS kes1 kes2
kes3 kes4
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

```

```

COMPUTE Ihealt = RND(RND(101+10*Fhealt)) .
EXECUTE .RANK

```

```

VARIABLES=Fhealt (A) /RANK /PRINT=YES
/TIES=MEAN .

```

```

FACTOR
/VARIABLES krt1 krt2 krt3 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS krt1 krt2 krt3
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)

```

```

/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

```

```

COMPUTE lkrt = RND(RND(101+10*Fkrt)) .
EXECUTE .

```

```

RANK
VARIABLES=Fkrt (A) /RANK /PRINT=YES
/TIES=MEAN .

```

```

FACTOR
/VARIABLES ae1 ae2 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS ae1 ae2
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

```

```

COMPUTE laek = RND(RND(101+10*Faek)) .
EXECUTE .

```

```

RANK
VARIABLES=Faek (A) /RANK /PRINT=YES
/TIES=MEAN .

```

```

FACTOR
/VARIABLES env1 env2 env3 env4 /MISSING LISTWISE /ANALYSIS env1 env2
env3 env4
/PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .

```

```
COMPUTE Ienv = RND(RND(101+10*Fenv)) .
EXECUTE .
```

```
RANK
  VARIABLES=Ftot (A) /RANK /PRINT=YES
  /TIES=MEAN .
```

```
FACTOR
  /VARIABLES Feduc Fhealt Fkrt Fenv /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Feduc
  Fhealt Fkrt Fenv
  /PRINT UNIVARIATE INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
  /EXTRACTION PC
  /CRITERIA ITERATE(25)
  /ROTATION VARIMAX
  /SAVE REG(ALL)
  /METHOD=CORRELATION .
```

```
COMPUTE Itot = RND(RND(101+10*Ftot)) .
EXECUTE .
```

```
RANK
  VARIABLES=Ftot (A) /RANK /PRINT=YES
  /TIES=MEAN .
```

2. Program Pembentukan Skor/Klasifikasi

```
RECODE
  FEduc
  (1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru
  -1.5=5) INTO REduc .
EXECUTE .
```

```
RECODE
  FHealt
  (1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru
  -1.5=5) INTO RHealt .
EXECUTE .
```

RECODE

FKrt

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO RKrt.

EXECUTE .

RECODE

FAe

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO RAe .

EXECUTE .

RECODE

FEnv

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO REnv .

EXECUTE .

RECODE

FKH

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO RKH .

EXECUTE .

RECODE

FKH2

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO RKH2 .

EXECUTE .

RECODE

FEnv1

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO REnv1 .

EXECUTE .

RECODE

Ftot

(1.5 thru Highest=1) (0.5 thru 1.5=2) (-0.5 thru 0.5=3) (-1.5 thru -0.5=4) (Lowest thru -1.5=5) INTO Rtot .

EXECUTE .

3. Program Analisis Korelasi Spearman.

```
NONPAR CORR  
/VARIABLES=IKSDM95 IPM99  
/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE .
```

```
NONPAR CORR  
/VARIABLES=IKSDM06 IPM05  
/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG  
/MISSING=PAIRWISE .
```



Lampiran 4. Hasil analisis Faktor

Hasil Analisis Faktor Indikator Pendidikan Tahun 1995 Tahap 1

Hasil Analisis Faktor Indikator Pendidikan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
dik1	92.5704	5.35861	28
dik2	60.6207	8.40808	28
dik3	37.8171	9.57790	28
dik4	69.6814	16.79134	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.627
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	54.987
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
dik1	1.000	.719
dik2	1.000	.523
dik3	1.000	.831
dik4	1.000	.588

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.660	66.499	66.499	2.660	66.499	66.499
2	.889	22.235	88.734			
3	.293	7.327	96.061			
4	.158	3.939	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Compone nt
	1
dik1	.848
dik2	.723
dik3	.911
dik4	.767

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kesehatan**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
kes1	46.5850	18.14681	28
kes2	64.5332	11.43300	28
kes3	93.7196	1.83303	28
kes4	83.6564	1.35055	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.537
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	15.107
	df	6
	Sig.	.019

Communalities

	Initial	Extraction
kes1	1.000	.738
kes2	1.000	.648
kes3	1.000	.765
kes4	1.000	.813

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.766	44.139	44.139	1.766	44.139	44.139	1.766	44.139	44.139
2	1.198	29.962	74.101	1.198	29.962	74.101	1.198	29.962	74.101
3	.623	15.582	89.684						
4	.413	10.316	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
kes1	.858	-.052
kes2	.647	-.479
kes3	.780	.395
kes4	.050	.900

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
kes1	.858	-.053
kes2	.646	-.480
kes3	.781	.394
kes4	.052	.900

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 2 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	1.000	-.002
2	.002	1.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kesehatan setelah Kes4 Dikeluarkan Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
kes1	46.5850	18.14681	28
kes2	64.5332	11.43300	28
kes3	93.7196	1.83303	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.576
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	12.096
	df	3
	Sig.	.007

Communalities

	Initial	Extraction
kes1	1.000	.739
kes2	1.000	.432
kes3	1.000	.593

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.765	58.819	58.819	1.765	58.819	58.819
2	.794	26.471	85.290			
3	.441	14.710	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
kes1	.860
kes2	.658
kes3	.770

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Indikator Kualitas Rumah Tangga

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
krt1	28.6314	10.17257	28
krt2	48.4393	3.67160	28
krt3	52.0654	11.15785	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.430
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	8.209
	df	3
	Sig.	.042

Communalities

	Initial	Extraction
krt1	1.000	.942
krt2	1.000	.816
krt3	1.000	.780

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	of Variance	Cumulative %	Total	of Variance	Cumulative %	Total	of Variance	Cumulative %
1	1.492	49.719	49.719	1.492	49.719	49.719	1.455	48.487	48.487
2	1.046	34.859	84.578	1.046	34.859	84.578	1.083	36.091	84.578
3	.463	15.422	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
krt1	.304	.922
krt2	.790	-.437
krt3	-.880	-.074

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix

	Component	
	1	2
krt1	.026	.970
krt2	.883	-.191
krt3	-.821	-.324

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.958	.288
2	-.288	.958

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kualitas Rumah Tangga setelah krt1 Dikeluarkan**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
krt2	48.4393	3.67160	28
krt3	52.0654	11.15785	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	6.115
	df	1
	Sig.	.013

Communalities

	Initial	Extraction
krt2	1.000	.731
krt3	1.000	.731

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.462	73.087	73.087	1.462	73.087	73.087
2	.538	26.913	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
krt2	-.855
krt3	.855

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Aktivitas Ekonomi

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
ae1	60.8625	4.40200	28
ae2	31.4064	5.32742	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1.398
	df	1
	Sig.	.237

Communalities

	Initial	Extraction
ae1	1.000	.615
ae2	1.000	.615

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.231	61.547	61.547	1.231	61.547	61.547
2	.769	38.453	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
ae1	-.785
ae2	.785

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Lingkungan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
env1	38.1743	15.95089	28
env2	55.9818	19.31098	28
env3	81.2004	17.54525	28
env4	9.4568	4.29966	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.448
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	27.196
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
env1	1.000	.767
env2	1.000	.873
env3	1.000	.854
env4	1.000	.512

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.939	48.476	48.476	1.939	48.476	48.476	1.821	45.537	45.537
2	1.067	26.666	75.142	1.067	26.666	75.142	1.184	29.606	75.142
3	.789	19.736	94.879						
4	.205	5.121	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
env1	.847	-.222
env2	.923	.144
env3	.366	.848
env4	.485	-.526

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
env1	.870	.104
env2	.806	.473
env3	.029	.923
env4	.644	-.312

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.930	.367
2	-.367	.930

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Analisis Faktor Indikator Lingkungan setelah env3 Dikeluarkan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
env1	38.1743	15.95089	28
env2	55.9818	19.31098	28
env4	9.4568	4.29966	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.561
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	20.218
	df	3
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
env1	1.000	.794
env2	1.000	.795
env4	1.000	.284

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.873	62.422	62.422	1.873	62.422	62.422
2	.844	28.134	90.556			
3	.283	9.444	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
env1	.891
env2	.892
env4	.533

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix

- a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Pendidikan Tahun 2006 Tahap 1

Hasil Analisis Faktor Indikator Pendidikan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
dik1	96.5085	3.32658	34
dik2	70.2962	6.25545	34
dik3	53.3056	9.83792	34
dik4	69.0865	10.91886	34

Correlation Matrix

		dik1	dik2	dik3	dik4
Correlation	dik1	1.000	.360	.569	.139
	dik2	.360	1.000	.743	.108
	dik3	.569	.743	1.000	.161
	dik4	.139	.108	.161	1.000

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.590
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	38.201
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
dik1	1.000	.543
dik2	1.000	.698
dik3	1.000	.853
dik4	1.000	.084

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.177	54.425	54.425	2.177	54.425	54.425
2	.956	23.907	78.332			
3	.654	16.348	94.680			
4	.213	5.320	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
dik1	.737
dik2	.835
dik3	.923
dik4	.290

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kesehatan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
kes1	61.9874	19.16602	34
kes2	84.0535	6.87382	34
kes3	96.0776	1.53191	34
kes4	85.7571	2.02929	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.554
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	34.354
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
kes1	1.000	.846
kes2	1.000	.720
kes3	1.000	.971
kes4	1.000	.582

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.116	52.910	52.910	2.116	52.910	52.910	2.026	50.662	50.662
2	1.002	25.051	77.960	1.002	25.051	77.960	1.092	27.298	77.960
3	.640	15.991	93.952						
4	.242	6.048	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
kes1	.916	.082
kes2	.823	-.207
kes3	.325	.930
kes4	-.703	.295

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
kes1	.855	.339
kes2	.848	.035
kes3	.047	.984
kes4	-.758	.083

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.959	.284
2	-.284	.959

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kesehatan setelah kes3 Dikeluarkan

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
kes1	61.9874	19.16602	34
kes2	84.0535	6.87382	34
kes4	85.7571	2.02929	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.627
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	29.294
	df	3
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
kes1	1.000	.807
kes2	1.000	.719
kes4	1.000	.533

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.059	68.633	68.633	2.059	68.633	68.633
2	.648	21.613	90.246			
3	.293	9.754	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
kes1	.898
kes2	.848
kes4	-.730

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix

- a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kualitas Rumah Tangga

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
krt1	36.3647	9.19218	34
krt2	45.5135	3.69633	34
krt3	54.0050	11.79563	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.359
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	17.466
	df	3
	Sig.	.001

Communalities

	Initial	Extraction
krt1	1.000	.941
krt2	1.000	.877
krt3	1.000	.853

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	of Variance	Cumulative %	Total	of Variance	Cumulative %	Total	of Variance	Cumulative %
1	1.555	51.825	51.825	1.555	51.825	51.825	1.515	50.486	50.486
2	1.116	37.209	89.033	1.116	37.209	89.033	1.156	38.547	89.033
3	.329	10.967	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component	
	1	2
krt1	.299	.923
krt2	.793	-.498
krt3	-.914	-.130

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component	
	1	2
krt1	.006	.970
krt2	.907	-.235
krt3	-.832	-.401

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2
1	.953	.303
2	-.303	.953

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kualitas Rumah Tangga setelah krt1 Dikeluarkan**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
krt2	45.5135	3.69633	34
krt3	54.0050	11.79563	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	10.208
	df	1
	Sig.	.001

Communalities

	Initial	Extraction
krt2	1.000	.763
krt3	1.000	.763

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.526	76.306	76.306	1.526	76.306	76.306
2	.474	23.694	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
krt2	-.874
krt3	.874

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Hasil Analisis Faktor Indikator Kualitas Aktivitas Ekonomi**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
ae1	63.4094	4.51639	34
ae2	38.0624	5.92636	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.500
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1.678
	df	1
	Sig.	.195

Communalities

	Initial	Extraction
ae1	1.000	.614
ae2	1.000	.614

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.228	61.388	61.388	1.228	61.388	61.388
2	.772	38.612	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
ae1	.784
ae2	.784

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Lingkungan**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
env1	45.8712	12.85469	34
env2	80.1465	15.81821	34
env3	13.7106	10.03298	34
env4	29.7332	10.98230	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.672
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	57.634
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
env1	1.000	.487
env2	1.000	.848
env3	1.000	.368
env4	1.000	.829

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.531	63.281	63.281	2.531	63.281	63.281
2	.959	23.986	87.267			
3	.291	7.282	94.549			
4	.218	5.451	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
env1	.698
env2	.921
env3	-.607
env4	.910

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Tahap 2

Hasil Analisis Faktor Indikator Gabungan/Indikator Total Tahun 1995

Factor Analysis

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
Feduc	.0000000	1.0000000	28
Fhealt	.0000000	1.0000000	28
Fae	.0000000	1.0000000	28
Fenv	.0000000	1.0000000	28

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.593
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	85.956
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
Feduc	1.000	.862
Fhealt	1.000	.814
Fae	1.000	.492
Fenv	1.000	.838

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.007	75.169	75.169	3.007	75.169	75.169
2	.689	17.237	92.406			
3	.241	6.023	98.429			
4	.063	1.571	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Compon ent
	1
Feduc	.928
Fhealt	.902
Fae	.702
Fenv	.916

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

Hasil Analisis Faktor Indikator Gabungan/Indikator Total Tahun 2006**Factor Analysis****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
Feduc	.0000000	1.0000000	34
Fhealt	.0000000	1.0000000	34
Fae	.0000000	1.0000000	34
Fenv	.0000000	1.0000000	34

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.658
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	44.711
	df	6
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
Feduc	1.000	.494
Fhealt	1.000	.779
Fae	1.000	.488
Fenv	1.000	.657

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.420	60.491	60.491	2.420	60.491	60.491
2	.913	22.836	83.327			
3	.405	10.117	93.444			
4	.262	6.556	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component
	1
Feduc	.703
Fheat	-.883
Fae	.699
Fenv	.811

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

a. Only one component was extracted.
The solution cannot be rotated.

REPUBLIK INDONESIA
BIRO PUSAT STATISTIK

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 1995

KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA DAN
ANGGOTA RUMAH TANGGA

Rahasia

I. PENGERALAN TEMPAT			
01	Propinsi		<input type="text"/>
02	Kabupaten/kotamadya *)		<input type="text"/>
03	Kecamatan		<input type="text"/>
04	Desa/kelurahan *)		<input type="text"/>
05	D a e r a h	Perkotaan 1 Perdesaan 2	<input type="text"/>
06	Nomor wilayah pencacahan		<input type="text"/>
07	Nomor kelompok segmen		<input type="text"/>
08	Nomor segmen		<input type="text"/>
09	Nomor kode sampel Susenas		<input type="text"/>
10	Nomor urut rumah tangga sampel		<input type="text"/>
11	Klasifikasi desa	diisi Editor <input type="text"/>	Kode Pengolahan
			diisi BPS <input type="text"/>
II. KETERANGAN RUMAH TANGGA			
01	Nama kepala rumah tangga:	04	Banyaknya art yang bersekolah: <input type="text"/>
02	Jumlah anggota rumah tangga: <input type="text"/>	05	Banyaknya art yang meninggal setahun yl.: <input type="text"/>
03	Banyaknya anak usia 0-4 tahun: <input type="text"/>	06	Pernahkah rumah tangga ini terkena tindak kejahatan selama setahun yl.? Ya 1 Tidak 2 <input type="text"/>
III. KETERANGAN PENCACAHAN			
01	Nama dan NIP/NMS pencacah: <input type="text"/>	05	Nama dan NIP/NMS pengawas/pemeriksa: <input type="text"/>
02	Jabatan pencacah: Staf KS Propinsi 1 Mantis 3 <input type="text"/> Staf KS Kab/Kodya 2 Mitra 4	06	Jabatan pengawas/pemeriksa: Staf KS Propinsi 1 Mantis 3 <input type="text"/> Staf KS Kab/Kodya 2 Mitra 4
03	Tanggal pencacahan:	07	Tanggal pengawasan/pemeriksaan:
04	Tanda tangan pencacah:	08	Tanda tangan pengawas/pemeriksa:

*) Coret yang tidak perlu

IV. KETERANGAN ANGGOTA RUMAHTANGGA

No.	Nama anggota rumahtangga (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rumahtangga ini baik dewasa, anak-anak maupun bayi)	Hubungan dengan kepala rumahtangga (kode)	Jenis kelamin Lk 1 Pr 2	Umur (tahun)	Status perkawinan (kode)	Terkena tindak kejahatan selama 1 tahun yl.	Melakukan perjalanan nonrutin selama 3 bln yl. (kode)	Hanya utk art berumur 5 th ke atas
						Ya 1 Tidak 2		Partisipasi sekolah (kode)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ANGGOTA RUMAHTANGGA YANG MENINGGAL (TERMASUK LAHIR MATI) DALAM SETAHUN YANG LALU

01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kode Kolom 3:
Hubungan dengan kepala rumahtangga

Kode Kolom 6:
Status perkawinan

Kode Kolom 9:
Partisipasi sekolah

Kepala rt 1
Istri/suami 2
Anak 3
Menantu 4
Cucu 5

Orang tua/ mertua 6
Famili lain 7
Pembantu rt 8
Lainnya 9

Belum kawin 1
Kawin 2
Cerai hidup 3
Cerai mati 4

Masih bersekolah 1
Tidak bersekolah 2

Terkena tindak kejahatan adalah terkena tindakan orang lain yang diancam hukuman, baik sengaja atau tidak sengaja, telah terjadi maupun baru percobaan, yang dapat menyebabkan cacat atau hilangnya badan/jiwa, harta benda, atau kehormatan dan tindakan tersebut diancam dengan hukuman

Jenis tindak kejahatan:

- Pembunuhan
- Penganiayaan berat
- Penganiayaan ringan
- Penculikan/perampasan kemerdekaan
- Pencurian dengan kekerasan
- Pencurian dengan pemberatan
- Pencurian ringan
- Pembakaran
- Perusakan
- Penggelapan
- Penipuan
- Perkosaan
- Penghinaan
- Perzinaan
- Narkotika
- Perjudian
- Lainnya

Melakukan perjalanan adalah selesai bepergian nonrutin kurang dari 6 bulan ke:

- a. Obyek wisata
- b. Bukan obyek wisata dengan jarak ≥ 100 km (pp) atau lebih dari 24 jam
- c. Bukan obyek wisata dengan jarak < 100 km (pp) ≤ 24 jam tetapi menginap di akomodasi komersial

Kode Kolom 8:
Ke obyek wisata 1
Ke bukan obyek wisata ≥ 24 jam 2
Ke bukan obyek wisata < 24 jam jarak perjalanan ≥ 100 km (pp) 3
Ke bukan obyek wisata < 24 jam jarak perjalanan < 100 km (pp), menginap di akomodasi komersial 4
Tidak melakukan perjalanan 5

V. KETERANGAN PERORANGAN, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN				HANYA UNTUK ANAK UMUR 0-4 TAHUN		
Nama: No.urut:..... No.urut ibu kandung: (Isi 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rumah tangga ini)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5.a. Umur dalam bulan: bln	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
1. Apakah sebulan yang lalu mempunyai keluhan kesehatan seperti di bawah ini? (Isikan kode 1 bila ada, kode 0 bila tidak)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	b. Siapa yang menolong proses kelahiran? Dokter 1 Dukun 4 Bidan 2 Famili 5 Tenaga medis lain 3 Lainnya 6	<input type="checkbox"/>		
a. Panas b. Sakit kepala/pusing c. Batuk d. Batuk panjang e. Pilek f. Diare/buang ² air g. Sesak napas h. Asma i. Sakit gigi (Jika semua berkode 0, ke R.6)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9. Apakah pernah disusui? Ya 1 Tidak 2 [R.11]	<input type="checkbox"/>		
j. Kejang-kejang k. Lumpuh l. Telinga berair m. Campak n. Sakit kuning o. Kecelakaan dlm rumah p. Kecelakaan lalu lintas q. Kecelakaan lain r. Lainnya		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10.a. Lama disusui (bulan): b. Tanpa makanan/minuman tambahan: c. Dengan makanan/minuman tambahan: d. (Khusus untuk anak di bawah 1 thn) Dalam 24 jam terakhir apakah anak? Diberi ASI saja 1 Diberi ASI + makanan/minuman tambahan 2 Tidak diberi ASI 3	<input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari? Ya 1 Tidak 2 [R.5]		<input type="checkbox"/>	11. Pernah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio, atau Campak/Morbili? Ya; ada kartu 1 Ya; tidak ada kartu 2 Tidak; ada kartu 3 Tidak; tak ada kartu 4 → SELESAI	<input type="checkbox"/>		
3. Bila ya di R.2, berapa lama? hari		<input type="checkbox"/>	12. Bila ya di R.11, jenis imunisasi: (Umlahkan kode bila lebih dari satu) B C G 1 Polio 4 D P T 2 Campak/Morbili 8	<input type="checkbox"/>		
4. Apakah sekarang masih merasa terganggu? Ya 1 Tidak 2		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
5. Apakah berobat? Ya 1 Tidak 2		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
6. Apakah melakukan konsultasi/atau pemeriksaan kesehatan? Ya 1 Tidak 2 (R.5 dan R.6 berkode 2, ke R.8 atau R.14)		<input type="checkbox"/>	13. Jika pernah mendapat imunisasi DPT dan atau Polio, berapa kali masing-masing? DPT: kali Polio: kali	<input type="checkbox"/>	DPT' Polio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. Frekuensi berobat atau konsultasi kesehatan:				HANYA UNTUK UMUR 5 TAHUN KE ATAS		
Pelayanan	Rawat jalan (kali)	Rawat inap (hari)	Konsultasi (check up) (kali)	14. Partisipasi bersekolah: Tdk/blm pernah bersekolah 1 [R.18] Masih bersekolah 2 Tidak bersekolah lagi 3		
(1)	(2)	(3)	(4)	15. Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki: SD 1 Diploma I/II 6 SMP Umum 2 Akademi/ 7 SMP Kejuruan 3 Diploma III 7 SMA Umum 4 Universitas/ 8 SMA Kejuruan 5 Diploma IV 8		
a. RS pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Pengelola pendidikan: Pemerintah: Swasta: Non-agama 1 Non-agama 3 Agama 2 Agama 4		
b. RS swasta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: 1 2 3 4 5 6 7 8 [tamati]		
c. Praktek dokter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d. Puskesmas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e. Puskesmas pembantu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
f. Klinik/KIA/BP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
g. Posyandu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
h. Praktek petugas kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
i. Dukun/tabib/sinse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
j. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
k. Diobati sendiri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

V. LANJUTAN	VI. LANJUTAN																																																																																																								
<p><input checked="" type="checkbox"/> 17. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tidak/belum tamat SD</td> <td>1</td> <td>SMA Kejuruan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>SD</td> <td>2</td> <td>Diploma I/II</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>SMP Umum</td> <td>3</td> <td>Akademi/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SMP Kejuruan</td> <td>4</td> <td>Diploma III</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>SMA Umum</td> <td>5</td> <td>Universitas/</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Diploma IV</td> <td>9</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 18. Dapat berbahasa Indonesia?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 Tidak 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 19. Dapat membaca dan menulis?</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Huruf latin</td> <td>1</td> <td>Tidak dapat</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Huruf lainnya</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tidak/belum tamat SD	1	SMA Kejuruan	6	SD	2	Diploma I/II	7	SMP Umum	3	Akademi/		SMP Kejuruan	4	Diploma III	8	SMA Umum	5	Universitas/				Diploma IV	9	Huruf latin	1	Tidak dapat	3	Huruf lainnya	2			<p><input checked="" type="checkbox"/> 27. Apakah sedang mencari pekerjaan?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 Tidak 2</p> <p><input type="checkbox"/> 28. Mendengarkan radio selama seminggu yl.?</p> <p style="text-align: center;">Ya, rata-rata/hari jam Tidak 9</p> <p><input type="checkbox"/> 29. Menonton acara televisi selama seminggu yl.?</p> <p style="text-align: center;">Ya, rata-rata/hari jam Tidak 9</p> <p><input type="checkbox"/> 30. Membaca surat kabar/majalah selama seminggu yl.?</p> <p style="text-align: center;">Ya, rata-rata/hari jam Tidak 9</p>																																																																								
Tidak/belum tamat SD	1	SMA Kejuruan	6																																																																																																						
SD	2	Diploma I/II	7																																																																																																						
SMP Umum	3	Akademi/																																																																																																							
SMP Kejuruan	4	Diploma III	8																																																																																																						
SMA Umum	5	Universitas/																																																																																																							
		Diploma IV	9																																																																																																						
Huruf latin	1	Tidak dapat	3																																																																																																						
Huruf lainnya	2																																																																																																								
VI. KEGIATAN ART BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS																																																																																																									
<p><input checked="" type="checkbox"/> 20. Kegiatan yang terbanyak dilakukan selama seminggu yl.:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bekerja</td> <td>1</td> <td>Mengurus rumah tangga</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>[R.23] <-----</td> <td></td> <td>Lainnya</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sekolah</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> 21. Jika Rincian 20 bukan berkode 1, apakah bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yl.?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 [R.23] Tidak 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 22. Jika Rincian 21 berkode 2, apakah punya pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu yl.?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 Tidak 2 [R.27]</p> <p>23. a. Jumlah hari kerja: hari</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yl.</p> <p style="margin-left: 40px;">Hari ke:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>Jumlah</td> </tr> <tr> <td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>..... Jam</td> </tr> </table> <p>24. Jenis pekerjaan utama selama seminggu yang lalu (tulis selengkap mungkin):</p> <p>.....</p> <p>25. Lapangan usaha (pekerjaan) utama selama seminggu yl.:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Pertanian</td> <td>1</td> <td>Perdagangan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Pertambangan & penggalian</td> <td>2</td> <td>Angkutan & komunikasi</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> <td>3</td> <td>Keuangan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Listrik, gas, dan air</td> <td>4</td> <td>Jasa</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Konstruksi</td> <td>5</td> <td>Lainnya</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>26. Status pekerjaan utama selama seminggu yl.:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga/buruh tidak tetap</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Berusaha dengan buruh tetap</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Buruh/karyawan pemerintah</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Buruh/karyawan swasta/BUMH</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Pekerja keluarga</td> <td>6</td> </tr> </table>	Bekerja	1	Mengurus rumah tangga	3	[R.23] <-----		Lainnya	4	Sekolah	2			1	2	3	4	5	6	7	Jumlah Jam	Pertanian	1	Perdagangan	6	Pertambangan & penggalian	2	Angkutan & komunikasi	7	Industri	3	Keuangan	8	Listrik, gas, dan air	4	Jasa	9	Konstruksi	5	Lainnya	0	Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	1	Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga/buruh tidak tetap	2	Berusaha dengan buruh tetap	3	Buruh/karyawan pemerintah	4	Buruh/karyawan swasta/BUMH	5	Pekerja keluarga	6	<p style="text-align: center;">VII. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p style="text-align: center;">WANITA PERNAH KAWIN (Blok IV K.4= 2, K.6= 2,3,4)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 31. Umur pada saat perkawinan pertama:</p> <p style="text-align: center;">..... tahun</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 32. Jumlah anak yang dilahirkan:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Lk</th> <th>Pr</th> <th>Lk+Pr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Lahir hidup</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Masih hidup</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">b.1. Tinggal dalam rt ini</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="margin-left: 20px;">b.2. Tinggal di luar rt ini</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Sudah meninggal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">a. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="margin-left: 20px;">c. <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="margin-left: 20px;">dfisi Editor</p> <p style="text-align: center;">WANITA BERUMUR < 50 TAHUN DAN BERSTATUS KAWIN (Blok IV K.4= 2, K.5< 50, K.6= 2) =Harus ditanyakan kepada yang bersangkutan=</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 33. Pernah menggunakan/memakai alat/cara KB?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 Tidak 2 (B.VIII) <-----</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 34. Sedang menggunakan/memakai alat/cara KB?</p> <p style="text-align: center;">Ya 1 Tidak 2 (B.VIII) <-----</p> <p><input type="checkbox"/> 35. Alat/cara yang sedang digunakan/dipakai:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MOW/tubektomi</td> <td>1</td> <td>Kondom</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>MOP/vasektomi</td> <td>2</td> <td>Susuk KB</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>AKDR/IUD</td> <td>3</td> <td>Lainnya</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Suntikan</td> <td>4</td> <td>Alat/cara tradisional</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>P I L</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Lk	Pr	Lk+Pr	a. Lahir hidup				b. Masih hidup				b.1. Tinggal dalam rt ini				b.2. Tinggal di luar rt ini				c. Sudah meninggal				MOW/tubektomi	1	Kondom	6	MOP/vasektomi	2	Susuk KB	7	AKDR/IUD	3	Lainnya	8	Suntikan	4	Alat/cara tradisional	9	P I L	5		
Bekerja	1	Mengurus rumah tangga	3																																																																																																						
[R.23] <-----		Lainnya	4																																																																																																						
Sekolah	2																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	Jumlah																																																																																																		
..... Jam																																																																																																		
Pertanian	1	Perdagangan	6																																																																																																						
Pertambangan & penggalian	2	Angkutan & komunikasi	7																																																																																																						
Industri	3	Keuangan	8																																																																																																						
Listrik, gas, dan air	4	Jasa	9																																																																																																						
Konstruksi	5	Lainnya	0																																																																																																						
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	1																																																																																																								
Berusaha dengan dibantu pekerja keluarga/buruh tidak tetap	2																																																																																																								
Berusaha dengan buruh tetap	3																																																																																																								
Buruh/karyawan pemerintah	4																																																																																																								
Buruh/karyawan swasta/BUMH	5																																																																																																								
Pekerja keluarga	6																																																																																																								
	Lk	Pr	Lk+Pr																																																																																																						
a. Lahir hidup																																																																																																									
b. Masih hidup																																																																																																									
b.1. Tinggal dalam rt ini																																																																																																									
b.2. Tinggal di luar rt ini																																																																																																									
c. Sudah meninggal																																																																																																									
MOW/tubektomi	1	Kondom	6																																																																																																						
MOP/vasektomi	2	Susuk KB	7																																																																																																						
AKDR/IUD	3	Lainnya	8																																																																																																						
Suntikan	4	Alat/cara tradisional	9																																																																																																						
P I L	5																																																																																																								

VIII. PERUMAHAN, FASILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				IX. PENGELUARAN RATA-RATA RUMAH TANGGA SEBULAN DAN SUMBER PENGHASILAN UTAMA RUMAH TANGGA	
1. Luas lantai: m ²		<input type="checkbox"/>		A. Pengeluaran untuk makanan selama seminggu yang lalu	Rp.
2. Jenis dinding terluas:		<input type="checkbox"/>		(1)	(2)
Tembok 1	Bambu 3	<input type="checkbox"/>		1. Padi-padian (beras, jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll.)	
Kayu 2	Lainnya 4	<input type="checkbox"/>		2. Umbi-umbian (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu, dan lainnya)	
3. Jenis atap terluas:		<input type="checkbox"/>		3. Ikan (ikan segar, ikan diawetkan/asin, udang, dan lainnya)	
Beton 1	Ijuk 5	<input type="checkbox"/>		4. Daging (daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, hati, limpa, abon, dendeng, dll.)	
Kayu 2	Daun-daunan 6	<input type="checkbox"/>		5. Telur dan susu (telur ayam/itik/puyuh, susu segar, susu kental, susu bubuk, dan lainnya)	
Genteng 3	Lainnya 7	<input type="checkbox"/>		6. Sayur-sayuran (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll.)	
Seng/asbes 4		<input type="checkbox"/>		7. Kacang-kacangan (kacang tanah/hijau/kedele/merah/tunggak/mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll.)	
4. Jenis lantai terluas:		<input type="checkbox"/>		8. Buah-buahan (jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll.)	
Marmer/keramik/teraso 1	Kayu 4	<input type="checkbox"/>		9. Minyak dan lemak (minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll.)	
Ubun/tegel 2	Bambu 5	<input type="checkbox"/>		10. Bahan minuman (gula pasir, teh, kopi, coklat, sirup, dll.)	
Semer/bata merah 3	Tanah 6	<input type="checkbox"/>		11. Bumbu-bumbuan (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, gula merah, vetsin, dll.)	
Lainnya 7		<input type="checkbox"/>		12. Konsumsi lainnya (kerupuk, emping, mie, bihun, makaroni, dll.)	
5. Sumber penerangan:		<input type="checkbox"/>		13. Makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, es sirup, limun, gado-gado, nasi rames, dll.)	
Listrik PLN 1	Pelita/sentir/obor 4	<input type="checkbox"/>		14. Minuman mengandung alkohol (bir, anggur, dan minuman keras lainnya)	
Listrik non-PLN 2	Lainnya 5	<input type="checkbox"/>		15. Tembakau dan sirih (rokok kretek, rokok putih, cerutu, tembakau, sirih, pinang, dan lainnya)	
Petromak/aladin 3		<input type="checkbox"/>		16. Jumlah makanan (rincian 1 s.d. 15)	
6. Fasilitas air minum:		<input type="checkbox"/>			
Sendiri 1	Umum 3	<input type="checkbox"/>			
Bersama 2	Lainnya 4	<input type="checkbox"/>			
7. Cara memperoleh air minum:		<input type="checkbox"/>			
Membeli 1	Tidak membeli 2	<input type="checkbox"/>			
8. Sumber air minum:		<input type="checkbox"/>			
Leding 1	Mata air tak terlindung 6	<input type="checkbox"/>			
Pompa 2	Air sungai 7	<input type="checkbox"/>			
Sumur terlindung 3	Air hujan 8	<input type="checkbox"/>			
Sumur tak terlindung 4	Lainnya 9	<input type="checkbox"/>			
Mata air terlindung 5		<input type="checkbox"/>			
9. Jika R.8 = 2 s.d. 6 (pompa/sumur/mata air) jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat:		<input type="checkbox"/>			
< 6 m 1	≥ 16 m 4	<input type="checkbox"/>			
6 - 10 m 2	Tidak tahu 5	<input type="checkbox"/>			
11 - 15 m 3		<input type="checkbox"/>			
10. Fasilitas tempat buang air besar:		<input type="checkbox"/>			
Sendiri 1	Umum 3	<input type="checkbox"/>			
Bersama 2	Lainnya 4	<input type="checkbox"/>			
11. Tempat pembuangan air besar:		<input type="checkbox"/>			
Leher angsa 1	Cemplung/cubluk 3	<input type="checkbox"/>			
Piengsengan 2	Lainnya 4	<input type="checkbox"/>			
12. Tempat penampungan akhir:		<input type="checkbox"/>			
Tangki 1		<input type="checkbox"/>			
Kolam/sawah 2		<input type="checkbox"/>			
Sungai/danau 3		<input type="checkbox"/>			
Lobang tanah 4		<input type="checkbox"/>			
Pantai/tanah terbuka 5		<input type="checkbox"/>			
Lainnya 6		<input type="checkbox"/>			

IX. PENGELUARAN RATA-RATA RUMAHTANGGA SEBULAN DAN SUMBER PENGHASILAN UTAMA RUMAHTANGGA

8. Pengeluaran bukan makanan selama sebulan dan 12 bulan yang lalu	Sebulan yang lalu (Rp.)	12 bulan yang lalu (Rp.)
(1)	(2)	(3)
17. Perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air (sewa, perkiraan sewa rumah sendiri, listrik, minyak tanah, air, kayu, dll.)		
18. Aneka barang dan jasa (sabun mandi, kecantikan, pengangkutan, bacaan, pembuatan KTP/SIM, rekreasi, dan lainnya)		
19. Biaya pendidikan (uang pangkal/daftar ulang, SPP/POMG, pramuka, prakarya, dan lainnya)		
20. Biaya kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan, dan lainnya)		
21. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala (bahan pakaian, pakaian jadi, sepatu, topi, sabun cuci dan lainnya)		
22. Barang tahan lama (alat rumahtangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan, alat olahraga, perhiasan mahal/imitasi, kendaraan, payung, arloji, kamera, dan lainnya)		
23. Pajak dan asuransi (PBB, pajak radio/TV, pajak kendaraan, asuransi kecelakaan/kesehatan)		
24. Keperluan pesta dan upacara (perkawinan, khitanan, ulang tahun, perayaan hari agama, upacara adat, dan lainnya)		
25. Jumlah bukan makanan (rincian 17 s.d. 24)		
26. Rata-rata pengeluaran makanan sebulan (rincian 16 x $\frac{30}{7}$)		
27. Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan (rincian 25 Kolom 3 x 12)		
28. Rata-rata pengeluaran rumahtangga sebulan (rincian 26 + 27)		
29. Sumber penghasilan utama rumahtangga:	Diisi editor <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2006

KETERANGAN POKOK RUMAH TANGGA DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT											
1	Propinsi		<table border="1"> <tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
2	Kabupaten/Kota*)										
3	Kecamatan										
4	Desa/Kelurahan*)										
5	Klasifikasi desa/kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan									
6	a. Nomor blok sensus										
	b. Nomor sub blok sensus (nomor segmen)										
7	Nomor kode sampel		<input type="text"/>								
8	Nomor urut rumah tangga sampel		<input type="text"/>								
II. KETERANGAN RUMAH TANGGA											
1	Nama kepala rumah tangga:	3	Jumlah anggota rumah tangga usia 0-4 tahun: <input type="text"/>								
2	Jumlah anggota rumah tangga: <input type="text"/>	4	Jumlah anggota rumah tangga yang meninggal sejak Januari 2003: <input type="text"/>								
III. KETERANGAN PELUGAS											
1	NIP/NMS pencacah: <input type="text"/>	5	NIP/NMS pemeriksa: <input type="text"/>								
2	Jabatan pencacah:	6	Jabatan pemeriksa:								
	1. Staf BPS Propinsi 3. KSK 2. Staf BPS Kab/Kota 4. Mitra		1. Staf BPS Propinsi 3. KSK 2. Staf BPS Kab/Kota 4. Mitra								
4	Apakah pernah menjadi pelugas Susenas Kor 3 tahun terakhir? 1. Ya 2. Tidak	7	Pernyataan pemeriksa:								
	Pernyataan pencacah: DAFTAR INI SUNGGUH-SUNGGUH SAYA ISI BERBASARKAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA RESPONDEN		ISIAN DAFTAR INI SUNGGUH-SUNGGUH TELAH SAYA PERIKSA								
	Tanggal:		Tanggal:								
	Tanda tangan:		Tanda tangan:								
	Nama jelas: [.....]		Nama jelas: [.....]								

*) Coret yang tidak perlu

IV. A. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA

No. urut	Nama anggota rumah tangga (Tulis siapa saja yang biasanya tinggal dan makan di rt ini baik dewasa, anak-anak maupun bayi)	Hubungan dengan kepala rumah tangga (kode)	Jenis kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan	Umur (tahun)	Status perkawinan (kode)	Apakah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir? 1. Ya 2. Tidak	Untuk art yang bepergian 1 Mei - 31 Juli 2006 ¹⁾ frekuensi bepergian (kali). Jika tidak, isikan "00"	Art 0-4 th	Art 2-6 th
								Apakah mempunyai akte kelahiran dari kantor catatan sipil? Boleh saya melihatnya? (kode)	Apakah pernah sedang mengikuti pendidikan pra sekolah? (kode)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. B. KEJADIAN KEMATIAN SEJAK JANUARI 2003

No. urut	Nama yang Meninggal	Tahun kejadian sejak Januari 2003	Jenis kelamin 1. Lk 2. Pr	Umur saat meninggal		Sebab kematian: (kode)	Untuk wanita saat meninggal berumur 10 tahun ke atas, apakah kematiannya terjadi pada:		
				Kurang dari 2 tahun, umur dlm bulan	2 tahun ke atas, umur dlm tahun		Masa kehamilan? 1. Ya 2. Tidak	Saat persalinan/keguguran? 1. Ya 2. Tidak	Masa nifas? 1. Ya 2. Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									

Kode Kol. 3, Blok IV.A:
Hubungan dengan kepala rt

1. Kepala rt
2. Istri/suami
3. Anak
4. Menantu
5. Cucu
6. Org tua/mertua
7. I orang lain
8. Pembantu rt
9. Lainnya

Kode Kol. 6, Blok IV.A:
Status perkawinan

1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai hidup
4. Cerai mati

Kode Kol. 9, Blok IV.A:
Akte Kelahiran

1. Ya, dpt ditunjukkan
2. Ya, tdk dpt ditunjukkan
3. Tidak punya
4. Tidak tahu

Kode Kol. 10, Blok IV.A:
Pendidikan pra sekolah

1. Ya, IK/BA/RA
2. Ya, Kelompok Bermain
3. Ya, Taman Penitipan Anak
4. Ya, PAUD terintegrasi BKB/Posyandu
5. Ya, lembaga lainnya
6. Tidak

Kode Kol. 7, Blok IV.B:
Sebab kematian

1. Kecelakaan lalu lintas (lain)
2. Kecelakaan bukan lalu
3. Bukan kecelakaan

Keterangan: ¹⁾ Art yang bepergian: Melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial, dan atau menginap di akomodasi komersial, dan atau jarak perjalanan > 100 km (p.p.), tidak termasuk pelaju (commuter), sekolah.

²⁾ Pada umumnya 2 bulan setelah melahirkan/keguguran
Studi evaluasi..., Rizqon Halal Syah Aji, Pascasarjana UI, 2009.

V. KETERANGAN PERORANGAN TENTANG KESEHATAN, PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN, SERTA FERTILITAS DAN KB

Nama No. urut:

No urut ibu kandung:
 (Isikan 00 bila ibu kandung tidak tinggal di rt ini)

Nama & nomor urut art pemberi informasi:

V.A. KETERANGAN KESEHATAN (UNTUK SEMUA UMUR)

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir mempunyai keluhan kesehatan seperti di bawah ini? (Bacakan dari a s.d. h) (Isikan kode 1 bila ada, kode 2 bila tidak ada)

a. Panas <input type="checkbox"/>	e. Diare/buang ² air <input type="checkbox"/>
b. Batuk <input type="checkbox"/>	f. Sakit kepala berulang <input type="checkbox"/>
c. Pilek <input type="checkbox"/>	g. Sakit gigi <input type="checkbox"/>
d. Asma/napas sesak/cepat <input type="checkbox"/>	h. Lainnya*) <input type="checkbox"/>

[Jika semua R.1 = 2, lanjutkan ke R.8]

2. Kalau ada keluhan, apakah menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari?
 1. Ya 2. Tidak ⇨ [R.5.a]

3. Lamanya terganggu: hari

4. Apakah sekarang masih terganggu?
 1. Ya 2. Tidak

5. a. Apakah pernah mengobati sendiri dalam 1 bulan terakhir?
 1. Ya 2. Tidak ⇨ [R.6]

b. Jenis obat/cara pengobatan yang digunakan: (Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak)

1. Tradisional 2. Modern 3. Lainnya

6. Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir?
 1. Ya 2. Tidak ⇨ [R.8]

7. Berapa kali berobat jalan selama 1 bulan terakhir. (Isikan frekuensi berobat jalan untuk setiap fasilitas)

a. RS pemerintah <input type="text"/>	e. Praktek nakes <input type="text"/>
b. RS swasta <input type="text"/>	f. Praktek batra <input type="text"/>
c. Praktek dokter/poliklinik <input type="text"/>	g. Dukun bersalin <input type="text"/>
d. Puskesmas/Pustu <input type="text"/>	h. Lainnya <input type="text"/>

8. Apakah pernah rawat inap dalam 1 tahun terakhir?
 1. Ya 2. Tidak ⇨ [R.10]

9. Lamanya hari rawat inap (dalam hari):

a. RS Pemerintah <input type="text"/>	d. Praktek nakes <input type="text"/>
b. RS Swasta <input type="text"/>	e. Praktek batra <input type="text"/>
c. Puskesmas <input type="text"/>	f. Lainnya <input type="text"/>

10. Apakah tersedia jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan untuk keperluan berobat jalan/rawat inap seperti di bawah ini? (Isikan kode 1 bila ya, kode 2 bila tidak)

a. JPK PNS/Veteran/Pensiun <input type="checkbox"/>	d. JPK Jamsostek <input type="checkbox"/>
b. Tunjangan/penggantian biaya oleh perusahaan <input type="checkbox"/>	e. Asuransi kesehatan swasta <input type="checkbox"/>
c. JPK MM/kartu sehat/ JPK Gakin/kartu miskin/ kartu askeskin <input type="checkbox"/>	f. Dana sehat <input type="checkbox"/>
	g. JPKM/JPK lain <input type="checkbox"/>

V.B. KESEHATAN BALITA (UNTUK ART UMUR 0-59 BULAN)

11. a. Umur dalam bulan: bulan (ke R.12 bila isian ≠ 00)

b. Jika R.11.a = 00, umur dalam hari: hari

12. Siapa yang menolong proses kelahiran? (Isikan kode jawaban langsung ke kotak)

1. Dokter	4. Dukun bersalin	Pertama <input type="checkbox"/>
2. Bidan	5. Famili/keluarga	
3. Tenaga paramedis lain	6. Lainnya	Terakhir <input type="checkbox"/>

13. Berapa kali sudah mendapat imunisasi? (Isikan 0, bila belum pernah diimunisasi)

a. BCG <input type="checkbox"/>	d. Campak/Morbilli <input type="checkbox"/>
b. DPT <input type="checkbox"/>	e. Hepatitis B <input type="checkbox"/>
c. Polio <input type="checkbox"/>	

14. a. Apakah pernah diberi Air Susu Ibu (ASI)?
 1. Ya 2. Tidak ⇨ [Art lain]

b. Jika "Ya" (R.14.a=1), lama pemberian ASI: (Isikan dalam hari bila umur < 1 bulan dan dalam bulan bila umur > 1 bulan):

1. Lama pemberian ASI:

2. ASI saja:

3. ASI dengan makanan pendamping:

V.C. KETERANGAN PENDIDIKAN (UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS)

15. Partisipasi bersekolah:

1. Tidak/belum pernah bersekolah ⇨ [R.17]

2. Masih bersekolah ⇨ [R.18]

3. Tidak bersekolah lagi

16. Kapan berhenti bersekolah? (Isikan '00 dan 0000' bila berhenti sebelum tahun 1996)

Bulan: Tahun:

17. Alasan tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi:

1. Tidak ada biaya	8. Cacat
2. Tidak suka/malu	9. Menunggu pengu- muman
3. Bekerja/mencari nafkah	10. Sudah diterima, belum mulai sekolah
4. Menikah/mengurus rt	11. Belum cukup umur
5. Tidak diterima	12. Lainnya
6. Sekolah jauh	
7. Merasa penddk cukup	

[Jika R.15=1, lanjutkan ke R.21]

18. Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki:

1. Sekolah Dasar	7. SMK
2. Madrasah Ibtidaiyah	8. Program D.IV.D.II
3. SMP Umum/Kejuruan	9. Program D.III
4. Madrasah Tsanawiyah	10. Program D.IV/S.1
5. S MA	11. S.2 / S.3
6. Madrasah Aliyah	

*) Misalnya Campak, telinga berair/congok, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumrah dalam kecelakaan dll

<p>19. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: 1 2 3 4 5 6 7 8 (Tamat)</p>	<input type="checkbox"/>	<p>28. Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dari tempat bekerja selama seminggu terakhir: (Tulis selengkap-lengkapnyanya)</p>	[diisi]																				
<p>20. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki: 1. Tdk punya ijazah SD 7. M. Aliyah 2. SD 8. SMK 3. M. Ibtidaiyah 9. Diploma I/II 4. SMP Umum/Kejuruan 10. Diploma III/Sar Mud 5. M. Tsanawiyah 11. Diploma IV/S1 6. SMA 12. S2/S3</p>	<input type="checkbox"/>	<p>29. Jenis pekerjaan/jabatan dari pekerjaan utama selama seminggu terakhir: (Tulis selengkap-lengkapnyanya)</p>	[diisi]																				
<p>21. Dapat membaca dan menulis: 1. Huruf latin 2. Huruf lainnya 4. Tidak dapat</p>	<input type="checkbox"/>	<p>30. Status/kedudukan dalam pekerjaan utama selama seminggu terakhir: 1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4. Buruh/karyawan/pegawai → [R.31] 5. Pekerja bebas di pertanian 6. Pekerja bebas di non-pertanian 7. Pekerja tidak dibayar</p>	[Blok V.E] [Blok V.E]																				
V.D. KETENAGAKERJAAN (UNTUK ART BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS)																							
<p>22. a. Apakah melakukan kegiatan seperti di bawah ini selama seminggu terakhir?</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Bekerja</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Sekolah</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Mengurus rumah tangga</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Lainnya</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Ya	Tidak		1. Bekerja	1	2	1 <input type="checkbox"/>	2. Sekolah	1	2	2 <input type="checkbox"/>	3. Mengurus rumah tangga	1	2	3 <input type="checkbox"/>	4. Lainnya	①	2	4 <input type="checkbox"/>			
	Ya	Tidak																					
1. Bekerja	1	2	1 <input type="checkbox"/>																				
2. Sekolah	1	2	2 <input type="checkbox"/>																				
3. Mengurus rumah tangga	1	2	3 <input type="checkbox"/>																				
4. Lainnya	①	2	4 <input type="checkbox"/>																				
<p>b. Dari kegiatan 1 s.d. 4 di atas yang menyatakan "Ya", kegiatan apakah yang menggunakan waktu terbanyak selama seminggu terakhir? 1 2 3 4 [Jika R.22.a.1 = 1, lanjutkan ke R.24]</p>	<input type="checkbox"/>																						
<p>23. Apakah mempunyai pekerjaan/usaha, tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir? 1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>																						
<p>24. Apakah sedang mencari pekerjaan? 1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>																						
<p>25. Apakah sedang mempersiapkan suatu usaha selama seminggu terakhir? 1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>																						
R.26 ditanyakan jika R.24 = 2 dan R.25 = 2																							
<p>26. Alasan utama tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha: 1. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 2. Sudah punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja 3. Sekolah atau mengurus rumah tangga 4. Sudah punya pekerjaan/usaha 5. Merasa sudah cukup 6. Tidak mampu melakukan pekerjaan (jompo, cacat) 7. Lainnya (tuliskan):</p>	<input type="checkbox"/>																						
HANYA UNTUK ART YANG BEKERJA [R.22.a.1 = 1 atau R.23 = 1]																							
<p>27. a. Jumlah hari kerja: hari b. Jumlah jam kerja dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu terakhir:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Sen</td> <td style="text-align: center;">Sel</td> <td style="text-align: center;">Rab</td> <td style="text-align: center;">Kam</td> <td style="text-align: center;">Jum</td> <td style="text-align: center;">Sab</td> <td style="text-align: center;">Ming</td> <td style="text-align: center;">Jumlah (Jam)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Jumlah (Jam)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Jumlah (Jam)																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<p>32. Umur pada saat perkawinan pertama: tahun</p>				<input type="checkbox"/>																			
<p>33. Jumlah tahun di nikahkan perkawinan: tahun</p>				<input type="checkbox"/>																			
<p>34. Jumlah anak kandung (a.k.) yang dilahirkan:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Laki-laki</td> <td style="text-align: center;">Perempuan</td> <td style="text-align: center;">Lk + Pr</td> </tr> <tr> <td>a. A.k. lahir hidup</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. A.k. masih hidup</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. A.k. sudah meninggal</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr	a. A.k. lahir hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. A.k. masih hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. A.k. sudah meninggal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr																				
a. A.k. lahir hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
b. A.k. masih hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
c. A.k. sudah meninggal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				
<p>35. Penggunaan/pemakaian alat/cara KB: 1. Sedang menggunakan 2. Tidak menggunakan lagi 3. Tidak pernah menggunakan } [Art lain]</p>				<input type="checkbox"/>																			
<p>36. Jika sedang menggunakan (R.35=1), alat/cara KB yang sedang digunakan/dipakai:</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1. MOW/tubektomi</td> <td>6. Pil KB</td> </tr> <tr> <td>2. MOP/vasektomi</td> <td>7. Kondom/karet KB</td> </tr> <tr> <td>3. AKDR/IUD/spiral</td> <td>8. Intravag/tissue/kondom wanita</td> </tr> <tr> <td>4. Sunlikan KB</td> <td>9. Cara tradisional</td> </tr> <tr> <td>5. Susuk KB/norplan/implanon/alwalit</td> <td></td> </tr> </table>				1. MOW/tubektomi	6. Pil KB	2. MOP/vasektomi	7. Kondom/karet KB	3. AKDR/IUD/spiral	8. Intravag/tissue/kondom wanita	4. Sunlikan KB	9. Cara tradisional	5. Susuk KB/norplan/implanon/alwalit		<input type="checkbox"/>									
1. MOW/tubektomi	6. Pil KB																						
2. MOP/vasektomi	7. Kondom/karet KB																						
3. AKDR/IUD/spiral	8. Intravag/tissue/kondom wanita																						
4. Sunlikan KB	9. Cara tradisional																						
5. Susuk KB/norplan/implanon/alwalit																							

VI. PERUMAHAN		VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA	
1. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang dilempati: 1. Milik sendiri 2. Kontrak 3. Sewa 4. Bebas sewa 5. Dinas 6. Rumah milik orang tua/sanak/saudara 7. Lainnya	<input type="checkbox"/>	VII.A. PENGELUARAN UNTUK MAKANAN SELAMA SEMINGGU TERAKHIR [BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI, DAN PEMBERIAN]	Jumlah (Rp)
2. Jenis atap terluas: 1. Beton 2. Genteng 3. Sirap 4. Seng 5. Asbes 6. Ijuk/rumbia 7. Lainnya	<input type="checkbox"/>	(1)	(2)
3. Jenis dinding terluas: 1. Tembok 2. Kayu 3. Bambu 4. Lainnya	<input type="checkbox"/>	1. Padi-padian a. Beras b. Lainnya (jagung, terigu, tepung beras, tepung jagung, dll.)	
4. Jenis lantai terluas: 1. Bukan tanah 2. Tanah	<input type="checkbox"/>	2. Umbi-umbian (ketela pohon, ketela rambat, kentang, gaplek, talas, sagu, dll.)	
5. Luas lantai: m ²	<input type="checkbox"/>	3. Ikan/ludang/cumi/kerang a. Segar/basah b. Asin/diawetkan	
6. a. Sumber air minum: 1. Air dalam kemasan 2. Leding 3. Pompa 4. Sumur terlindung 5. Sumur tak terlindung 6. Mata air terlindung 7. Mata air tak terlindung 8. Air sungai 9. Air hujan 0. Lainnya	<input type="checkbox"/>	4. Daging (daging sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ayam, jeroan, hati, limpa, abon, dendeng, dll.)	
b. Jika R.6.a=3 s.d 7 (pompa/sumur/mata air) jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat: 1. < 10 m 2. > 10 m 3. Tidak tahu	<input type="checkbox"/>	5. Telur dan susu a. Telur ayam/itik/puyuh b. Susu mumi, susu kental, susu bubuk, dll.	
7. Penggunaan fasilitas-air minum (R.6a +1): 1. Sendiri 2. Bersama 3. Umum 4. Tidak ada	<input type="checkbox"/>	6. Sayur-sayuran (bayam, kangkung, ketimun, wortel, kacang panjang, buncis, bawang, cabe, tomat, dll.)	
8. Cara memperoleh air minum: 1. Membeli 2. Tidak membeli	<input type="checkbox"/>	7. Kacang-kacangan (kacang tanah/hijau/kedele/merah/tunggak/mete, tahu, tempe, tauco, oncom, dll.)	
9. a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar: 1. Sendiri 2. Bersama 3. Umum 4. Tidak ada ⇒ [R.9.c]	<input type="checkbox"/>	8. Buah-buahan (jeruk, mangga, apel, durian, rambutan, salak, duku, nanas, semangka, pisang, pepaya, dll.)	
b. Jenis kloset: 1. Leher angsa 2. Plengsengan 3. Cemplung/cubluk 4. Tidak pakai	<input type="checkbox"/>	9. Minyak dan lemak (minyak kelapa/goreng, kelapa, mentega, dll.)	
c. Tempat pembuangan akhir tinja: 1. Tangki 2. Kolam/sawah 3. Sungai/danau/laut 4. Lobang tanah 5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya	<input type="checkbox"/>	10. Bahan minuman (gula pasir, gula merah, teh, kopi, coklat, sirup, dll.)	
10. Sumber penerangan: 1. Listrik PLN 2. Listrik non PLN 3. Petromak/aladin 4. Pelita/sentir/orbor 5. Lainnya	<input type="checkbox"/>	11. Bumbu-bumbuan (garam, kemiri, ketumbar, merica, terasi, kecap, vetsin, dll.)	
11. Pengeluaran bahan bakar/energi untuk memasak dan penerangan rumah tangga sebulan terakhir:		12. Konsumsi lainnya a. Mie instant, mie basah, bihun, makaroni/mie kering b. Lainnya (kerupuk, emping, dll.)	
a. Listrik PLN: Rp	<input type="checkbox"/>	13. Makanan dan minuman jadi a. Makanan jadi (roti, biskuit, kue basah, bubur, bakso, gado-gado, nasi rames, dll.) b. Minuman non alkohol (Soft drink, es sirup, limun, air mineral, dll.) c. Minuman mengandung alkohol (bir, anggur, dan minuman keras lainnya)	
b. Minyak tanah: Rp	<input type="checkbox"/>	14. Tembakau dan sirih a. Rokok (rokok kretek, rokok putih, cerutu) b. Lainnya (sirih, pinang, tembakau, dan lainnya)	
c. Kayu bakar: Rp	<input type="checkbox"/>	15. Jumlah Makanan (Rincian 1 s.d. 14)	

VII. PENGELUARAN RUMAH TANGGA (LANJUTAN)

VII.B. PENGELUARAN BUKAN MAKANAN (BERASAL DARI PEMBELIAN, PRODUKSI SENDIRI DAN PEMBERIAN)	Sebulan Terakhir (Rp)	12 bulan Terakhir (Rp)
(1)	(2)	(3)
16. Perumahan dan fasilitas rumah tangga a. Sewa, kontrak, perkiraan sewa rumah (milik sendiri, bebas sewa, dinas), dan lain-lain		
b. Pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan		
c. Rekening listrik, air, gas, minyak tanah, kayu bakar, dll.		
d. Rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel, benda pos, dll.		
17. Aneka barang dan jasa		
a. Sabun mandi/cuci, kosmetik, perawatan rambut/muka, tissue dll		
b. Biaya kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dokter praktek, dukun, obat-obatan, dan lainnya)		
c. Biaya pendidikan (uang pendaftaran, SPP, POMG/BP3, uang pangkal/daftar ulang, pramuka, prakarya, kursus, dan lainnya)		
d. Transportasi, pengangkutan, bensin, solar, minyak pelumas		
e. Jasa lainnya (gaji sopir, pembantu rumah tangga, hotel, dll)		
18. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala (pakaian jadi, bahan pakaian, sepatu, topi, dan lainnya)		
19. Barang tahan lama (alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, alat hiburan (elektronik), alat olahraga, perhiasan, kendaraan, payung, arloji, kamera, HP, pasang telepon, pasang listrik, barang elektronik dll.)		
20. Pajak, pungutan, dan asuransi		
a. Pajak (PBB, pajak kendaraan)		
b. Pungutan/retribusi		
c. Asuransi kesehatan		
d. Lainnya (Asuransi lainnya, tilang, PPh, dll)		
21. Keperluan pesta dan upacara/kenduri tidak termasuk makanan (perkawinan, ulang tahun, khitanan, upacara keagamaan, upacara adat, dan lainnya)		
22. Jumlah bukan makanan (Rincian 16 s.d. Rincian 21)		
23. Rata-rata pengeluaran makanan sebulan (Rincian 15 x $\frac{30}{7}$)		
24. Rata-rata pengeluaran bukan makanan sebulan (Rincian 22 Kolom 3) $\frac{12}{12}$		
25. Rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan (Rincian 23 + Rincian 24)		
26. Sumber penghasilan terbesar rumah tangga (pilih dari art dengan penghasilan terbesar): a. Lapangan usaha (Tulis selengkap-lengkapnya) b. Status pekerjaan: 0. Penerima pendapatan 1. Buruh/karyawan 2. Pengusaha	[dial editor] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

VIII. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI LAINNYA

<p>1. a. Apakah rumah tangga ini penerima BLT/SLT? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.2.a]</p>	<input type="checkbox"/>	<p>4. a. Apakah ada anggota rumah tangga yang menerima kredit usaha dalam setahun terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.5.a]</p>	<input type="checkbox"/>																													
<p>b. Kapan pertama kali mengambil BLT/SLT? Bulan Tahun</p>	<input type="checkbox"/>	<p>b. Jenis kredit yang diterima: 1. Program pengembangan kecamatan 2. Program P2KP 3. Program pemerintah lainnya 4. Program Bank 5. Program Koperasi Yayasan 6. Perorangan 7. Lainnya</p>	<input type="checkbox"/>																													
<p>2. a. Apakah ada anggota rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 6 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.3.a]</p>	<input type="checkbox"/>	<p>5. a. Apakah ada art/mantan anggota rumah tangga yang pernah/sedang bekerja sebagai TKI? 1. Ya 2. Tidak 3. Tidak tahu } [Blok IX]</p>	<input type="checkbox"/>																													
<p>b. Jika "Ya" (R.2.a=1), kartu yang digunakan: 1. Askeskin 2. KKB 3. Kartu sehat 4. Lainnya:</p>	<input type="checkbox"/>	<p>b. Jika "Ya" (R.5.a=1), tuliskan jumlah anggota rumah tangga dan mantan art menurut jenis pekerjaannya?</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis pekerjaan</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Sedang</th> <th>Pernah</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Perawat</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Pembantu rt/baby sitter</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Sopir</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Tukang bangunan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Buruh perkebunan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6. Buruh pabrik</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7. Lainnya:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis pekerjaan	Jumlah		Sedang	Pernah	(1)	(2)	(3)	1. Perawat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Pembantu rt/baby sitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Sopir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Tukang bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Buruh perkebunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Buruh pabrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Lainnya:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jenis pekerjaan	Jumlah																															
	Sedang	Pernah																														
(1)	(2)	(3)																														
1. Perawat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
2. Pembantu rt/baby sitter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
3. Sopir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
4. Tukang bangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
5. Buruh perkebunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
6. Buruh pabrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
7. Lainnya:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<p>3. a. Apakah rt pernah membeli beras murah/raskin selama 6 bulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.4.a]</p>	<input type="checkbox"/>																															
<p>b. Jika "Ya" (R.3.a=1), berapa kg beras raskin yang dibeli? kg</p>	<input type="checkbox"/>																															
<p>c. Berapa rupiah per kg yang dibayar oleh rumah tangga untuk membeli beras raskin yang terakhir? Rp</p>	<input type="checkbox"/>																															

IX. TEKNOLOGI KOMUNIKASI & INFORMASI

<p>1. Apakah di rumah tangga ini ada telepon? 1. Ya 2. Tidak</p>	<input type="checkbox"/>	<p>4. a. Apakah rt ini menggunakan komputer untuk akses ke internet selama sebulan terakhir? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.5]</p>	<input type="checkbox"/>																							
<p>2. a. Apakah ada anggota rumah tangga yang mempunyai telepon selular (HP)? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.3]</p>	<input type="checkbox"/>	<p>b. Jika "Ya" (R.4.a=1), jumlah anggota rumah tangga yang menggunakan fasilitas tersebut: orang</p>	<input type="checkbox"/>																							
<p>b. Jika "Ya" (R.2.a=1), jumlah nomor HP yang dimiliki di rumah tangga ini: nomor</p>	<input type="checkbox"/>	<p>5. Penggunaan internet di luar rumah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lokasi penggunaan</th> <th colspan="2">Apakah ada art yg menggunakan internet di luar rt sebulan terakhir?</th> <th rowspan="2">Jika "Ya" (Kol 2=1), jumlah art yang menggunakan: (orang)</th> </tr> <tr> <th>1. Ya</th> <th>2. Tidak</th> <th>(orang)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Warnet</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Kantor/sekolah</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Lainnya</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Lokasi penggunaan	Apakah ada art yg menggunakan internet di luar rt sebulan terakhir?		Jika "Ya" (Kol 2=1), jumlah art yang menggunakan: (orang)	1. Ya	2. Tidak	(orang)	(1)	(2)	(3)	(3)	a. Warnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b. Kantor/sekolah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	c. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lokasi penggunaan	Apakah ada art yg menggunakan internet di luar rt sebulan terakhir?			Jika "Ya" (Kol 2=1), jumlah art yang menggunakan: (orang)																						
	1. Ya	2. Tidak	(orang)																							
(1)	(2)	(3)	(3)																							
a. Warnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
b. Kantor/sekolah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
c. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
<p>3. Apakah rt ini mempunyai komputer (Desktop, Laptop, Notebook)? 1. Ya 2. Tidak ⇒ [R.5]</p>	<input type="checkbox"/>																									